

**TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM PROSES PEMBAHASAN
PERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

(Kajian pragmatik tindak tutur direktif dalam proses pembahasan Peraturan Daerah
-PERDA- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang –RPJP- Daerah
di Kabupaten Karanganyar)



DISERTASI

Oleh :

SUTOPO

NIM : T 130906011

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI LINGUISTIK (S3)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to user

2011

**TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM PROSES PEMBAHASAN
PERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

(Kajian pragmatik tindak tutur direktif dalam proses pembahasan Peraturan Daerah
-PERDA- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang –RPJP- Daerah
di Kabupaten Karanganyar)

Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam bidang
Linguistik Minat Utama Pragmatik pada Universitas Sebelas
Maret Surakarta.

Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Sidang Senat
Terbuka terbatas di Bawah Pimpinan Rektor/Ketua Senat
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada Hari /Tanggal: Selasa, 10-Mei-2011.

Oleh :

SUTOPO

NIM: T 130906011

Lahir, di Klaten, 5- Mei-1957



KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahma dan Rahim. Atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang demikian besar telah memungkinkan penulis mengikuti pendidikan di program studi Linguistik S3 minat utama pragmatik, melaksanakan dan menyusun laporan penelitian, serta merampungkan penulisan disertasi ini.

Sudah barang tentu, dalam merencanakan, melaksanakan, menyusun dan mengerjakan penyusunan disertasi ini, peneliti mendapat sumbangan akademik, administratif dan non akademik yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu sudah selayaknya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada berbagai pihak.

Pertama, terima kasih yang tinggi penulis sampaikan kepada Prof.Dr.Ravik Karsidi,MS. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof. Drs Suranto,M.Sc.Ph.D. sebagai Direktur Program Pascasarjana UNS yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menempuh studi S3 pada program studi Linguistik dengan minat utama pragmatik di pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kedua, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof.Dr .D.H. Edi Subroto selaku ketua Program Studi Linguistik (S-3) Program Pascasarjana yang sekaligus bertindak sebagai pembimbing utama disertasi ini, yang dengan segala kesabaran, ketekunan, kecermatan, ketelitian dan kecendekiannya serta curahan kemampuan akademiknya kepada penulis di dalam mengarahkan dan memfokuskan jalannya penyelesaian disertasi ini. Melalui arahan-arahnya yang jelas dan tegas telah menjadi motivator peneliti untuk menyelesaikan penyusunan disertasi ini.

Ketiga, Prof Dr Samsi Haryanto, M.Pd., selaku promotor 1 yang dengan segala kesabaran dan kecendekiaan dan kecermatannya membuka wawasan kritis peneliti dalam menyikapi temuan-temuan TTD yang bersifat “*nakal dan aneh*” di lapangan, sehingga dapat dijangkau sebagai kekuatan di dalam penelitian ini. Melalui masukan-masukan yang sangat beralasan telah menumbuhkan keberanian penulis menurunkan

temuan penelitian menjadi rumusan semesta penggunaan TTD meskipun masih bersifat sederhana.

Keempat, Almarhum Prof Dr HB Sutopo, MA, MA. selaku kopromotor II penyusunan disertasi ini, yang dengan segala kesabaran dan ketekunannya di dalam membaca, mengoreksi tata tulis menulis karya ilmiah akhirnya memberikan masukan yang sangat berharga. Melalui kecermatannya dalam membaca dari halaman ke halaman telah mendorong penulis untuk senantiasa bercermin bahwa proses penulisan selalulah memerlukan sebuah tahap penyelarasan.

Kelima, terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Prof Dr. Soepomo Poedjosoedarmo dan Prof Dr R.B. Sumanto MA selaku tim pakar sosiopragmatik dan sosiologi hukum dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Melalui ketajamannya analisisnya dalam memberikan masukan telah mengugah penulis supaya tidak mudah menyerah ketika menyusun disertasi ini. Terima kasih yang tinggi pula penulis sampaikan kepada Prof. Dr. M. Sri Samiati Tarjana dan Prof. DR. Kunardi Hardjoprawiro, M.Pd. selaku tim pakar dari Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan segala kecermatan telah banyak memberikan saran perbaikan terhadap laporan disertasi ini. Melalui diskusi intensif dengan tim pakar dan konsultan tersebut sehingga perwujudan rumusan judul dan masalah disertasi ini dapat direalisasikan.

Keenam, terima kasih yang tinggi kepada almarhum Prof. Dr. Asim Gunarwan, Dr. Jumanto serta semua tenaga pengajar pada jurusan linguistik program pragmatik yang telah memberikan masukan-masukan perbaikan atas sejumlah persoalan yang dikemukakan oleh penulis, baik pada situasi perkuliahan resmi maupun situasi non resmi lainnya, sehingga fokus penelitian ini makin terarah.

Ketujuh, terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Drs Supriyadi SU Dekan FISIP dan Dr Prahastiwi selaku Dekan FISIP dan ketua Jurusan ilmu komunikasi yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh studi S 3. Teman-teman di Jurusan Komunikasi dan tim peneliti di Puslitdesbangda - LPPM – UNS yang selalu memberikan dorongan, semangat dan komunitas untuk membangun kebersamaan dan kerukunan dalam merealisasikan kelakar-kelakarnya secara sosio

commit to user

pragmatik Kedelapan, terima kasih tak terhingga kepada seluruh informan sebagai sumber penyediaan data penelitian ini, khususnya kepada Kepala Bidang Evaluasi dan perencanaan Bappeda Propinsi dan Kabid Biro Hukum Sekda Propinsi Jawa Tengah Kepala BAPPEDA, Kabid evaluasi dan pendataan BAPPEDA, anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, pengurus KADIN, pengurus HKTI dan aktivis LSM di wilayah Kabupaten Karanganyar dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan segala kearifannya, sehingga peneliti dapat melakukan dokumen tasi rekam-catat simak, pengamatan terlibat pasif, wawancara mendalam dan bahkan triangulasi data berkali-kali sebagai bahan penyediaan data penelitian ini.

Kesembilan, terima kasih yang tulus kepada Sri Jatiningsih, istri penulis tercinta dan kepada ketiga buah hati penulis : Ardanto Jatiwinoto SE (Antok), Dwi Ti-yanto Jatikuncoro (AAN) dan Roofi Jatisuryo Navianto (Roofi) dan anak angkat saya UUD Prianggono yang telah membantu pengetikan disertasi ini dan seluruh penulis yang telah memberikan dorongan dan doa yang tulus sehingga penyusunan disertasi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan hasil penelitian disertasi ini bermanfaat khususnya bagi pemerhati dan peneliti bidang kajian pragmatik dan perencanaan pembangunan daerah. Amin dan terima kasih.

Surakarta, Maret- 2011

Penulis

///



ABSTRAK

Sutopo. T 130906011. *Kajian Pragmatik Tindak Tutur Direktif dalam proses pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar. Disertasi, Program S3 Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Tim Pembimbing: Prof. Dr. H. D. Edi Subroto (Promotor), Prof. Dr. Samsiharyanto, M.Pd. (Kopromotor).*

Yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah wujud tindak tutur direktif-TTD- dalam proses pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah –RPJPD-dari tingkat desa sampai tingkat propinsi? Tujuan penelitian ini adalah ingin menunjukkan TTD yang terjadi dalam proses pembahasan Perda RPJPD sejak dari tingkat desa sampai propinsi dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang melatarbelakangi tuturan direktif dalam proses pembahasan RPJPD di Kabupaten Karanganyar.

Kebaharuan dalam penelitian ini adalah proses pembahasan Perda RPJPD dilihat dari sudut **pragmatik**, yaitu ingin mengkaji tindakan apa yang mereka tuturkan dalam proses pembahasan RPJPD dari berbagai tingkatan sejak dari tingkat desa sampai tingkat Propinsi Jawa Tengah. Manfaat penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para pakar, peneliti penggunaan bahasa Indonesia dan masyarakat luas tentang kesalinghubungan antara pengguna bahasa Indonesia dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar dengan alasan pada tahun 2008 sedang menyusun RPJPD. Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada masalah proses dan makna. Strategi yang digunakan yaitu studi kasus tunggal, karena penelitian ini akan terarah pada kajian TTD dan sub-TTD dalam proses pembahasan Perda RPJPD.

Hasil-hasil penelitian wujud TTD yang digunakan oleh penutur dan mitra tutur dalam proses pembahasan RPJPD dapat disimpulkan sejak dari desa sampai propinsi sebagian besar: tipe dasar *meminta* (56,6%) meliputi sub-TTD: *meminta*, *memohon* dan *mengharapkan* kecuali di kalangan **organisasi non pemerintah** yang sebagian besar menggunakan tipe dasar *mengkritik* (46%). Hal ini disebabkan *pertama*, para penutur di desa dan kecamatan pada umumnya (02 petutur) status sosialnya lebih rendah dari pada mitra tuturnya, sehingga logis kalau dalam menyampaikan tuturan tentang arah pembangunan desa menggunakan tipe dasar *meminta*. *Kedua*, Para pejabat daerah yang berfungsi sebagai nara sumber masih berpegang teguh pada dua **prinsip rukun dan prinsip hormat**, sehingga selalu menjaga **keharmonisan**, agar tidak dianggap sombong dan menjaga kerukunan dan kelancaran dalam pelaksanaan MUSRENBANGDA tersebut. Kemudian alasan kenapa di kalangan organisasi non Pemerintah lebih banyak yang menggunakan tipe **dasar mengkritik**. Sebab status atau

fungsi peserta dari organisasi non pemerintah ini sangat **netral** dan tidak dalam posisi pengambil policy, sehingga **tanpa beban** selalu melontarkan kritikan yang tajam.

Realisasi perwujudan tindak tutur direktif di dalam proses pembahasan RPJPD pada dasarnya tidak pernah tunggal. Para mitra tutur dan penutur dari tingkat desa sampai propinsi yang menggunakan tuturan direktif sebagian besar menggunakan jenis tuturan langsung dan langsung literal tetapi santun bahwa di masyarakat desa dalam Musrenbangda terjadi perubahan pola bertutur dari yang biasanya berputar-putar secara tidak langsung berubah menuju kearah yang lebih spesifik dan terbuka.

Secara umum realisasi TTD bagi para penutur dan mitra tutur dalam proses pembahasan Perda RPJPD berpijak pada prinsip-prinsip dasar berkomunikasi yaitu **prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan**. Bila dilihat dari hasil proses pembahasan Perda RPJPD yang menggunakan TTD di tingkat desa yang dapat diakomodasi ke tingkat kecamatan hanya 25%, sedangkan di tingkat kecamatan saran yang dapat diakomodasi hanya 40%. Selanjutnya di tingkat kabupaten di kalangan SKPD usulan yang dapat diakomodasi sebesar 33,4% dan di kalangan LSM saran yang dapat diakomodasi sebesar 42,8%. Selanjutnya di kalangan DPRD masukan yang dapat diakomodasi sebesar 50%, sedangkan di tingkat propinsi yang diakomodasi sebesar 91,6%. Dari data-data di atas menunjukkan bahwa usulan atau saran pembangunan daerah yang diusulkan dalam RPJPD oleh seseorang atau institusi yang semakin tinggi povernya atau kedudukannya akan semakin besar pula diakomodasi atau diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pembahasan Perda RPJPD yang dimulai dari tingkat desa sampai propinsi lewat Musrenbangda memberi **kesan cenderung formalitas**.

Implikasi kebijakan dalam penelitian ini adalah dalam proses penyusunan RPJPD perlu dicari model MUSRENBANG alternatif lain secara normatif tidak harus dilakukan pembahasan dari tingkat desa sampai propinsi, tetapi lebih diutamakan kepada kelompok-kelompok yang memahami, menghayati dan yang lebih professional, sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Kata kunci; Tindak tutur direktif, Sub-TTD *meminta, memohon, dan mengharapkan*; Perubahan perilaku bertutur di masyarakat desa, RPJPD forum MUSRENBANGDA.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk masa 20 tahun mendatang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk masa 5 tahun mendatang, dan rencana program jangka pendek satu tahunan yang terdiri atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah tersebut memerlukan koordinasi antarinstansi pemerintah dan tokoh–tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik serta organisasi sosial lainnya dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan MUSRENBANG.

Mengingat pentingnya tugas pemerintah pusat, propinsi, kabupaten atau kota, tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan dalam menyusun dokumentasi perencanaan pembangunan dengan tingkatannya baik yang jangka panjang, menengah maupun tahunan, maka Menteri Dalam Negeri bekerja sama dengan Menteri Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) setiap tahun mengeluarkan petunjuk teknis penyelenggaraan MUSRENBANG. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah tersebut memerlukan koordinasi antarinstansi pemerintah dan tokoh–tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi politik dan organisasi sosial lainnya, serta

partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut MUSRENBANG.

Dalam rangka kelembagaan Forum MUSRENBANG di semua tingkat pemerintahan sesuai dengan ketiga Undang-undang di atas, pemerintah daerah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun dokumen RPJPD dan RPJM serta RKP dan RKPD sebagai landasan penyusunan RAPBN/RAPBD setiap tahunnya.
2. Menyusun Rancangan RKP daerah dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara BAPPENAS dengan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pusat (RAKORPUS) penyusunan RKP daerah dan MUSRENBANG nasional.
3. Menyusun rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara BAPPEDA dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui penyelenggaraan MUSRENBANG di daerah masing-masing.
4. MUSRENBANG berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antarpelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antarkementerian/Lembaga/Satuan Kerja, Perangkat Daerah, dan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
5. Pelaksanaan MUSRENBANG tahun 2008 dalam rangka penyusunan rancangan RKP dan RKPD untuk tahun 2009 diselenggarakan sesuai dengan jadwal sebagai berikut.
 - a. MUSRENBANG desa/kelurahan dan MUSRENBANG kecamatan dilaksanakan sebelum MUSRENBANG kabupaten dan kota yang diselenggarakan pada bulan Januari dan Februari pada tahun bersangkutan.
 - b. MUSRENBANG daerah kabupaten/kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret 2008

commit to user

- c. Rapat Koordinasi Pusat (RAKORPUS) RKP dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2008.
- d. MUSRENBANG propinsi dilaksanakan pada bulan April, setelah penyelenggaraan MUSRENBANG daerah kabupaten/kota dan penyelenggaraan Rakorpus RKP.
- e. MUSRENBANG Nasional dilaksanakan pada akhir bulan April 2008 setelah penyelenggaraan MUSRENBANG Propinsi.

Tujuan MUSRENBANG baik di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten pada dasarnya sama yaitu:

- 1) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
- 2) Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten/kota maupun sumber pendanaan lainnya.
- 3) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada MUSRENBANG kecamatan.

Untuk *output* yang dihasilkan MUSRENBANG tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi polanya hampir sama, yaitu menghasilkan aspek: prioritas kegiatan, bahan MUSRENBANG pemerintah atasannya, daftar nama delegasi serta berita acara. Dilihat dari sudut pragmatik, bahasa memiliki peranan penting dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pengertian bahasa di sini yaitu sistem bunyi ujar yang bersifat sewenang-wenang yang dipergunakan oleh manusia dalam suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi secara umum dan wajar (Edi Subroto, 2000: 1). Bunyi ujar di sini maksudnya bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia seperti bibir, lidah, gusi, pita suara dan paru-paru untuk keperluan berbahasa secara umum. Lebih lanjut ditegaskan oleh Edi Subroto bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif. Bahasa dapat dipakai untuk mengemukakan gagasan dan pikiran serta perasaan yang berbelit-belit.

commit to user

Dalam penyusunan Perda RPJPD prosesnya cukup panjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, pembahasan Perda di DPRD dan proses persetujuan gubernur di tingkat propinsi.

Pada setiap tingkatan tersebut pembahasannya memiliki karakteristik– karakteristik kebahasaan tersendiri, sehingga menarik sekali dikaji dari aspek pragmatiknya, di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah baik itu lewat MUSRENBANG maupun lewat diskusi kelompok lainnya. Pada penyelenggaraan MUSRENBANG dan bentuk-bentuk diskusi kelompok lainnya di dalamnya selalu terjadi berbagai tindak tutur dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan latar belakang yang mendominasi budaya Jawa. Dalam proses pembahasan RPJPD dari berbagai tingkatan akan terjadi situasi tutur (*speech situation*), peristiwa tutur (*speech event*) dan berbagai macam tindak tutur (*speech act*). Salah satu tuturan yang muncul paling dominan yaitu tuturan direktif. Salah satu contoh tindak tutur **direktif** yaitu: "Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas generasi di desa-desa untuk masa mendatang, maka mohon perlunya ada arah kebijakan tentang pengembangan perpustakaan desa." Dengan demikian ketika proses pembahasan Perda RPJPD atau MUSRENBANG selalu terjadi dialog antar peserta yang hadir antara nara sumber dan peserta MUSRENBANG.

Hasil MUSRENBANG itu didokumentasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia pula. Di sinilah peran bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara untuk penyelenggaraan negara. Untuk itu, tentu masih banyak bentuk-bentuk tindak tutur direktif yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada penuturan direktif dalam proses pembahasan perda tentang RPJPD di suatu kabupaten.

Kajian mengenai fenomena kebahasaan semacam ini dapat menjadi bagian dari sosiolinguistik. Dalam *Conference on Sociolinguistics 1* di UCLA pada tahun 1964 ditetapkan ada 7 dimensi bidang kajian sosiolinguistik (Maryono, 2001: 11). Satu di antaranya adalah kajian tentang tingkatan variasi penggunaan bahasa yang banyak diminati para sosiolinguis.

Persoalannya adalah proses pembahasan perda –RPJPD– dilihat dari sudut pragmatik. Sebab di dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah menyangkut 3 aspek yaitu (1) setiap ide / ada pesan yang dituturkan , (2) ide atau pesan yang dituturkan harus mempunyai makna yang dapat dan mudah dipahami masyarakat (umum) dan (3) dilaksanakan oleh pelaksana pembangunan dalam hal ini pihak eksekutif (pemerintah daerah). Sebab pada hakikatnya bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan sebagai alat berinteraksi antara manusia satu dengan yang lain dalam suatu kelompok sosial. Menurut George LT, bahasa adalah fakta sosial, *language is a social fact* (de Saussure dalam Samson, 1980: 43) yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan kenyataan sosial tempat bahasa secara empiris perlu dilihat dalam kedudukannya sebagai fenomena sosial, atau kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya di dalam masyarakat (Suwito, 1985: 2). Kajian semacam ini dikenal dengan studi sosiolinguistik, yaitu studi bahasa yang difokuskan pada hubungan bahasa dengan konteks sosialnya, sebab bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat transaksi dan interaksi sosial dalam kelompok (Adnan Zaid, 1999: 1).

Upaya memasyarakatkan bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama dilakukan dan pelaksanaannya tidak begitu saja dilaksanakan tanpa sadar, tetapi dengan instruksi pemerintah, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20/1991 tentang “Pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa“ dan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. I/U/1992 tentang “Peningkatan usaha pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa“ (Instruksi Mendagri 1991 dan Instruksi Mendiknas 1992 dalam pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 1994).

Disadari oleh para linguist bahwa upaya mengukuhkan hakikat bahasa akan membawa hasil yang makin memuaskan jika disadari pula dengan

pemahaman terhadap pragmatik yakni penggunaan bahasa dalam komunikasi (Leech, 1983: 1; Wijana, 1996: 46). Oleh karena itu, penelitian yang mengambil pokok bahasan tentang aspek kebahasaan atau aspek tuturannya dalam proses pembahasan Perda RPJPD belum pernah ada dan sangat layak dilakukan serta diharapkan dapat menambah perkembangan khasanah keilmuan linguistik dengan perencanaan pembangunan daerah. Sebab yang dikatakan oleh penutur direktif mengandung arti sesuai dengan pengalaman normal mereka. Pengalaman itu akan diartikan secara lokal (budaya lokal) oleh masing-masing individu dan karena itu pengalaman akan terikat dengan keakraban dan harapan si penutur sesuai dengan latar belakang budaya antara penutur dan mitra tutur.

Bahasa yang tertib mencerminkan cara berpikir, sikap dan tindakan yang tertib pula. Dan ketertiban inilah kunci utama bagi berhasilnya pembangunan dan pembinaan bangsa (Amanat Kenegaraan, 1973, II: 82). Di dalam proses pembahasan RPJPD sering muncul ungkapan-ungkapan pejabat selaku nara sumber dalam MUSRENBANG maupun ungkapan dari masyarakat dalam bentuk bahasa tipikal seperti *ungkapan-ungkapan klise*, jargon pembangunan “*slank birokrasi yang formal*”, serta *language games* dan akronim atau meminjam istilah Suwito “*campur kode*” (dalam Suwito; 1987:89). Untuk itulah dalam penelitian ini juga mengungkap “*tebaran istilah*” yang menghimbau kearah ketertiban, kesatuan dan kemajuan bangsa dan akronim dan campur kode dan sebagainya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan langkah awal yang menentukan bagi penyusunan mata rantai metodologi berikutnya. Rumusan masalah merupakan petunjuk bagi model kerangka teoretis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah wujud tindak tutur direktif dalam proses pembahasan RPJPD sejak dari tingkat desa sampai di tingkat propinsi?
2. Bagaimanakah realisasi tindak tutur direktif yang digunakan para penutur dan mitra tutur dalam proses pembahasan RPJPD kaitannya dengan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan ?

3. Faktor –faktor apakah yang melatarbelakangi munculnya tuturan direktif yang digunakan dalam proses pembahasan RPJPD di Kabupaten Karang anyar?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan secara spesifik dengan rumusan masalah di atas, Tujuan penelitian adalah untuk menjawab masalah yang dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah. Keterkaitan rumusan masalah dengan tujuan penelitian adalah untuk memahami dan mendeskripsikan secara rinci beragam hal yang telah dirumuskan sebagai masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai :

1. Mewujudkan TTD yang terjadi dalam proses pembahasan perda RPJPD sejak dari tingkat desa sampai tingkat propinsi.
2. Mendeskripsikan realisasi TTD yang digunakan para penutur dan mitra tutur dalam proses pembahasan RPJPD kaitannya dengan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi TTD dalam proses pembahasan RPJPD di Kabupaten Karanganyar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Dapat memberikan pemahaman bahwa proses perencanaan perda pembangunan daerah ternyata dapat dikaji melalui disiplin ilmu linguistik khususnya dari bidang ilmu pragmatik . Dengan demikian membuka wawasan yang lebih luas terhadap kajian bidang ilmu pragmatik kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Manfaat penelitian ini dari dimensi keilmuan, yaitu dapat memberikan masukan kepada para pakar, peneliti penggunaan bahasa Indonesia dan masyarakat luas tentang kesalinghubungan antara pengguna bahasa Indonesia dengan proses Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Bagi ahli dan peneliti bahasa, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan sosiopragmatik, yang sampai saat ini terbukti masih relatif terbatas dan bahkan dapat dikatakan belum ada di Indonesia. Selanjutnya, dapat memberikan sumbangan pemikiran mutakhir tentang hasil analisis penggunaan bahasa dalam proses pembahasan perda tentang perencanaan pembangunan di daerah.
3. Bagi pengajaran bahasa penelitian ini diharapkan dapat merumuskan dan mengoperasionalkan kompetensi sosial menjadi bentuk, teknik dan strategi berkomunikasi, baik di masyarakat pada tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten saat menyusun draf Perda RPJPD dan juga pada saat pembahasan draf perda antara pihak eksekutif dan legislatif dalam konteks budaya tertentu. Pentingnya bahasa dalam “berkomunikasi” sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Manfaat lain, untuk memperkaya pengembang materi ajar penggunaan bahasa kepada mahasiswa di perguruan tinggi lebih khusus lagi, sebagai sumber pembelajaran materi prajabatan, diklat perencanaan pembangunan/Renstra, diklat kepemimpinan Sepama, bagi pejabat pemerintahan khususnya aparat BAPPEDA, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti: RKPD, KUA, dan PPAS serta RPJMD untuk kabupaten atau kota.
4. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat mempermudah membina dan menjamin kerja sama di dalam membangun komunikasi dan memahami serta mencermati dengan mudah terhadap bahasa dokumentasi perencanaan pembangunan daerah, baik jangka tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang. *commit to user*



BAB II

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih jauh tentang tinjauan pustaka dalam penelitian ini berikut ini dipaparkan beberapa thema penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan.

2.1.1 Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Salatiga Kota Madya Salatiga, 2004, Petrusresi, sebuah Thesis (S2, 2004). Pascasarjana UKSW Salatiga

Permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu: bagaimana bentuk-bentuk dan proses partisipasi masyarakat dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah mulai dari tingkat RT IX sampai tingkat kabupaten? Tujuan dari penelitian tersebut untuk menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah. Simpulan dari penelitian ini antara lain :

- 1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah melalui forum musyawarah Pembangunan dari RT VIII, IX dan RW IX Kelurahan Salatiga. Bentuk-bentuknya lebih banyak berupa kehadiran masyarakat secara langsung, pemberian kontribusi, pemikiran secara lisan berupa usul, saran, masukan dan diskusi dialog serta pembahasan secara mendalam, kritis dan objektif serta rasional terhadap usulan rencana program pembangunan daerah.
- 2) Proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah lewat diskusi UDKP perencanaan, rapat koordinasi pembangunan melalui identifikasi, penggalan, penjangkauan aspirasi, pengumpulan data dan pembentukan panitia.
- 3) Dari segi validitas dan partisipasi murni masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah tampaknya partisipasi langsung masyarakat secara nyata hanyalah pada arus forum MUSRENBANG, sedangkan forum UDKP perencanaan tingkat kecamatan tidak ada lagi

partisipasi langsung dari masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah hanya bersifat sebagai suatu mobilitas dan melegitimasi program.

4) Faktor-faktor yang mempengaruhi segi positif dalam perencanaan pembangunan daerah adalah:

- (1) Faktor pendidikan
- (2) Faktor kesadaran dan pemahaman akan kepentingan bersama
- (3) Faktor sosial ekonomi
- (4) Faktor kepemimpinan aparat cukup besar
- (5) Faktor kurangnya komitmen dan masih elitisnya aparat

2.1.2 Kajian Tindak Tutur Melarang di dalam Bahasa Indonesia di Kalangan Penutur Jati Bahasa Jawa, 1997, telah dipresentasikan pada konggres Linguistik Nasional, 7-11 Nopember 1997 di Surabaya oleh Sriono, dkk.

Yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini antara lain : bentuk-bentuk tindak tutur melarang yang seperti apa di dalam bahasa Indonesia di kalangan orang Jawa dan bagaimana strategi melarang berkorelasi dengan gradasi umur. Tujuan dari penelitian ini antara lain : Apakah betul orang Batak itu (pada umumnya) lebih terus terang di dalam mengutarakan pikiran (seperti yang banyak diduga) daripada orang Jawa. Begitu juga penelitian ini bertujuan untuk mencari data empiris yang dapat menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Perilaku kebahasaan di antara warga kedua suku itu mencerminkan perbedaan-perbedaan di dalam ideologi. Hasil penelitian antara lain "bentuk tindak tutur sebagian besar tidak basa-basi (*bald on record*), yaitu langsung dengan menggunakan kata jangan, seperti (1) Jangan merokok, (2) Jangan merokok di ruang ber-AC dan (3) Jangan mengganggu orang lain. Hasil yang lain, sebagian besar tindak tutur yang terjaring menggunakan strategi kesantunan negatif dengan menggunakan kata maaf, sebagai contoh (1) Maaf, Dik, sebaiknya tidak merokok, (2) Berhubung ruang ber-AC tolong tidak merokok, maaf. Hasil yang lain ditemukan kesantunan negatif yang lain

adalah ujaran yang mengungkapkan larangan dalam bentuk pertanyaan seperti (1) Saudara harus merokok di sini, (2) Bapak keberatan merokok di luar? Hasil penelitian yang menarik yaitu: untuk generasi di bawah 30 tahun ada 23,7% jauh lebih kecil dari pada persentase untuk generasi di atas 30 tahun ada 76,3%. Hal ini menunjukkan generasi yang lebih muda secara umum memang cenderung lebih berani mengungkapkan maksud pikiran mereka dari pada generasi yang lebih tua. Ada pergeseran norma perilaku bahasa di kalangan orang Jawa. Namun pergeseran itu belum tampak jelas dan baru terlihat jika diperhatikan secara lebih seksama.

2.1.3 Penelitian tentang direktif di dalam bahasa Indonesia di antara beberapa kelompok etnik di Jakarta 1991, yang dimuat pada makalah Pellba V tahun 1992, Unika Atma Jaya, 23-24 Juni 1992

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana derajat kesopanan bentuk-bentuk yang dipakai untuk menyatakan direktif di dalam bahasa Indonesia dan persepsi sopan santun bahasa penutur-penutur bahasa Indonesia dalam penggunaan direktif. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hierarki kesantunan sejumlah bentuk-bentuk ujaran yang dapat dipakai untuk menyatakan direktif itu. Hasil penelitian secara umum hierarki kesantunan bentuk-bentuk ujaran yang dipakai untuk menyatakan direktif tidak sama dengan hierarki kesantunan yang diadopsi dan dipakai di dalam penelitian *Cross Cultural Speech Act Realization Pattent*. Penelitian ini juga mengisyaratkan bahwa memang ada kesejajaran di antara ketidaklangsungan tindak ujaran direktif dan kesantunan pemakainya. Di samping itu, hierarki kesantunan direktif bagi para responden mempunyai varian-varian di antara kelompok-kelompok sosial yang dibedakan satu dari yang lain menurut kesukuan, jenis kelamin dan kelompok usia.

2.1.4 Studi tentang Urutan Kesantunan Pengungkapan Direktif di Kalangan Dwibahasawan Bahasa Indonesia-Bahasa Jawa di Jakarta: Kajian Sosiopragmatik, 1994, Dimuat di Makalah Pellba VII Universitas

Atma Jaya, Jakarta 26-27 Nopember 1994

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah urutan kesantunan bentuk-bentuk ujaran direktif di dalam bahasa Indonesia? Bagaimanakah urutan (hierarki) kesantunan bentuk-bentuk ujaran direktif di dalam bahasa Jawa? Tujuan dari penelitian ini untuk menyebarluaskan pendekatan fungsional (di dalam linguistik) di kalangan mahasiswa yang menekuni linguistik. Di samping itu, juga dapat memberikan hierarki bentuk-bentuk ujaran direktif di dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia menurut persepsi kesantunan penduduk suku Jawa di Jakarta. Hasil penelitian ini antara lain: para dwibahasawan bahasa Indonesia bahasa Jawa di Jakarta itu monokultural di dalam budaya Jawa. Juga tidak ada perbedaan penilaian kesantunan direktif bahasa Indonesia menurut variabel kelompok umur. Implikasinya bahwa norma penilaian kesantunan tindak tutur (direktif) bahasa Indonesia tidak atau belum bergeser. Penelitian ini memberikan saran agar pendekatan fungsionalisme di dalam kajian bahasa juga diajarkan di jurusan-jurusan bahasa di perguruan tinggi.

2.1.5 Pengungkapan Makna Imperatif dalam Bahasa Jawa di Llingkangan Pura Mangkunegaran Surakarta, Thesis (S2), Program Studi Linguistik Program Pascasarjana UNS, oleh Yumartati, Tahun 2003

Penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan yaitu bagaimanakah pengungkapan makna imperatif dalam bahasa Jawa di lingkungan Pura Mangkunegaran? dan bagaimana modus tutur pengungkapan makna imperatif dalam bahasa Jawa di lingkungan Mangkunegaran? Tujuan penelitian ini antara lain mendeskripsikan pengungkapan makna imperatif dalam bahasa Jawa di lingkungan Mangkunegaran. Penelitian ini diharapkan bermanfaat utamanya bagi para pemerhati bahasa Jawa dalam mempelajari lebih mendalam tentang hakekat dan seluk beluk pengguna dan pengungkapan makna imperatif yang sampai saat ini masih relatif terbatas.

Kerangka pikir dalam penelitian ini antara lain bahwa pengungkapan makna imperatif dalam bahasa Jawa adalah bentuk-bentuk tuturan bahasa Jawa yang

merupakan pengungkapan makna imperatif. Bentuk-bentuk tuturan bahasa Jawa itu diperoleh dari pengamatan penggunaan Bahasa Jawa, baik lisan maupun tertulis di lingkungan Pura Mangkunegaran.

Hasil penelitian ini antara lain, bahwa Jawa yang digunakan untuk mengungkapkan makna imperatif di lingkungan Pura Mangkunegaran pada umumnya adalah bahasa Jawa bentuk "*krama*". Penggunaan bentuk krama ini bergantung siapa penuturnya. Pengungkapan imperatif itu menggunakan tiga modus kalimat yaitu : modus kalimat imperatif, deklaratif dan kalimat interogatif. Implikasi dalam penelitian ini antara lain dapat memberi tambahan ilmu bagi peneliti bahasa Jawa yang ingin mengembangkan lebih lanjut tentang pengungkapan makna imperatif bahasa Jawa khususnya dalam kajian pragmatik. Penelitian ini memberikan saran bahwa masyarakat pemakai bahasa Jawa diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memaknai suatu tuturan khususnya tuturan yang bermakna imperatif.

2.1.6 Kajian Sosiopragmatik Berperspektif Jender di Lingkungan Pemerintahan Kota Surakarta, Harun Joko Prayitno, Disertasi, Pasca Sarjana UNS tahun 2009.

Penelitian ini berangkat dari suatu masalah bagaimana perwujudan tindak tutur direktif dalam peristiwa rapat dinas yang digunakan oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Untuk tujuan penelitian ini secara umum adalah mengeksplorasi, mengidentifikasi dan mendeskripsikan perwujudan tindak tutur direktif yang digunakan oleh pejabat dalam peristiwa rapat dinas di lingkungan pemerintah kota yang berlatar belakang budaya Jawa menurut perspektif Jender. Manfaat dari penelitian ini, bagi ahli dan peneliti bahasa, menambah khazanah kepustakaan studi sosiopragmatik, yang sampai saat ini terbukti masih relatif terbatas dan bahkan dapat dikatakan masih langka.

Jenis penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan ancangan sosiopragmatik. Penelitian ini dilakukan di lingkungan pemda Kota Madya Solo. Realisasi perwujudan TTD dalam hubungannya dengan PKS, PSS, PI, PR, PP dan PS serta PK dikuantifikasi, direrata dan dipresentase.

Temuan penelitian antara lain realisasi bentuk TTD dalam PRD diidentifikasi menjadi 36 sub-TTD itu dapat dibedakan menjadi dua tipe TTD

dasar yaitu tipe memerintah dan tipe melarang. Simpulan penelitian ini antara lain kategori pemilihan bahasa, keberadaan sebuah kode ditentukan oleh dua hal yaitu bentuk dan konfigurasi komponen tutur yang menjadi konteks pemahamannya. Dalam kompetensi komunikasi melibatkan pengetahuan tidak saja mengenai kode bahasa, tetapi juga apa yang akan dikatakan, kepada siapa dan bagaimana mengatakannya secara benar dalam situasi tertentu.

TABEL 2.1
PERBANDINGAN DARI KEENAM PENELITIAN YANG DIKUTIP
YANG ADA KAITANYA DENGAN PENELITIAN YANG AKAN
DILAKUKAN

No	Peneliti	Masalah	Metode	Tipe Khasanah Bahasa
1	Petrus Resi (UKSW) tahun 2004 (tesis)	Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	2
2	Sriyono (Pusat Bhs Indonesia) Tahun 1997(tesis)	Bentuk tindak tutur melarang	2,3	1,2
3	Unika Atmajaya thn 1992 (penelitian)	Derajat kesopanan untuk menyatakan direktif	3	1,2
4	UI Tahun 1994 (disertasi)	Kesantunan bentuk bentuk ujaran direktif	1,3	1
5	Yumartati UNS Tahun 2003 (tesis)	Makna imperatif dalam bahasa Jawa	1,3	1,2
6	Harun Joko Prayitno Tahun 2009 (disertasi)	1. Penggunaan TTD 2. Penggunaan kerja sama 3. penggunaan maksim	1,2,3	1,2,3
7	Sutopo (**sedang jalan) Tahun 2008 (disertasi)	1. T.T direktif dan komisif dlm perda 2. Motif dan strategi ke-2 TT tersebut. 3. Bagaimana tanggapan	1,2,3	1,2,3

		<i>steakholder</i> thd bahasa perdanya		
--	--	---	--	--

Keterangan : 1. Metode deskriptif struktural
2. Metode Komparatif
3. Metode Etnografi

2.2 Kajian teoritis

2.2.1 Pengertian Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan pembangunan di daerah. Menurut Louis A Allen (2003:15) menyatakan, “*Planning is the determination of the course of action to achieve a desired resul*”) artinya, perencanaan adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian pengertian pembangunan secara umum ada kesepakatan bahwa pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994:34) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Sementara itu, Ginanjar Kartasasmita (1994:9) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu pembangunan sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Namun, kritik juga datang dari para pendukung paradigma pembangunan lain, yang melihat bahwa paradigma pertumbuhan cenderung menciptakan efek negatif tertentu yang akibatnya menurunkan derajat keberlanjutan pembangunan.

Dorongan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya sering mengakibatkan terabaikan 2 upaya pembinaan kelembagaan dan pembinaan kapasitas. Pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui *centrally imposed blueprint plan* (Korten, 1986) yang dirumuskan oleh teknokrat, dan alokasi sumber pembangunan yang sentralistis cenderung *commit to user* memanfaatkan potensi masyarakat. Model pembangunan ini pada hakikatnya

merupakan pembangunan *delivered development*. Kecenderungan menerapkan gaya pembangunan ini cenderung menumbuhkan hubungan dependensi antara rakyat dan proyek pembangunan atau antara rakyat dan birokrat. Maka, sifatnya menjadi *disempowering*, menekan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan potensinya.

Hubungan dependensi ini tercermin di dalam kebutuhan yang terus-menerus akan input pembangunan yang juga dialokasikan dari *atas* atau dari luar. Eksistensi dan kelangsungan suatu kegiatan pembangunan akan terjamin selama didukung oleh input pembangunan yang berasal dari luar. Kegiatan yang demikian cenderung mengalami stagnasi dan disintegrasi begitu dukungan sumber dihentikan. Banyaknya *mortality rate* kegiatan-kegiatan pembangunan merefleksikan lemahnya *sustainability* kegiatan tersebut. Ciri-ciri kegiatan pembangunan yang demikian antara lain: (i) prakarsa biasanya dimulai dari pusat dalam bentuk rencana formal; (ii) proses penyusunan program bersifat statis dan didominasi oleh pendapat pakar atau teknokrat; (iii) teknologi yang digunakan biasanya bersifat "*scientific*" dan bersumber dari luar; (iv) mekanisme kelembagaannya bersifat *top-down*; (v) pertumbuhannya cepat, tetapi bersifat mekanistik; (vi) organisatornya para pakar spesialis; (vii) evaluasinya bersifat eksternal dan berorientasi pada dampak; dan (viii) fokus perhatiannya adalah cara menyelesaikan kegiatan tadi tepat pada waktunya. Kelemahannya terletak pada ketidakmampuan mencapai kondisi *self-generation of input* sehingga membahayakan kelanjutan kegiatan pembangunan tersebut.

Kedua, kritik terhadap pembangunan yang berorientasi pada pembangunan pertumbuhan yang melahirkan saran dalam bentuk diintegrasikannya *sustainability* atau keberlanjutan sebagai salah satu tujuan yang harus direalisasi melalui proses pembangunan.

Dari yang telah diuraikan di atas dapat dilacak pergeseran orientasi pembangunan dari orientasi pertumbuhan semata-mata menuju ke orientasi kelanjutan pembangunan (*sustainability*), di samping arah pergeseran orientasi pembangunan yang lain, seperti orientasi kesejahteraan, neo-ekonomi,

humanisme, dan lain-lain. Namun dari yang diutarakan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan penekanan dalam interpretasi konsep *sustainability*. Interpretasi yang pertama lahir dari pemikiran kaum *environmentalist* yang lebih menekankan perhatian pada efek pembangunan "*world system*" atau planet bumi kita, dan menghendaki agar interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam proses pembangunan memperhatikan kelanjutan pembangunan dan kelangsungan "*world system*". Sedangkan interpretasi kedua datang dari para pakar dalam "*donor agencies*" yang menekankan perlunya interaksi antara manusia dan proyek, memperhatikan *project sustainability*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara konseptual unsur-unsur pembangunan itu meliputi : adanya perubahan, tujuan pada tingkat yang lebih baik serta ukuran atau dasar yang digunakan mengukur kemajuannya.

2.2.3 Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan di mana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Dengan demikian, berarti perencanaan pembangunan, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk

tiga hal pokok yang meliputi : perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah) dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holistik dalam PPD, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tidak terelakkan (*conditio sine qua non*). Tetapi di pihak lain, adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki, tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diartikan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan oleh Affandi Anwa dan Setia Hadi, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengawasan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi (Prisma, 1996: 49).

Dikatakan wilayah tertentu, karena memang implementasinya hanya dapat dipergunakan di daerah tertentu. Di mana penelusuran lapangan dilakukan, sehingga tidak mungkin diimplementasikan di daerah lain secara utuh, kecuali untuk hal-hal tertentu saja yang memiliki keseranaan kondisi dan tuntutan kebutuhan yang hampir sama.

Jenssen (1995:65) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan serta sumber-sumber daya lainnya. Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan *endogen* atau dengan kata lain

pembangunan yang berbasis potensi.

Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi *spatial* suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses PPD. Pembangunan daerah akan mencakup suatu ruang tertentu, sehingga diperlukan adanya penataan ruang yang efektif. Tata ruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta implikasinya.

Ciri-ciri PPD dalam hal ini meliputi hal-hal sebagai berikut. (1) Menghasilkan program-program yang bersifat umum, (2) Analisis perencanaan bersifat makro luas, (3) Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang, (4) Memerlukan pengetahuan secara multidisipliner, general dan universal, namun memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas, (5) Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah (5 tahun) dan jangka panjang (20 tahun).

Faktor Budaya, Bahasa, dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Masalah budaya (*culture*) yang turut mewarnai kebiasaan hidup masyarakat yang ada dalam suatu daerah tertentu juga mempunyai andil yang cukup besar terhadap perencanaan pembangunan daerah. Bila ingin mencapai sasaran yang diharapkan, perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan faktor budaya/kultur yang berlaku di dalam masyarakat setempat.

Faktor budaya yang ada dalam kelompok masyarakat tidak dapat diabaikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang akan diimplementasikan dalam bentuk proses pelaksanaan pembangunan. Pentingnya masalah ini sudah banyak dikemukakan oleh para ahli administrasi pembangunan, karena hal ini sangat disadari sebagai salah satu faktor yang cukup penting untuk diperhatikan oleh para perencana pembangunan daerah. Sebab budaya berkaitan dengan aturan yang harus diikuti oleh para anggota masyarakat budaya yang bersangkutan dan karena itu ia bersifat normatif (Asim Gunawan, 2003:I). Oleh karena itu, budaya menentukan standar perilaku (Horton dan Hunt, 1987:64). Karena kebudayaan adalah sistem

norma yang mengatur "cara-cara merasa bertindak yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggotanya". Di dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa cara-cara itu tertakluk kepada pandangan dunia (*world view*) masyarakat budaya yang bersangkutan. Yang jelas, penerapan norma-norma budaya yang mengatur cara-cara itu lama-lama menjadi kebiasaan (*polways*), yang mengacu ke cara-cara yang dianggap lazim dan wajar dan diulang-ulang melakukan sesuatu oleh sekelompok orang (Asim Gunawan, 2003:2).

Kriteria lazim dan wajar itu kemudian melahirkan pandangan di dalam masyarakat yang bersangkutan bahwa ada hal-hal yang harus diikuti sebagai sopan santun dan perilaku kesopanan, dan dari sini timbullah pandangan tentang salah dan benar serta baik dan buruk mengenai kebiasaan hidup, termasuk kebiasaan berbahasa. pandangan ini kemudian menjadi tata perilaku (*mores*) masyarakat yang bersangkutan, dan tata perilaku inilah yang secara langsung mengatur perilaku anggota masyarakat. Dalam hal ini termasuk kebiasaan masyarakat untuk aktif ikut menyumbangkan pikiran (peran serta) dalam menanggapi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dengan kata lain jika dirunut balik, perilaku anggota masyarakat diatur oleh tata perilaku yakni yang diatur oleh kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, yang "diawasi" oleh norma-norma kebudayaan yang diwarnai oleh pandangan dunia masyarakat itu.

Pandangan yang telah diterima di kalangan pakar pragmatik yaitu jika kita berbicara atau mengeluarkan ujaran (berupa kalimat, frase atau kata), yang keluar dari mulut kita itu dapat dianggap sebagai tindakan. Tindakan itu dapat disebut sebagai tindakan berbicara, tindakan berujar atau tindakan bertutur. Di samping itu, di dalam melakukan tindak tutur, si penutur juga selalu mempertimbangkan antara lain hubungan sosial antara si penutur dan si petutur, untuk tindak tutur dilakukan, tentang apa dan sebagainya.

Hubungan di antara bahasa dan budaya dapat dirunut dari dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama, yang mengacu kepada kesemestaan budaya, yang mengatakan bahwa bahasa seperti kepercayaan dan mata pencaharian adalah komponen penting dalam budaya. Jika kebudayaan

didefinisikan sebagai totalitas pola perilaku, seni, kepercayaan, lembaga serta hasil karya dan buah pemikiran manusia yang menjadi ciri-ciri suatu masyarakat, pentingnya bahasa itu terletak pada kenyataan bahwa ia memegang peran yang penting sebagai alat transmisi budaya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya.

Pandangan yang lain yang dikemukakan Sapir-Whorf (Lee,1981:81) hubungan bahasa dan kebudayaan ada dua versi yaitu versi kuat dan versi lemah. Versi kuat memostulatkan bahwa bahasa menentukan cara berpikir penggunanya. Jadi, peran bahasa bersifat deterministik. Versi lemah memostulatkan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir para penggunanya. Versi kuat yang sering dirujuk sebagai determinisme linguistik dapat dirinci menjadi dua yaitu yang sangat kuat dan yang tidak terlalu kuat yang keduanya tidak berterima di kalangan linguis zaman sekarang. Yang sangat kuat mengatakan bahwa bahasa menentukan cara berpikir dan yang tidak terlalu kuat mengatakan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir. Versi lemah yang biasanya dirujuk sebagai relativitas linguistik juga dapat dirinci menjadi dua versi yang tidak terlalu lemah dan versi yang sangat lemah. Yang pertama itu memostulatkan bahwa bahasa yang berbeda menentukan cara berpikir secara berbeda-beda. Yang kedua memostulatkan bahwa bahasa yang berbeda mempengaruhi cara berpikir secara berbeda-beda. Versi yang sangat lemah itulah yang pada umumnya diterima di kalangan linguis dewasa ini (Asim Gunawan, 2003:3).

Perspektif yang manapun yang kita gunakan, yaitu perspektif kesemestaan budaya atau perspektif Whorf. Bila kita mengacu pada perspektif Whorf, versi yang manapun dari keempat versi tersebut, akan didapat bahwa hubungan bahasa dan budaya adalah erat. Senada dengan pendapatnya Fishman (1991:20-24), melihat tiga macam hubungan di antara bahasa dan budaya. Ketiganya adalah (1) Bahasa terkait dengan budaya secara indeksikal (karena dengan bahasa yang bersangkutanlah artifak yang dihasilkan budaya itu dapat disebut dengan tepat); (2) Bahasa terkait dengan budaya secara simbolis dan (3) Bahasa terkait dengan budaya secara sebagian-sebagian dan

secara keseluruhan. Menurut Fishman hubungan bahasa dan budaya telah lama tumbuh bersama-sama selama jangka waktu yang begitu lama, sehingga tercipta hubungan yang sangat serasi di antara keduanya.

2.2.3 Pengertian dan Penyelenggaraan MUSRENBANG

Untuk menyusun RKPD setiap tahunnya pemerintah pusat mengeluarkan Juknis MUSRENBANG yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan forum MUSRENBANG secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/ kota sampai tingkat propinsi.

Tujuan MUSRENBANG yang diselenggarakan setiap tingkatan yaitu :

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
2. Menetapkan prioritas kegiatan pada setiap tingkatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa.(ADD).
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada MUSRENBANG pemerintah atasannya.

Kegiatan **pasca** MUSRENBANG mempunyai tujuan antara lain untuk menjamin :

1. Konsistensi antara hasil MUSRENBANG dengan RKPD.
2. Konsistensi antara hasil perencanaan RKPD dengan Penganggaran (APBD) serta usulan program yang dapat masuk di RPJMD atau RPJPD.
3. Terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD.
4. Tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta MUSRENBANG, terutama tentang alasan diterimanya atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan melalui rangkaian forum MUSRENBANG di dalam APBD. Jikalau yang tidak bisa diusulkan dalam jangka pendek dapat dijadikan program jangka menengah atau jangka panjang. Menurut Surat Edaran Mendagri Nomor: 050/2020/SJ/ pada tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen

RPJPD dan RPJMD. Dalam surat edaran itu, dijelaskan bahwa penjaringan aspirasi dari masyarakat dalam rangka penyusunan RPJPD dan RPJMD dapat memanfaatkan atau dipersamakan dengan pelaksanaan MUSRENBANG tingkat desa dan kecamatan di wilayah yang bersangkutan yang diselenggarakan setiap tahunnya (Surat edaran Mendagri, 2005:12).

2.2.4 Pengertian dan Jenis-Jenis Pragmatik

Semantik dan pragmatik

Semantik berbeda dengan pragmatik, meskipun keduanya memandang bahasa dari segi makna, semantik memandang bahasa menurut makna leksikal, yang terpisah dari situasi dan konteks, dengan kata lain, memandang makna bahasa yang bebas konteks (*context independent*). Pragmatik memandang makna bahasa menurut pemakainya, yang terikat oleh situasi dan konteks (*context dependent*). Untuk itu makna yang dikaji dalam semantik adalah bersifat diadik, yang dapat dirumuskan menjadi *what does x mean?* "apa makna x itu?" Kemudian makna makna yang dikaji dalam pragmatik bersifat triadik, yang dapat dirumuskan menjadi *what did you mean by x?* "apa yang anda maksud dengan berkata x itu?" (periksa dalam Leech, 1993:8 dan Wijana, 1996:3). Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti lebih menitik beratkan pada kajian pragmatik, karena sesuai dengan judul, masalah dan tujuan penelitian ini. Untuk itu, berikut akan dipaparkan beberapa pengertian mengenai pragmatik.

Pragmatik menurut Parker (1986:10) adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bahasa secara eksternal, maksudnya adalah bagaimana satuan lingual tertentu digunakan dalam komunikasi yang sebenarnya. Parker membedakan pragmatik dengan studi tata bahasa, yang dianggapnya sebagai studi bahasa secara internal. Hal tersebut dapat diamati pada kutipan berikut. "*Pragmatics is distinct from grammar, which is the study of internal structure of language. Pragmatics is the study of how language is used to*"

communicate" (Parker, 1986:II). Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pragmatik berbeda dengan tata bahasa yang mempelajari struktur internal bahasa. Pragmatik mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi.

Sementara menurut Levinson pengertian pragmatik yaitu; "kajian bahasa dari perspektif fungsional, suatu kajian yang mengkaji aspek struktur linguistik dengan mengacu ke pengaruh-pengaruh dan sebab-sebab non linguistik". Kemudian menurut Jacob L. Mey (1993:36) pragmatik diartikan sebagai ilmu bahasa yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang sangat ditentukan oleh konteks yang melatarbelakangi bahasa itu secara sosial.

Menurut M. Rochmadi (2004:4), pragmatik adalah suatu kebahasaan yang terikat oleh konteks. Konteks di sini memiliki peranan kuat dalam menentukan maksud penutur dalam berinteraksi dengan lawan tutur. Hal tersebut senada yang disampaikan Leech, bahwa pragmatik mempelajari bahasa yang digunakan dalam komunikasi dan bagaimana pragmatik menyelidiki makna sebagai konteks, bukan sebagai sesuatu yang abstrak dalam komunikasi (Leech, 1993: 5). Sementara Wijana (1999:2) menjelaskan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal yakni satuan kebahasaan yang digunakan dalam berkomunikasi. Dengan demikian makna yang dikaji pragmatik adalah **makna yang terikat konteks** (*context dependent*) atau dengan kata lain mengkaji maksud penutur. Dengan demikian sebenarnya pragmatik dapat dimanfaatkan bagi setiap penutur untuk memahami maksud lawan tutur. Penutur dan lawan tutur dapat memanfaatkan pengalaman bersama (*background knowledge*) untuk memudahkan pengertian bersama, sehingga memungkinkan proses komunikasi dapat berjalan secara efektif.

Menurut Searle (1969) dalam semua komunikasi linguistik terdapat tindak tutur. Searle lebih menegaskan bahwa komunikasi tidak sekadar lambang, kata atau kalimat tetapi akan lebih tepat apabila disebut produk atau hasil dari lambang, kata atau kalimat yang berwujud tindak tutur. Oleh karena

itu, teori tindak tutur menekankan pada "perilaku linguistik" yang kita perlakukan pada orang lain. Perilaku ini memulai atau berkelanjutan pada terjadinya interaksi manusia satu dengan manusia lainnya. Tidak ada orang yang berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa menggunakan bahasa baik lewat simbol verbal maupun nonverbal (Alolili Weri, 2004:24). Prinsip kerja sarna sangat penting bagi pragmatik model Grice yaitu interaksi manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosiolinguistik dan analisa percakapan sangat mengutamakan terjadinya interaksi sosial menurut tempat terjadinya penggunaan bahasa, yang kita ketahui dan pahami tentang interaksi komplemen kemampuan penggunaan bahasa (Deborah Schiffrin, 2007:625):

2.2.4.1 Bahasa Sebagai Interaksi Sosial

Teori tindak tutur dimulai dengan pengamatan bahwa bahasa tidak hanya untuk mendeskripsikan dunia, tetapi juga untuk menggambarkan tindakan yaitu menekankan pada tindak komunikasi yang digambarkan melalui tuturan. Yang ditawarkan oleh teori tindak tutur adalah seperangkat aturan dengan tanda-tanda khusus untuk menentukan tindak tutur pembicara dan mitra tutur berasumsi saling berbagai aturan ini dan menggunakannya untuk menghasilkan dan menginterpretasi suatu variasi-variasi tindak (tanpa memperhatikan tindak-tandak itu berlaku untuk satu atau lebih tuturan) tindak khusus ditentukan melalui aturan yang bisa memberikan dugaan untuk suatu tindak berikutnya. Jadi, koherensi wacana muncul ada suatu tempat, berdasarkan tindakan demi tindakan, rangkaian hubungan antara tindakan yang dituturkan dari pengetahuan yang digunakan untuk menghubungkan suatu tuturan pada suatu tindakan (Deborah Schiffrin, 2007:613). Oleh karena itu, ancaman tindak tutur tidak hanya ditentukan oleh "struktur" dan hubungan teks atau konteks, tetapi juga oleh adanya koherensi (suasana menyeluruh dari wacana) dari proses koherensi yang ditemukan. Interaksi sosiolinguistik dimulai dengan makna linguistik dan sosial sebagai hasil kreasi selama interaksi. Dibandingkan dengan teori tindak tutur, interaksi sosiolinguistik menawarkan suatu kerangka analisis ujaran yang tidak hanya

sebagai tindakan, tetapi juga sebagai petunjuk-petunjuk sosial, budaya dan makna perseorangan.

Tuturan ditafsirkan menurut situasi konteks lokal dan konteks secara umum. Beberapa tuturan seseorang diasumsikan pada rangkaian yang relevan yaitu pada yang datang sebelumnya (konteks global). Petunjuk-petunjuk kontekstual merupakan aspek-aspek bahasa yang menimbulkan dua hal yaitu konteks dan penanda yang relevan dalam kerangka memahami pesan. Wacana bisa dilihat sebagai sarana kontekstual untuk memahami konstruksi pada tingkat yang berbeda. Tuturan yang kontekstual ditimbulkan oleh hal yang lain atau masing-masing ujaran itu sendiri dihubungkan pada suatu kerangka asumsi yang memberi petunjuk makin tinggi.

Kejadian-kejadian dan situasi bergantung pada tindakan-tindakan sebagai struktur komunikasi peristiwa tutur dan situasi tutur, peranan struktur tuturan menyatakan fungsi aturan tindakan dan fungsi tindakan itu sendiri memberikan sumbangan pada struktur peristiwa dan situasi. Dengan demikian, wacana (dan bahasa secara umum) merupakan bagian dari kebudayaan karena kebudayaan merupakan suatu kerangka tindakan, keyakinan dan pemahaman, kebudayaan merupakan suatu kerangka di mana komunikasi (pengguna ujaran) menjadi bermakna.

Pragmatik mulai dengan penekanan pada suatu perbedaan jenis makna dari ancangan kontekstual tidak semata-mata dari makna sosial dan budaya saja, tetapi individual, maksud utama makna dan masih dapat ditambah makna dari logika, proporsional dan makna-makna konvensional dapat dinyatakan melalui kode linguistik. Lebih dari itu pada pragmatik juga menawarkan kontekstual lain dalam menganalisa tuturan yaitu asumsi yang sangat umum bahwa penutur dan mitra tutur saling memberi kesempatan bertutur asumsi kerja sarana yang alamiah. Sebab asumsi bekerja secara tekstual dan informasi situasional memungkinkan adanya simpulan yang sangat khusus tentang makna penutur maupun tuturan itu. Sebab yang dikatakan dalam tuturan seseorang bisa memberikan kontribusi pada simpulan makna penutur dalam tuturan yang lain, wacana bisa memperlihatkan suatu rangkaian simpulan

berdasarkan pada hubungan yang timbul dari pelaksanaan beberapa maksim.

Analisis percakapan mulai dengan pencarian cara-cara untuk menemukan kebiasaan-kebiasaan, kegiatan setiap hari untuk membangun suatu makna sosial dan realitas personal. Fokus utama analisis percakapan adalah cara bahasa yang dibentuk oleh konteks, dan pada giliran cara bahasa membentuk konteks. Konteks di atas merupakan fokus analisis percakapan, yang secara empiris hanya bisa dibuktikan melalui tindak tutur atau perilaku. Demikian juga, simpulan tentang struktur bahasa (tekstual), tentang maksud penutur, tentang hubungan lintas tuturan, harus didasarkan pada tindak tutur yang aktual jadi analisis percakapan akhirnya menawarkan objek unsur-unsur analisis yang sangat tertutup dari piranti khusus atau struktur dalam konstruksi percakapan. Dengan demikian, bahasa dalam bentuk asli dan fungsi primitifnya pada dasarnya memiliki ciri pragmatis, yaitu sebagai sebuah cara dari perilaku manusia, sebagai sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan manusia yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk mengetahui fungsi bahasa dapat diikuti pandangan para pakar berikut.

a. Fungsi bahasa menurut Karl Bahler (1918)

Menurut Organon (2000:54) tanda bahasa merupakan lambang (*symbol*) karena tanda tersebut mengacu pada objek dan berbagai keadaan (*objects and states of affairs*). Tanda bahasa merupakan gejala (*symptom*) karena tanda tersebut mengacu kepada sesuatu tentang pengirim atau digunakan oleh pengirim untuk mengungkapkan perasaannya (*inner states*). Tanda bahasa juga merupakan sinyal (*signal*) karena memiliki daya tarik kepada pendengar atau penerima (Bahler, Karl, 1990:39). Dalam hal ini tanda bahasa berfungsi mengarahkan perasaan dan perilaku pendengar seperti tanda komunikatif lainnya. Pendengar harus menafsirkan atau memberikan reaksi terhadap tanda bahasa tersebut. Dengan demikian, berdasarkan teori tanda bahasa di dalam model Organon Buhler, fungsi bahasa dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- (1) Fungsi ekspresif, yang didasarkan pada bahasa sebagai gejala dan yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan penutur.

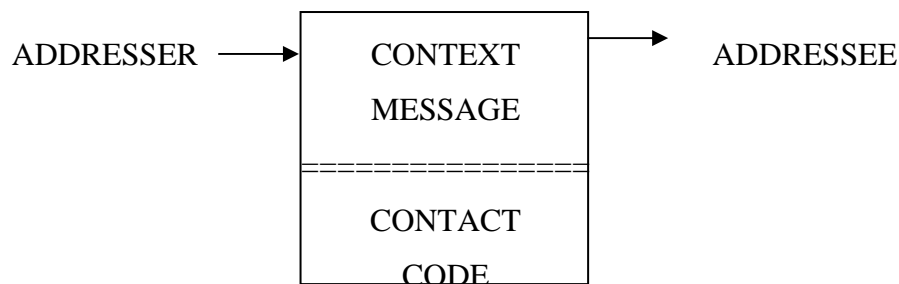
- (2) Fungsi apelatif, yang didasarkan pada bahasa sebagai sinyal yang memiliki daya tarik untuk mengarahkan perasaan dan perilaku penutur.
- (3) Fungsi representatif, yang didasarkan pada bahasa sebagai lambang yang dapat digunakan untuk membicarakan objek dan berbagai keadaan.

Kaitan antara teori Karl Buhler dan masalah pragmatik dijelaskan oleh Renkema (1993:65). Ujaran yang dibuat oleh penutur dapat dipahami secara sama atau berbeda, oleh petutur atau gejala tidak selalu sama dengan sinyal. Jika acuan penutur atas suatu objek dipahami secara sama atau tepat oleh petutur, komunikasi dapat berjalan lancar. Namun, jika pemahaman petutur atas objek yang diacu oleh penutur berbeda, akan terjadi kesenjangan komunikasi, sehingga terjadi masalah pragmatik. Suatu ujaran atau tindak tutur dapat memiliki lebih dari satu makna yang ada di balik ujaran tersebut, atau yang dikenal dengan istilah implikatur, misalnya tindak tutur sebagai berikut "saya akan datang ke sana naik motor trail nanti sore". Ujaran di atas mungkin mempunyai makna menunjukkan kebanggaan (atau fungsi ekspresif), menyuruh motor dipersiapkan (atau fungsi apelatif) atau semata-mata memberitahu bahwa dia akan datang naik motor, bukan mobil (atau fungsi representatif). Maka sebenarnya yang dimaksud dalam ujaran tersebut sepenuhnya bergantung kepada konteks situasi ujaran tersebut dan pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur (Jumanto, 2007:34).

b. Fungsi Bahasa menurut Jakobson (1960)

Menurut Jakobson (1960) bahasa harus diteliti berdasarkan berbagai fungsi yang ada untuk menetapkan fungsi yang ada dalam bahasa diperlukan penelitian yang mendalam tentang faktor yang ada di dalam peristiwa tuturan dari tindak komunikasi-verbal Jakobson (1960:353) mengajukan skema tentang faktor di dalam komunikasi verbal seperti di bawah ini.

commit to user



Gambar 2.-1. faktor yang ada di dalam komunikasi verbal (dalam Jumanto, 2007:34, ditukil Jakobson, 1960:353)

Di dalam skema tersebut, dijelaskan bahwa pengirim pesan (ADDRESSER) mengirimkan pesan (MESSAGE) kepada penerima pesan (ADDRESSEE) agar pesan dapat dioperasikan pesan memerlukan konteks (CONTEXT) yang diacu, yang diketahui oleh penerima pesan, baik yang bersifat verbal maupun nonverbal, kode (kode), yang sepenuhnya atau sebagian diketahui bersama oleh pengirim pesan dan penerima pesan (dalam bidang komunikasi sering disebut *encoder* dan *decoder* dari pesan) dan juga kontak (CONTACT), yaitu saluran fisik (*physical channel*) dan hubungan psikologis antara pengirim pesan dan penerima pesan, yang memungkinkan keduanya memulai dan mempertahankan komunikasi. Masing-masing dari enam faktor tersebut menentukan fungsi bahasa yang berbeda, tetapi hampir tidak mungkin ada pesan verbal yang hanya mengungkapkan satu fungsi bahasa (Jakobson, 1960:353).

Lebih lanjut Jakobson menjelaskan bahwa penekanan yang diarahkan pada acuan (*referent*) atau orientasi terhadap konteks merupakan fungsi utama dari berbagai pesan yang disebut fungsi referensial, yang bersifat denotatif ataupun kognitif. Fungsi emotif (*emotive*) atau fungsi ekspresif memberikan penekanan pada pengirim pesan dan merupakan ungkapan langsung dari sikap pembicara tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Fungsi ini menurut Jumanto (2006:43) cenderung menghasilkan kesan emosi tertentu. Lebih lanjut menurut Jumanto fungsi emotif murni dari bahasa ada di dalam interjeksi, misalnya ungkapan orang yang sedang

marah, memiliki sikap ironis atau menyombongkan diri. Orientasi terhadap penerima pesan menghasilkan fungsi konatif) dari bahasa. Fungsi ini menurut Jumanto ada di dalam kalimat imperatif, misalnya "*drunk*". Sementara itu, ada pesan-pesan yang memiliki fungsi utama untuk memulai, mempertahankan atau memutuskan komunikasi, untuk memastikan berfungsinya saluran komunikasi (misalnya: "*Hello, do you hear me?*") dan untuk menarik perhatian lawan bicara (*interlocutor*) atau menjaga agar perhatiannya tidak terputus (misalnya: "*are you listening?, Lend me your ears!*"). Kesemuanya itu menurut Jumanto yang lebih diutamakan di sini sebenarnya kontak yang menghasilkan fungsi fatis dari bahasa.

e. Fungsi Bahasa menurut Haliday (1978)

Haliday (1978) melihat bahasa sebagai suatu sistem semiotik sosial dan membagi tiga fungsi utama bahasa yaitu ideasional, interpersonal dan tekstual. Ketiga fungsi tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Richards et al (1985:116) sebagai berikut.

- (1) Fungsi ideasional, yang digunakan untuk mengorganisasi pengalaman penutur atau penulis tentang dunia nyata atau imajiner, misalnya bahasa yang mengacu kepada orang, benda, tindakan, peristiwa, kenyataan dan seandainya baik yang nyata maupun yang merupakan hasil imajinasi.
- (2) Fungsi interpersonal, yang digunakan untuk menunjukan, memantapkan atau mempertahankan hubungan sosial antara anggota masyarakat. Fungsi ini antara lain meliputi bentuk sapaan, fungsi ujaran modalitas dan sebagainya.
- (3) Fungsi tekstual, yang digunakan untuk membuat teks tertulis atau lisan yang baik dan koheren dengan situasi tertentu yang diacu oleh teks tersebut.

2.2.4.2 Pengertian Teks dan Konteks

Pengertian objektivitas teks dan konteks telah menjadi premis utama perkembangan "*New Criticism*". Sejumlah kritikus tanggapan

pembaca yang terkemuka, seperti Stanley Fish, Norman Holland dan sejumlah kritikus lainnya, tidak hanya mengagungkan peran dan pengalaman pembaca, tetapi juga memproklamasikan kesadaran subjektif menjadi satu-satunya pelaku yang membangun teks itu sendiri. Menurut Jumanto, istilah teks dan konteks sangat erat terkait dengan penelitian ini, sehingga hakikat teks dan konteks perlu dibahas di sini. Hakikat teks di sini (dalam Jumanto, 2007:27) diambil dari Halliday dan Hasan (1976), Leech (1983), Cook (1989), Renkema (1993), Yule (1996), Mey (2001) dan Hoed (2003). Sementara itu, hakikat konteks juga diambil dari, Halliday dan Hasan (1976) Van Dijk (1977), Richards et.al (1992), Renkema (1993) dan Mey (2001).

(1) Teks

Menurut "*moto*" yang mengarahkan para "kritikus baru" bahwa setiap teks adalah sebuah fakta objektif dalam "*kemenjadiannya*". Selanjutnya diasumsikan bahwa objektivitas tekstual dapat dirusak atau didistorsi hanya melalui prasangka-prasangka subjektif pembaca. Semua itu tentu dibutuhkan agar pemahaman yang tak terdistorsikan merupakan kemampuan kita untuk mendekati teks dengan penglihatan tanpa purbasangka dan untuk mengamati teks itu dalam objektivitas sejatinya. Untuk itu, berikut ini perlu dijelaskan pengertian teks. Pengertian teks dalam Jumanto (2007:27) Istilah "teks" dijelaskan oleh Carter et. al. (1997:166) pada awalnya berarti "sesuatu yang ditenun" (*something woven*), dari bahasa Latin: *texere*, *textum*-artinya menenun. Hal ini dapat dilihat hubungan yang terjadi antara teks (*text*), tekstil (*textile*- "dapat ditenun") dan tekstur (*texture*-memiliki kualitas sebagai kain tenunan).

Menurut Halliday dan Hasan (dalam Jumanto, 2006:22) teks hasil "diskusi" dari kelompok/komisi adalah unit bahasa dalam penggunaan, bukan unit gramatikal, seperti halnya klausa atau kalimat, jadi teks tidak tergantung pada ukurannya. Dengan demikian, teks paling tepat dianggap sebagai sebuah unit semantik, yaitu unit

yang berisi makna, bukan berisi bentuk. Teks dapat berbentuk lisan atau tulisan, prosa atau puisi, dialog atau monolog bahkan hasil diskusi. Bahkan teks dapat juga diartikan sebagai sebuah teriakan atau meminta pertolongan.

Pengamat lain, Van Dijk (1977:3) berpendapat bahwa teks merupakan unit yang lebih besar dan harus merupakan rekonstruksi dari ujaran-ujaran. Sementara Leech (1983:100) berpandangan bahasa teks merupakan konstruksi hasil penggunaan sintaksis dan fonologi bahasa secara bermakna. Pendapat lain tentang teks dikemukakan oleh Richards et. al. (1992:378), yaitu teks adalah potongan dari bahasa lisan maupun tulisan, yang maknanya dapat dipertimbangkan dari sudut pandang struktur ataupun fungsinya misalnya peringatan, instruksi, atau melakukan transaksi. Teks juga dapat berupa bagian-bagian dari bahasa yang dikaji secara formal saja (Cook, 1989:14). Crystal (1992) dalam Nunan (1993:6), mendefinisikan teks sebagai potongan wacana lisan, tulisan atau bertanda yang terjadi secara alami, yang diidentifikasi untuk tujuan analisis. Nunan (1993:6) mendefinisikan teks sebagai istilah yang mengacu ke sembarang data tertulis tentang peristiwa komunikatif. Peristiwa komunikasi dapat mencakup bahasa lisan (misalnya khotbah, percakapan santai atau hasil pembahasan draf perencanaan dan sebagainya) atau bahasa tulisan (misalnya, puisi, iklan surat kabar, poster dinding, daftar belanja atau sebuah novel).

Renkema (dalam Jumanto, 2006:23) mengkaji teks sebagai untaian kalimat atau ujaran yang harus memenuhi tujuh kriteria tekstualitas. Tujuh kriteria tekstualitas menurut Renkema tersebut adalah kohesi, koherensi, intensionalitas, akseptabilitas, bersifat informatif, situasional dan intertekstualitas. Sementara itu, Mey (2001:190) mengkaji teks sebagai bagian dari wacana. Teks adalah bagian dari wacana dan oleh wacana teks diikat dengan konteks.

Dari berbagai pendapat tentang teks di atas, dapat disarikan

hakikat teks seperti berikut.

- 1) Teks adalah unit bahasa (verbal) hasil penggunaan sintaksis dan fonologi, tentang peristiwa komunikatif tertentu atau potongan wacana untuk tujuan analisis.
 - 2) Teks dapat berbentuk lisan atau tulisan
 - 3) Teks memiliki makna lebih dari sekedar untaian kalimat atau ujaran, dan bentuk teks dapat sangat sederhana; misalnya tanda peringatan danger, sehingga diskusi, pembahasan draf, seminar sepanjang hari atau sebentar.
 - 4) Teks sebagai bagian dari wacana, terikat pada konteks (situasi)
 - 5) Teks dapat berupa pesan budaya dan atau pesan verbal.
- (2) **Konteks**

Pengertian konteks masih ada beberapa pakar yang menafsirkan secara sempit, sebab konteks linguistik terdiri atas pernyataan tunggal segera sebelum masing-masing permintaan yang taksa dan kalimat aktif atau pasif yang dapat dibalik susunannya. Dalam kajian-kajian lainnya, para peneliti menafsirkan "konteks" secara lebih luas (Louse Cummings, 2007:364). Banyak para pakar Fromm dan Holland (1989) menggunakan pengertian konteks diberikan oleh gambar yang digunakan untuk menghalangi respons para subjek terhadap pertanyaan-pertanyaan terbuka dan menuntut penjelasan dan uraian. Tampaknya gagasan-gagasan yang sangat berbeda tentang konteks telah diselidiki oleh berbagai kajian "linguistik klinis". Namun, secara umum istilah konteks seringkali digunakan untuk mengacu pada pemahaman antara penutur dan mitra tutur tentang pengetahuan, pengalaman atau persoalan yang dipraanggapkan, situasi, waktu, tempat dan peristiwa. Selain itu, konteks juga dapat mengacu pada sarana dalam mengkomunikasikan pesan, baik secara perorangan maupun kelompok, melalui telepon, surat ketikan, kartu pos dan sebagainya (Dwi Purnanto, 2006:56). Dengan demikian, konteks tidak hanya mengacu pada ungkapan

secara verbal sebagai konteks lingual (*context*), tetapi juga mengacu pada beberapa hal yang ada di luar bahasa sebagai konteks non-lingual (*context*).

Konteks yang dijelaskan oleh Halliday dan Hasan (1976:21-23) sejalan dengan konsep yang diformulasikan oleh Malinowski pada tahun 1923 dan merupakan pengembangan dari konsep Ogden dan Richards "*The Meaning of Meaning*" yang telah dikembangkan oleh Firth (1968). Malinowski memperkenalkan dua konsep tentang konteks, yaitu konteks situasi dan konteks budaya. Konteks situasi ini banyak dikembangkan oleh para *linguist*, dan yang paling terkenal adalah Hymes yang mengaitkan konteks situasi dari Malinowski dengan situasi tuturan. Konteks tuturan model Hymes ini mencakupi delapan komponen, yaitu: bentuk dan isi teks (*form and content of text*), latar (*setting*), partisipan (*participants*), tujuan (*ends*) yang terdiri dari keinginan dan efek, kunci (*key*), medium, genre dan norma interaksi (*genre and interactional norms*). Nantinya model konteks situasi dari Hymes lebih dikenal dengan akronim *speaking*.

Konsep Malinowski yang lain tentang konteks, yaitu konteks budaya, dijelaskan oleh Halliday dan Hasan sebagai peristiwa akrab dalam kehidupan seorang anak dengan latar belakang sosiokultural tertentu. Kemudian Van Dijk (1977:191) membicarakan konteks dengan acuan ke situasi interaksi tuturan dan konteks sebagai suatu struktur yang memiliki "*property*" konteks tertentu. Properti konteks yang pertama adalah sifat konteks yang dinamis. Konteks tidak hanya satu kenyataan dunia (*world-state*) yang mungkin terjadi, tetapi merupakan serangkaian kenyataan dunia. Situasi atau kenyataan dunia tersebut tidak tetap sama, tapi senantiasa berubah. Dengan demikian, konteks merupakan rangkaian peristiwa (*course of event*) yang terdiri atas kenyataan inisial, kenyataan intermedier dan kenyataan final. Kenyataan, situasi, atau peristiwa dunia yang mungkin terjadi tersebut terdiri dari peristiwa, *commit to user* kenyataan atau konteks aktual. Konteks aktual

adalah periode waktu dan tempat terjadinya aktivitas bersama antara penutur dan petutur dan yang memenuhi persyaratan di sini dan sekarang secara logis, fisik dan kognitif.

Properti konteks yang kedua menurut Van Dijk adalah relasi dan persepsi yang terjadi antara penutur dan petutur. Relasi misalnya istilah ujaran, memerlukan objek yaitu penutur dan petutur yang merupakan agen potensial dan pasien potensial, yang kemudian menjadi partisipasi aktual. Partisipasi aktual ini diseleksi dari sekelompok orang berdasar properti karakteristik mereka, misalnya kegiatan tertentu dalam konteks aktual. Dalam hal ini menurut Jumanto (2003:27), ada dua fungsi penting yaitu fungsi berbicara dan fungsi pendengar, yang masing-masing menjelaskan satu kenyataan yang ada dalam konteks partisipan yang sedang berbicara dan partisipan yang sedang mendengarkan. Nilai dari fungsi ini berbeda dalam setiap kenyataan konteks yang secara tradisional diistilahkan pembicara dan pendengar. Pembicara adalah partisipan yang menjalankan fungsi berbicara dan pendengar.

Sementara itu Leech (1983:13-15) menjelaskan konteks (ujaran) sebagai salah satu aspek situasi tuturan, di samping pengirim/penerima, tujuan, tindak ilokusioner, ujaran sebagai basil dari tindak verbal serta waktu dan tempat ujaran tersebut. Lebih lanjut Leech menjelaskan konteks sebagai pengetahuan latar apa saja yang dianggap diketahui bersama oleh penutur dan petutur dan yang membantu petutur menginterpretasikan maksud penutur dalam ujaran tertentu.

Dari sisi lain pandangan Richards et. al. (dalam Jumanto, 2007:29) menjelaskan konteks sebagai yang ada sebelumnya dan atau sesudah kata, frase atau bahkan ujaran lebih panjang atau teks, yang sering membantu pemahaman atas makna dari frase dan sebagainya. Konteks mungkin berupa situasi sosial yang lebih luas yang digunakan untuk suatu bentuk linguistik. Konteks terkait dengan

makna kontekstual yaitu makna suatu bentuk linguistik di dalam konteks atau makna suatu kalimat di dalam suatu paragraf tertentu.

Selanjutnya menurut Yacob L. Mey (2001:112) konteks dalam kaitannya dengan pragmatik, yaitu kajian tentang penggunaan bahasa di dalam konteks. Mey menjelaskan sekilas bahwa konteks sering dilibatkan untuk menganalisis kalimat yang ambigu dan digunakan untuk memahami semua faktor yang berperan dalam memproduksi dan memahami tuturan. Mey mendefinisikan konteks dan membahasnya dari sudut pandang yang berbeda. Konteks didefinisikan sebagai sebuah konsep yang dinamis, bukan statis, yang harus dipahami sebagai lingkungan yang yang senantiasa berubah dalam arti yang luas yang memungkinkan para partisipan dalam proses komunikasi berinteraksi dan ekspresi linguistik yang digunakan dalam interaksi mereka dapat dipahami dengan baik (2001:39). Dengan demikian, tampaknya menurut Mey konteks berorientasi pada pengguna (*user-oriented*), sehingga dapat dianggap berbeda dari satu pengguna ke pengguna lainnya, dari satu kelompok pengguna (masyarakat) ke kelompok lainnya, bahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Konteks tidak sekadar referensi, tetapi merupakan tindakan. Konteks adalah tentang pemahaman dari segala hal, dan juga yang memberi ujaran-ujaran makna pragmatik yang sebenarnya dan yang menjadikan ujaran-ujaran tersebut tindak-tanduk pragmatik yang sebenarnya. Konteks sangat penting karena tidak hanya memberikan nilai yang tepat terhadap referensi dan implikatur, tetapi juga menjelaskan masalah pragmatik lainnya seperti tindak pragmatik dan praanggapan. Oleh karena itulah, konteks selalu digunakan oleh para pengguna bahasa dalam berinteraksi, tanpa mempermasalahkan fasilitas (kaidah-kaidah) atau pun konvensi yang mengikat suatu bahasa.

Dari berbagai pendapat, pandangan dan kajian dari berbagai pakar di atas, dapat disarikan hakikat konteks seperti di bawah ini:

- 1) Konteks adalah sebuah konsep yang dinamis, bukan statis, yang harus dipahami sebagai lingkungan atau serangkaian kenyataan dunia yang senantiasa berubah terus, dalam arti yang luas dan diketahui bersama oleh para partisipan yang memungkinkan para partisipan tersebut berinteraksi dalam proses komunikasi, dan ekspresi linguistik yang digunakan dalam interaksi mereka dapat dipahami dengan baik sesuai dengan latar belakang sosiokultural tertentu.
- 2) Konteks mencakupi referensi tekstual dan referensi situasional referensi situasional lebih dahulu terjadi daripada referensi tekstual.
- 3) Konteks digunakan untuk memahami semua faktor yang berperan, dalam memproduksi dan memahami tuturan dan berorientasi pada pengguna, sehingga penggunaanya dapat berbeda antar pengguna, antarkelompok pengguna bahkan antarbahasa pengguna.

2.2.5 Teori tindak tutur

Teori tindak tutur pertama kali diungkapkan oleh Austin (1956), seorang ahli filsafat senior dari negara Inggris, yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Searle (1966) lebih meluas. Menurut Searle, bahwa pada setiap praktik penggunaan bahasa setidaknya bisa dikelompokkan menjadi tiga macam tindak tutur, yaitu: tindak lokusi (*locutionary acts*), tindak ilokusi (*illocutionary acts*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary acts*) Searle (1969:23-24; Wijana, 1996:17-19). Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur dengan kata, frase, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung di dalamnya. Tindak tutur semacam ini dapat disebut sebagai *the act of saying something*, karena itu tidak dipermasalahkan maksud dan fungsi tuturan yang disampaikan penutur. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengimplikasikan maksud dan fungsi tertentu. Oleh sebab itu, tindak tutur ini disebut *the act of doing something*. Tindak perlokusi adalah tindak

menciptakan pengaruh (efek) pada mitra tutur (*the act of affecting someone*). Ketiga tindak tutur tersebut merupakan salah satu teori yang akan digunakan sebagai acuan teori implikatur. Hal ini sangat penting dalam memahami aspek-aspek pragmatik dari maksud penutur (*the speakers meaning*) yang terdapat di balik tuturannya. Bahkan di dalam membahas draf perda di kalangan dewan (para politisi) banyak tuturan yang tidak selamanya diungkapkan secara eksplisit, banyak juga bahkan cukup dominan maksud penutur diimplisitkan terhadap aspek-aspek politik atau dipolitisasi, sehingga peneliti harus sangat hati-hati (kesulitan) untuk memahami maksud tuturan atau implikturnya.

Sebuah tuturan yang diutarakan seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh (*perlocutionary effect*) atau efek bagi pendengarnya. Efek yang timbul ini bisa sengaja maupun tidak sengaja. Berdasarkan uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa tindak lokusi mendasari tindak ilokusi, tindak ilokusi mendasari tindak perlokusi. Selanjutnya tindak perlokusi sebagai final maksud suatu ujaran di dalam komunikasi bahasa. Dalam tindak lokusi bentuk-bentuk kebahasaan sebagai alat untuk mengungkapkan informasi secara eksplisit. Dalam tindak ilokusi dan perlokusi bentuk-bentuk kebahasaan sebagai simbol untuk mengungkapkan maksud yang sebenarnya. Simbol itu dapat ditangkap sebagai sesuatu isyarat maksud tertentu jika wawasan budaya, kebiasaan antara pendengar dan pembicara sama.

Tindak perlokusi juga sulit dideteksi, karena harus melibatkan konteks tuturannya. Dapat ditegaskan bahwa setiap tuturan dari seorang penutur memungkinkan sekali mengandung salah satu dari lokusi, ilokusi atau perlokusi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa satu tuturan mengandung dua atau ketiga-tiganya sekaligus. Yang perlu dicermati dalam analisis pragmatik adalah meneliti/mendalami mencermati ilokusi-ilokusi yang terdapat pada tindak tutur dari penutur yang hendak dikomunikasikan pada mitra tutur. Untuk mencari implikatur atau makna di balik ujaran yang tersirat bukan sekadar makna yang tersurat dalam

ujaran dimaksud.

2.2.5.1 Jenis Tindak Tutur

Dalam kaitan dengan tindak tutur tersebut Searle (dalam Kunjana; 2000:33) merinci tindak tutur ilokusi ke dalam macam bentuk tuturan yaitu:

- 1) **Asertif**, yakni bentuk tutur yang mengikat penutur pada kebenaran preposisi yang diungkapkan misalnya, menyarankan, membuat, mengeluh dan menyatakan serta menuntut.
- 2) **Direktif**, yakni tuturan untuk mempengaruhi agar mitra tutur melakukan tindakan seperti : memesan, memerintah, memohon, menasehati dan merekomendasikan.
- 3) **Ekspresif**, sebagai tuturan yang dimaksudkan untuk menyatakan sikap psikologis penutur, misalnya: berterima kasih, meminta maaf, memberi maaf, memberi ucapan selamat, menyalahkan, memuji dan turut berbelasungkawa.
- 4) **Komisif**, yakni tuturan yang dimaksudkan untuk menyatakan janji atau penawaran, misalnya: berjanji, bersumpah dan menawarkan sesuatu.
- 5) **Deklaratif**, yakni tuturan yang berusaha mengaitkan antara kebenaran isi tuturan dan kenyataannya, misalnya: berpasrah, memecat, memberi nama, mengangkat, mengucilkan dan menghukum, meyakinkan, mendeklarasikan, memutuskan, melarang, mengijinkan dan memberi nama.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kreidler (1998:183-194) mengkategorisasikan tindak tutur menjadi 7 jenis tindak tutur sebagai berikut.

1. Tindak tutur asertif

Di sini penutur menggunakan bahasa untuk menyampaikan yang mereka percayai dan yang mereka ketahui, tindak tutur asertif selalu berkaitan dengan fakta, pengetahuan, data yang ada atau yang telah ada, yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Tindak tutur

asertif bersifat menginformasikan, benar atau salah dan secara umum mereka dapat dibenarkan atau disalahkan tidak hanya pada waktu tindak tutur tersebut keluar atau oleh mereka yang mendengarnya.

2. Tindak tutur performatif

Tindak tutur performatif adalah tuturan yang pengutaraannya difungsikan atau digunakan untuk melakukan tindakan, misalnya tindakan mohon maaf berjanji, bertaruh, mengumumkan dan meresmikan. Tindak tutur jenis ini sering kita temui pada ucapan-ucapan pernikahan, pemecatan kerja bahkan jenis tindak tutur ini banyak diungkapkan pada setting formal dan berkaitan dengan kepegawaian.

3. Tindak tutur verdiktif

Tindak tutur verdiktif adalah tindak tutur yang berorientasi pada perbuatan atau sudah terjadi yang telah berlalu atau bersifat retrospektif. Tindak tutur retrospeksi adalah jika penutur menilai sikap yang telah dilakukan mitra tutur di masa lalu. Sikap itu bisa ditanggapi secara positif dengan mengucapkan "Selamat untuk", bangga... untuk" dan lain-lain, "bersyukur..... untuk", terima kasihuntuk". Adapun bentuk penilaian yang bersifat positif lainnya seperti bentuk menghargai dan berbelasungkawa.

4. Tindak tutur ekspresif

Jika tindak tutur verdiktif tentang yang telah dilakukan mitra tutur sebelumnya, maka tindak tutur ekspresif menilai atau mengevaluasi dari tindakan sebelumnya atau kegagalan dalam tindakan tersebut dari penutur atau mungkin hasil bertindak atau kegagalan sekarang. Dengan demikian, intinya tindak tutur ekspresif ini "menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur". Tindak tutur ini mencerminkan pernyataan-pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan

atau kesengsaraan sebagai contoh: dari usulan-usulan program tahun lalu tidak banyak yang dibiayai, sebab tidak sesuai dengan isu-isu prioritas tahun lalu, sekarang harus kita pikirkan nantinya.

5. Tindak direktif

Tindak tutur direktif kadang-kadang disebut juga tindak tutur irnpositif adalah tindak tutur di mana penutur menginginkan mitra tutur melakukan suatu tindakan atau mengulangi tindakan. Dengan kata lain, direktif ialah jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi perintah, pemesanan, permohonan, pemberian saran, menagih, menyuruh dan meminta serta memaksa dan mengajak. Dalam aplikasinya, tindak tutur direktif ini dapat berbentuk : (1) kalimat perintah (imperatif), (2) kalimat berita (deklaratif) dan (3) kalimat tanya (interogatif). Sebagai contoh kalimat perintah:

1. Buatlah usulan program yang realitas.
2. Buatalah usulan program yang sesuai prioritas pemda Karanganyar.

6. Tindak tutur komisif

Tindak tutur komisif merupakan bentuk tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan janji-janji, ikrar, pengandaian, ancaman dan sumpah. Dengan kata lain tindak tutur ini berfungsi mengingatkan dirinya sendiri terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Tindak tutur ini dapat berupa ; janji, ancaman, penolakan dan ikrar sebagai contoh :

- 1) Buatlah program yang terkait pengentasan kemiskinan nanti saya akan membantu di tingkat pembahasan di dewan.
- 2) Saya akan membetulkannya lain kali,
(*I am going to get it right next time*)

7. Tindak tutur fatis

Tindak tutur fatis merupakan bentuk tindak tutur yang berfungsi untuk menjalin hubungan sosial. Tujuannya adalah untuk membangun solidaritas antar anggota-anggota dari lingkungannya. Menurut Jakobson (1960), fungsi bahasa fatis adalah fungsi bahasa yang memberikan penekanan pada kontak yang terjadi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Istilah kontak di sini yaitu komunikasi yang tidak dimaksudkan untuk mencari atau mengirim informasi, tetapi komunikasi yang memiliki fungsi sosial untuk memantapkan atau mempertahankan kontak sosial. Menurut Jumanto (2003:89), fungsi komunikasi fatis adalah:

- (1) Untuk memecahkan kesenyapan, menghindari kesenyapan atau keharusan untuk mengatakan sesuatu.
- (2) Untuk memulai percakapan atau untuk membuka kontak.
- (3) Untuk melakukan basa-basi atau untuk melakukan percakapan yang secara relatif tidak terpusat (Leech, 1983)
- (4) Untuk melakukan gosip.
- (5) Untuk menjaga agar percakapan tetap berlangsung.
- (6) Untuk mengungkapkan solidaritas.
- (7) Untuk menciptakan harmoni.
- (8) Untuk menciptakan perasaan nyaman.
- (9) Untuk mengungkapkan empati.
- (10) Untuk mengungkapkan persahabatan.
- (11) Untuk mengungkapkan rasa hormat/penghormatan.

Sebagai contoh tuturan fatis:

- (1) I see you soon!
- (2) *nice to meet you*
- (3) *nice to see you*

Sistem klasifikasi umum mencantumkan 5 jenis fungsi umum yang ditunjukkan oleh tindak tutur menurut Yule (1996:92), yaitu :

1) Deklarasi

Deklarasi ialah tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal (status, keadaan dan sebagainya) yang baru, misalnya: meyakinkan, mendeklarasikan, menekan, memutuskan, melarang, memecat dan menjatuhkan hukuman.

2) Representatif

Jenis tuturan ini yang menyatakan yang diyakini penutur kasus atau bukan pernyataan, suatu fakta, penegasan, simpulan dan pendeskripsian.

Contoh : 1. Bumi itu datar

2. Setiap tahun menyusun program tahunan

3) Ekspresif

Jenis tuturan ekspresif yaitu tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur ini mencerminkan pernyataan-pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan, kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan dan kesengsaraan. Tindak tutur ini mungkin disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan oleh penutur atau pendengar tetapi semuanya menyangkut pengalaman penutur. Sebagai contoh: Usulan ini sudah kita usulkan 2 tahun yang lalu, sampai sekarang belum ada hasilnya.

4. Direktif

Jenis tuturan direktif yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu, biasanya yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi: perintah, pemesanan, permohonan dan pemberian saran. Sebagai contoh: Mohon usulan tentang rehap aliran irigasi primer yang telah rusak diperhatikan untuk tahun anggaran 2008 ini. Penggunaan

tuturan direktif dapat berupa kalimat positif atau dan negatif.

5. Komisif

Jenis tindak tutur ini yang dipahami oleh penutur untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Tindak tutur ini menyatakan yang dimaksudkan oleh penutur. Tindak tutur ini dapat berupa janji, ancaman, penolakan, ikrar. Sebagai contoh: Usulan kami tentang pengentasan penduduk miskin kalau sampai tidak diterima berarti pemda tidak memikirkan masyarakat rendah.

Dari keempat pakar yaitu Austin, Scarle, Kreidler dan Yule tentang teori fungsi tindak tutur tersebut dapat diverifikasi sebagai berikut. Teori tindak tutur Austin merupakan dasar utama yang melandasi teori-teori fungsi tindak tutur yang muncul sesudahnya, karena Austin merupakan orang pertama kali yang mengemukakan teori tindak tutur yang membaginya menjadi tiga bentuk yaitu : lokusi, ilokusi dan perlokusi.

Kelima fungsi umum tindak tutur beserta sifat-sifatnya seperti berikut ini.

FUNGSI UMUM TINDAK TUTUR

No.	Tipe tindak tutur	Arab penyesuaian	P = Penutur X = Situasi
1.	Deklarasi	Kata mengubah dunia	P menyebabkan X
2.	Representatif	Kata disesuaikan dengan dunia	P meyakini X
3.	Ekspresif	Kata disesuaikan dengan dunia	P merasakan X
4.	Direktif	Dunia disesuaikan dengan kata	P menginginkan X
5.	Komisif	Dunia disesuaikan dengan kata	P memaksudkan X

Keterangan: Fungsi umum tindak tutur (Scarle J.R. 1969)

Pendekatan yang berbeda terhadap pemilihan tipe-tipe tindak tutur ini dapat dibuat berdasarkan strukturnya. Apabila ada hubungan langsung antara struktur dengan fungsi, maka terdapat suatu **tindak tutur langsung**, sedangkan apabila ada hubungan tidak langsung antara struktur dengan fungsi maka terdapat suatu **tindak tutur tidak langsung**. Sebagai contoh : bentuk deklaratif yang digunakan untuk membuat suatu permohonan disebut tindak tutur tidak langsung "di luar dingin (*It is cold outside*)". Contoh tuturan langsungnya "dengan ini saya mengatakan kepada anda tentang cuaca". Bila wujudnya suatu perintah/ permohonan sebagai tindak tutur tidak langsung yaitu: "dengan ini saya memohon agar anda menutup pintu".

Dalam perkembangannya teori tindak tutur di tangan para pakar diklasifikasikan fungsinya yang secara garis besarnya memiliki persamaan dan perbedaan.

- 1) Persamaan istilah/pengertian, bentuk fungsi tindak tutur menurut Searle, Kreidler, dan Yule meliputi tindak tutur direktif, ekspresif dan komisif. Kemudian Searle dan Kreidler juga terdapat persamaannya pada tindak tutur asertif, sedangkan menurut pakar Searle dan Yule persamaannya ada pada tindak tutur deklarasif.
- 2) Perbedaan istilah tetapi tampaknya pengertiannya masih sama. Menurut pakar Searle dan Kreidler tentang fungsi tindak tutur asertif mempunyai persamaan pengertian dengan fungsi tindak tutur representatif menurut Yule. Di samping itu menurut Searle dan Yule, fungsi tindak tutur deklarasif mempunyai persamaan pengertian dengan fungsi tindak tutur performatif menurut Kreidler.
- 3) Perbedaan jumlah fungsi tindak tutur dapat dilihat dari banyaknya pendapat pakar yang berbeda-beda misalnya Kreidler membagi 7 bentuk, sedangkan Searle dan Yule masing-masing mengkategorikan menjadi 5 bentuk tindak tutur. Dari pandangan

ketiga pakar mengenai teori fungsi tindak tutur dalam penelitian ini akan mengacu pendapat Kreidler, sebab teori ini sifat-sifatnya lebih spesifik, sehingga nantinya akan lebih mengakomodasi kebutuhan analisis tindak tutur yang ada hubungannya dengan Peraturan Daerah tentang RPJPD di tingkat kabupaten.

Teori-teori peneliti gunakan untuk mengkaji komponen-komponen yang terdapat pada proses pembahasan RPJPD baik dari segi tindak tutur maupun paralinguistik secara tajam, menyeluruh dan rinci dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah, terutama yang ada hubungannya dengan proses pembahasan draf Perda RPJPD dengan bahasa verbal baik yang ada di tingkat desa maupun tingkat kabupaten dan Propinsi Jawa Tengah. Adapun elemen-elemennya dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penutur meliputi nara sumber dari kabupaten maupun tokoh-tokoh masyarakat baik yang formal maupun yang nonformal.
2. Tuturan (usulan pembangunan) meliputi: kebijakan, program pembangunan dan kegiatan pembangunan yang menjadi usulan prioritas dan program jangka panjang
3. Mitra tutur meliputi: pejabat tingkat desa, kecamatan dan pejabat kabupaten atau propinsi termasuk DPRD setempat.

2.2.5.2 Teori Strategi Bertutur

Dari berbagai hasil kajian menunjukan bahwa strategi bertutur itu tidak asal bunyi saja, tetapi bertutur yang santun memerlukan strategi, terutama dalam rangka menjaga muka mitra tutur. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam bertutur menurut Gunarwan (2005:4-5) antara lain: (1) bagaimana perbedaan status atau kekuasaan di antara penutur dan mitra tutur, (2) bagaimana jarak sosial diantara penutur dan mitra tutur, (3) bagaimana bobot relatif

pengungkapannya di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan mempertimbangkan tingkat keterancaman potensial, menurut, Brown dan Levinson (1987:263-276) memberikan asumsi ada 5 strategi dasar bertutur yang perlu dipertimbangkan oleh penutur: Kelima dasar asumsi itu adalah: (1) bertutur secara terus menerus tanpa basa-basi, (2) bertutur dengan terus terang plus kesantunan positif, (3) bertutur dengan terus terang plus kesantunan negatif, (4) bertutur secara samar-samar atau tidak transparan, (5) bertutur di dalam hati dalam arti penutur tidak mengujarkan maksud hatinya.

2.2.5.3 Interaksi Makna Tuturan

Di lihat dari segi interaksi maknanya, Wijana (1996:29-36) yang di kutip Harun Joko prayitno, 2009:71) membedakan tindak tutur menjadi tindak tutur literal dan tindak tutur tidak literal. Tindak tutur literal adalah tuturan yang disampaikan mengandung arti sesuai dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Sementara itu, tindak tutur tidak literal adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama dengan atau berlawanan dengan makna kata-kata yang menyusunnya.

Sementara itu, tindak tutur literal makna yang hendak dikemukakan oleh penutur sama dengan arti literal atau arti yang sebenarnya. Jadi, tuturan dibangun oleh penutur dengan makna lugas, denotatif dan tidak bermakna ganda, sehingga mudah ditafsirkan maksudnya.

Contoh: (a) Amir sekarang rajin sholat shubuh.

(b) Dia sekarang semakin tinggi ketaqwaanya.

(c) Dia sekarang bagus suaranya kalau membaca Al-Quran.

Makna yang terkandung dalam tuturan pada (a), (b), (c) tidak tuturan itu untuk menyatakan makna yang sebenarnya. Sebaliknya, suatu tindak tutur dikatakan sebagai tindak tutur tidak literal, apabila makna yang dimaksudkan berlawanan. Dengan demikian, tuturan (a),

(b), dan (c) dapat pula dinyatakan sebagai tuturan tidak literal apabila maksud yang hendak dinyatakan melalui tuturan (a) adalah "Amir sekarang sholat subuhnya terlambat", Tuturan (b) untuk menyatakan maksud "dia sekarang ketaqwaanya sudah luntur" dan tuturan (c) untuk menyatakan maksud "suara dia jelek sekali".

Pada umumnya penutur tidak menyadari bahwa tuturan yang dikemukakannya sesungguhnya dibangun dari berbagai interaksi antara teknik dan strategi bertutur. Oleh sebab itu, apabila di antara teknik dan strategi bertutur itu diinteraksikan (istilah Wijana, 1996:33) dapat dikelompokkan menjadi (a) tindak tutur langsung literal, (b) tindak tutur langsung tidak literal, (c) tindak tutur tidak langsung literal, dan (d) tindak tutur tidak langsung tidak literal.

Temuan penelitian Basuki terhadap realisasi tindak tutur itu mencerminkan bahwa dalam dunia seni pertunjukan didominasi oleh tindak tutur direktif (29), menyusul tindak tutur deklaratif (17), tindak tutur ekspresif (16), tindak tutur asertif (11) dan yang paling sedikit tindak tutur komisif (8). Persoalannya adalah meskipun hasil penelitian ini telah meyakinkan kita bahwa tindak tutur direktif sangat mendominasi seni pertunjukan ketoprak, tetapi jika dicermati pada dasarnya baru menyikapi bentuk-bentuk tindak tutur direktif itu.

Penggunaan bentuk-bentuk tindak tutur yang mengandung permohonan dari seorang Rukun Warga (RW) dalam Musrenbangda memang dapat berupa antara lain tindak tutur asertif, tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, tindak tutur ekspresif dan tindak tutur deklaratif. Bentuk tindak tutur yang mengandung permohonan dari ketua RW kepada pimpinan Musrenbangda tingkat desa pada garis besarnya hanya dikelompokkan menjadi empat subtindak tutur, yaitu: permohonan, harapan, ajakan dan permintaan (Hutomo, 2008:23).

Sementara itu, realisasi bentuk tindak tutur direktif yang digunakan oleh DPRD dalam wacana rapat pleno itu diwujudkan melaluisub tindak tutur: *commit to user* menyuruh, mengarahkan, menuntut,

menyerukan, meminta, memohon, menganjurkan, mengajak, menghimbau, mengharuskan, memberi izin, melarang, mempersilakan dan menyerahkan (Haryono, 2004:212). Identifikasi bentuk-bentuk tindak tutur direktif yang mengandung empat belas maksud sub tindak tutur itu semata-mata masih didasarkan pemarkah formal. Hal ini tampak pada analisis permintaan dari dialog Ketua RW kepada moderator MUSRENBANG yang berupa "suruhan" ditandai pemarkah bentuk "berikan" pada tuturan berikut ini" berikan program-program prioritas pada 5 tahun kedepan, sehingga kami nanti akan dapat mengusulkan program yang sesuai dengan prioritas daerah". Oleh karena itu, hakiki tindak tutur ilokusi "*the act of doing something*" dalam proses pembahasan RPJPD di sini belum bisa diungkap secara komprehensif berdasarkan pemarkah pragmatiknya.

2.2.6 Teori Tindak Tutur Direktif

Penggagas tindak tutur direktif yang pertama adalah: Austin (1962:151), Searle (1980:23), dan (Leech, 1983:106) menempatkan tindak tutur direktif sebagai salah satu aspek makro tindak tutur ilokusi.

Menurut Leech (1983:356-9) tindak tutur direktif digunakan untuk menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur. Secara sintaktik tindak tutur direktif biasanya berpolakan S verba (O) that X atau S verb O to O, dimana S sebagai subjek dan O sebagai objek (masing-masing mengacu pada penutur dan mitra tutur), dan that X merupakan klausa that yang nonindikatif, dan to Y adalah klausa infinitif. Lebih lanjut, tindak tutur ini oleh Leech disebut pula sebagai verba impositif untuk menghindari kerancuan istilah direktif ini dengan *direct and indirect illocutions*.

Lebih lanjut menurut Searle, tindak tutur (TT) direktif adalah bentuk TT yang merupakan usaha penutur agar mitra tutur melakukan sesuatu tindakan. Oleh Searle TT, ini digambarkan ke dalam bentuk TT: memerintah (*command*), menyuruh (*commit to user request*), meminta (*beg*), memohon

(*plead*), mengundang (*invited*) dan menasihati (*advise*).

Direktif pada pembagian kalimat dalam bahasa Indonesia menurut Moeliono (1992), disebut kalimat perintah atau imperatif yang kegunaannya untuk memberikan perintah. Berbeda dengan Ramlan (1987), kalimat suruh (kata lain direktif) yang berarti mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan tertentu dari orang yang diajak berbicara. Selanjutnya menurut (Keraf, 1980:85), mendefinisikan kalimat perintah (kata lain dari direktif) merupakan kalimat yang digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Sedangkan Leech memasukkan direktif kedalam istilah impositif agar tidak dikacaukan dengan ilokusi-ilokusi langsung dan tidak langsung untuk mengacu ilokusi kompetitif dalam kategori direktif ini.

Menurut Kreidler (1988:189) mengatakan bahwa tuturan direktif adalah tuturan di mana pembicara berusaha menyuruh orang yang disapa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, tuturan direktif menggunakan kata pengganti **anda** sebagai pelaku, meskipun kata tersebut tidak selalu hadir dalam setiap ucapan.

Sebagai contoh: 1. (Anda) tunggu di sini

2. Buka halaman 164

3. Jangan (kalian) melewatkan kesempatan ini untuk
berhemat.

Tuturan direktif bersifat prospektif, kita tidak mungkin menyuruh orang lain melakukan sesuatu di masa lampau. Seperti beberapa jenis tuturan lain, tuturan direktif menduga sebelumnya berbagai keadaan terkait dengan orang yang disapa dan konteks situasi.

Pada dasarnya direktif merupakan tindak tutur yang ilokusinya bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur.

Misalnya, menyuruh:

1. Jaga adikmu Ton!
2. Mama, "makan dulu dik!"
3. Cuci piringnya Nik!

Melarang, contohnya:

1. Jangan pergi!
2. Dilarang merokok!
3. Awas jalan licin!

Menyarankan, contohnya:

1. Alangkah baiknya anda datang juga.
2. Lebih tepat kamu memilih ketua komisi yang akomodatif.
3. Menurut saya, kalau mengusulkan program yang realitis.

Satu hal mendasar yang perlu dicatat dari penggolongan tindak tutur ke dalam bentuk-bentuk tuturan Searle, bahwa satu tindak tutur dapat mempunyai maksud dan fungsi yang bermacam-macam. Tindak tutur direktif literal adalah tindak tutur direktif yang maksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya.

Contohnya:

1. Kamu sekarang harus pergi Tini!
2. Silahkan duduk Bapak!

Kalimat: 1, bila diungkapkan untuk maksud menyuruh Tini segera pergi. Begitu pula kalimat: 2 di atas, bila diutarakan untuk mempersilahkan tamu seorang Bapak yang baru datang untuk duduk. Tindak tutur direktif tidak literal adalah tindak tutur direktif yang maksudnya tidak sama atau **berlawanan** dengan makna kata-kata yang menyusunnya.

Contohnya: a. Suaramu bagus, tetapi tidak usah nyanyi saja.

b. Kamu cantik juga, tetapi tidak usah jadi artis ya.

Kalimat: a, penutur memaksudkan bahwa suara mitra tuturnya tidak bagus, dengan mengatakan "tidak usah menyanyi saja". Begitu

juga kalimat: b, penutur bermaksud bahwa wajah mitra tuturnya tidak cantik, dengan mengatakan ”tidak usah jadi artis ya”.

Berdasarkan konsep dasar teoritis di atas, dapat dirunut bahwa TT direktif mengekspresikan sikap penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh mitra tutur. Tindak tutur direktif mengekspresikan sikap penutur terhadap tindakan dua hal pokok, yaitu: (1) Proposisi berupa tindakan yang akan dilakukan dan ditujukan kepada mitra tutur, dan (2) mengekspresikan maksud penutur supaya tuturan yang diekspresikan dijadikan alasan bagi mitra tutur untuk menindakkan sesuatu yang dimaksudkan dalam tuturan itu. Pemarkah bentuk-bentuk tuturan yang mengekspresikan maksud dua hal pokok itu antara lain: (1) meminta, (2) memohon, (3) menekan, (4) mengundang, (5) mengajak, (6) mendorong, (7) memerintah, (8) menghendaki, (9) mengkomando, (10) menuntut, (11) mendikte, (12) mengarahkan, (13) mengerahkan, (14) menginstruksikan, (15) mengatur, (16) termasuk melarang dan membatasi (dikutip Harun Joko Prayitno dalam Kuntjana, 2005:93:116). Deskripsi realisasi perwujudan tindak tutur direktif sebagaimana di atas menunjukkan bahwa tindak tutur direktif tidak hanya (02) menuntut (01) melakukannya sesuai dengan rencana (02). Rencana tindak tutur yang dimaksud menyangkut apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan, dan apa yang dilakukan di sini berkaitan dengan budaya lokal di antara (01) dan (02).

2.2.6.1 Konsep Tindak Tutur Direktif

Teori tindak tutur (*speech act*) pertama kali dikemukakan oleh John L. Austin, seorang filsuf berkebangsaan Inggris, pada tahun 1955 di Harvard University. Teori ini kemudian diterbitkan pada tahun 1962 dengan judul *How to Do Things With Words*. Austin (1962:98-99) menggaris bawahi pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan sesuatu, dia sebenarnya juga menindakkan sesuatu. Dia mengilustrasikan jika seseorang menyatakan “saya berjanji saya akan datang tepat waktu”,

maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak hanya mengucapkan tuturan itu tetapi juga melakukan tindakan berjanji. Pada saat seseorang menyatakan "saya minta maaf karena datang terlambat" sekaligus dia juga melakukan tindakan minta maaf.

Pandangan John Austin itu telah membawa pengaruh besar di bidang kajian linguistik. Pandangan ini kemudian telah banyak diadopsi dan dikembangkan secara aktif oleh ahli bahasa dan pengikutnya. Austinlah ahli bahasa pertama yang mengungkapkan gagasan bahwa bahasa dapat digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Austin berpendapat tiap ujaran pada dasarnya tidak hanya merupakan tindak untuk mengatakan sesuatu melainkan lebih merupakan bagian dari melakukan tindakan (cummings, 1999:8).

Berpijak dari pemikiran Austin itu, Searle (1969) mengembangkan hipotesa bahwa pada hakikatnya semua tuturan itu mengandung suatu tindakan. Jadi, tuturan-tuturan itu bukan hanya sekedar mempunyai kata kerja performatif belaka tetapi selalulah ada tindakan yang diinginkan di balik tuturan itu. Menurutny unsur terkecil dalam komunikasi adalah tindak tutur seperti menyatakan memberi perintah, menguraikan menjelaskan meminta maaf, mengucapkan selamat dan sebagainya.

Sejalan dengan pemikiran Austin dan Searle itu, dikatakan pada saat menggunakan bahasa, penutur tidak hanya mempresentasikan pikiran yang terdapat dalam benaknya (*bersifat konstatif*), tetapi juga melakukan tindakan (*bersifat performatif*). Tuturan konstatif diuji dari persyaratan kebenaran (*Felicity condition*) (Tarjana, 2006:11).

Richard (1985:265) dan Allan (1986:164) mendefinisikan tindak tutur (TT) sebagai tuturan yang menjadi unit fungsional dalam komunikasi. Dalam hal ini tuturan memiliki dua makna, yaitu makna proposisi atau makna lokusi dan makna ilokusi atau daya ilokusi. Makna proposisi merupakan dasar makna literal dari ujaran yang dibawa oleh kata-kata dan struktur tertentu yang dikandung oleh ujaran. Sementara itu, makna ilokusi merupakan efek ujaran atau tuturan pada penutur.

Mengacu pada sejumlah rumusan tuturan di atas jelaslah bahwa setiap kalimat yang dikemukakan oleh seseorang pada hakikatnya tidak semata-mata hanya mengatakan sesuatu dengan pengucapan kalimat itu. Di dalam pengucapan kalimat penutur juga “menindakkan” sesuatu, antara lain : (a) permintaan (*request*), (b) pemberian ijin (*permission*), (c) tawaran (*offers*), (d) Penerimaan akan tawaran (*acceptation of offers*). Selanjutnya, teori dan bentuk serta liku-liku tindak ujaran ini akan dibahas di subbagian tersendiri.

2.2.6.2 Bentuk dan Fungsi Tindak Tutur Direktif

Menurut Searle (1980:23) dan Leech (1983:104-107) mengklasifikasi ragam TT direktif menjadi empat tipe dasar, yaitu: (1) tindak memerintah, (2) tindak memohon, (3) tindak memberi saran, dan (4) tindak memberi izin. Dengan demikian, menurut Harun Joko Prayitno (2009:80) secara pragmatik TT direktif yang paling sering digunakan dalam TT kegiatan dinas meliputi: maksud perintah, permohonan, pemberi saran, dan pemberi izin.

Masing-masing bentuk tindak tutur direktif menurut searle dan Leech itu berdasarkan konteksnya dapat memiliki fungsi kompetitif, bertentangan, menyenangkan, dan bekerjasama. Ragam dan fungsi TT direktif itu akan bermakna jika ditempatkan pada kewenangan dan keharusan bertindak antara 01 dan 02. Kaitanya dengan TTD dalam proses perencanaan Perda RPJPD, maka tindak tutur direktif lebih banyak nuansanya pada permohonan, saran, usul baik secara langsung maupun tidak langsung dan alternatif program yang dapat dimanfaatkan oleh 01 ataupun 02. Oleh karena itu, hubungan antara tindak, fungsi, maksud dan modus tindak direktif dengan komponen tutur merupakan kesatuan integratif. Realisasi perwujudan tindak tutur direktif berhubungan dengan fungsi dan komponen tutur.

Tindak tutur direktif merupakan ungkapan program dan sikap 01 terhadap rencana/program kegiatan yang akan dilakukan untuk jangka

panjang yang harus diketahui 02.. Dengan demikian, tindak ini merupakan jenis tindak tutur yang dilakukan oleh 01 untuk menjelaskan obyek atau suatu program atau perencanaan pembangunan daerah yang harus diketahui 02 melakukan sesuatu baik berfungsi sebagai pengatur tingkah laku maupun sebagai pengontrol atau pengawas.

Realisasi tindak tutur direktif dalam proses penyusunan Perda RPJPD Kabupaten Karanganyar didasarkan pada asumsi bahwa (a) setiap 01 menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran tentang program yang harus disusun untuk jangka panjang yang harus dipahami oleh 02. (b) Bisa juga TT Direktif dituturkan oleh 02 yang ditujukan kepada 01 merupakan permohonan Program yang dipandang penting untuk diusulkan. (c) setiap TT direktif membawa dampak/atau akibat tertentu Dampak reaksi TT direktif yang dimaksudkan di sini adalah (a) dapat dilakukan sendiri oleh 02 atau (b) dilakukan bersama oleh 01 dan 02 atau, (c) dilakukan oleh 02 sendiri setelah ada rekomendasi dari 02. Sementara itu, dampak reaksi TT ini menurut Ibrahim (1996:51) dibedakan menjadi dua, yaitu: (a) simetris berarti menunjukkan adanya sifat kerja sama antara 01 atas 02. (b) asimetris berarti menunjukkan adanya kewenangan 01 atas 02. Kemudian pandangan Brown dan Levinson (1978:60) mengidentifikasikan dampak kekuatan TTD berkisar pada dua aspek, yaitu: (1) nosi muka positif, atau (2) nosi muka negatif. Pengertian muka positif (*self image*) konsisten yang dimiliki seseorang dan ingin dihargai atau diakui orang lain. Dengan kata lain, terwujud bila ide-ide atribut, milik, prestasi, tujuan yang oleh seseorang dihargai oleh lawan tuturnya. Selanjutnya pengertian muka negatif yaitu keinginan seseorang untuk tidak diserang, diejek atau dihinakan oleh lawan tuturnya.

2.2.6.2 Taksonomi Tindak Tutur Direktif

Taksonomi TT merupakan kajian yang telah lama dilakukan oleh para pakar linguistik seperti Yule, 1996:151-174; Levinson, 1995:226-331; Schiffrin, 1994:64-72; Coulthard, 1985:24-36; Mey, 1993:109-175;

Harun JP (2009:82) dan sebagainya setidaknya-tidaknya ada 33 ahli dan pemerhati yang mengulas tentang ihwal dan taksonomi tindak tutur, yaitu (1) Wittgenstein (1921), (2) Ayer (1936), (3) Moris (1938), (4) Austin (1962), (5) Stawson (1964), (6) Tambiah (1968), (7) Cohan (1969), (8) Searle (1969,1975,1979), (9) Ohman (1971), (10) Filmore (1971), (11) Ferguson (1973), (12) Gordon (1974), (13) Sadock (1974), (14) Bruner (1975), (15) Bates (1976), (16) Levin (1976), (17) Katz (1977), (18) Hancher (1979), (19) Bach & Harnish (1979), (20) Hymes (1980), (21) Wierzbicka (1980), (22) Dja Jengwasito (1984), (23) Leech (1983), (24) Davies (1986), (25) Fasold (1990), (26) Levinson (1991), (27) Gunarwan (1993,1995, 1996), (28) Schirin (1994), (29) Susmono (1994), (30) Anna Trosborg (1995), (31) G.Yule (1996), (32) Kreidler (1998), (33) Harun Joko Prayitno (2009).

Munculnya para pakar dan pemerhati tentang TT itu telah membawa konsekuensi logis di dalam mengelaborasi ke dalam tipe-tipe dasar tindak tutur. Namun demikian dengan munculnya para pakar tersebut masih ada problem utama yang dihadapi yaitu pengklasifikasian TT (ilokusi) menurut kategori atau tipe dasarnya. Sementara menurut Austin (1962) dan Searle (1969) kedua pakar tersebut yang dianggap sebagai peletak dasar tindak tuturpun memiliki perbedaan di dalam membuat klasifikasi TT kedalam kerangka makro apalagi ke dalam kerangka yang lebih spesifik. Perbedaan pemilahan tindak tutur ke dalam kerangka makro tersebut disebabkan oleh dasar yang digunakan untuk memilah. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Coulhard (dalam Commings; 1999:24) pemilahan tindak tutur yang dilakukan oleh Austin lebih bertumpu pada "*speaker's intention*", sedangkan Searle lebih bertumpu pada "*interest interpretation*".

Berdasarkan pemilahan dari berbagai pakar diatas menunjukan bahwa meskipun jumlah dan bentuk pengklasifikasiannya berbeda namun ditandai oleh terdapatnya salah satu bentuk tipe dasar tindak tutur yang sama, yakni tindak tutur *direktif*. Hal ini menunjukan bahwa tipe dasar

TT direktif merupakan salah satu tindak tutur yang penting dan sekaligus merupakan yang sangat dominan pemakaiannya dalam aktivitas berbahasa. Menurut Fasold (1990:78) yang dikutip Harun Joko Prayitno (2009:84) terdapat perhatian yang tinggi terhadap TT direktif disebabkan tiga hal, yakni karena (1) tindak tutur direktif mengemban tugas yang rawan dan sarat, (2) tindak tutur direktif merupakan bentuk TT yang bertaksa ganda, dan (3) tindak tutur direktif mendominasi aktivitas berbahasa sehari-hari.

Menurut Austin sebagai peletak dasar TT menyebutkan bahwa pada hakikatnya pada saat orang mengatakan sesuatu, orang itu juga akan melakukan sesuatu. Dalam pada itu, Austin lebih memusatkan perhatiannya pada klasifikasi TT menurut tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan pemetaan tindak ilokusi, meskipun Austin membuat kategori dasar tindak ilokusi menjadi lima, yakni: (a) *verdictives*, (b) *exercitives*, (c) *commissives*, (d) *behaviors*, dan (e) *expositives* tetapi belum menyebut secara eksplisit tentang TT direktif sebagai salah satu tipe di dalam tindak tutur.

Sementara itu, Searle pada tahun 1969 membuat taksonomi TT direktif menjadi lima, yakni: (1) menanyakan, (2) menegur, (3) memerintah, (4) memohon. Kemudian Coulthard (1985:24) mengklasifikasi TT direktif menjadi lima yaitu: (1) memerintah, (2) memohon, (3) mengundang, (4) menantang, (5) menegur. Sedangkan menurut Kreidler (1998:189-191) membuat taksonomi TT direktif hanya menjadi 3, yaitu: (1) memerintah, (2) memohon, (3) mendorong. Dari sisi lain, Holander dan Quick (dalam Harun Joko Prayitno, 2009:85) membagi TT direktif hanya menjadi 4 bentuk, yaitu: (1) memerintah, (2) memohon, (3) memberi saran, (4) memberi izin.

Sebelumnya, Ibrahim (1993:28-33) membuat taksonomi TT direktif menjadi enam tipe dasar, yaitu:

- 1) Tipe memohon (*to request*), yang meliputi: (1) meminta, (2) mengemis (3) memohon, (4) menekan, (5) mengundang, (6)

- mendoa, (7) mengajak, (8) mendorong.
- 2) Tipe menanyakan (*to question*), yang meliputi: (1) bertanya, (2) berinquri, (3) mengintrograsi.
 - 3) Tipe mensyaratkan (*to requirement*), yang meliputi: (1) memerintah, (2) menghendaki, (3) mengkomando, (4) menuntut, (5) mendikte, (6) mengarahkan, (7) mengintruksikan, (8) mengatur, (9) mensyaratkan.
 - 4) Tipe melarang (*to prohibit*), yang meliputi: (1) membatasi, (2) melarang.
 - 5) Tipe membolehkan (*to permis*), yang meliputi: (1) menyetujui, (2) membolehkan, (3) memberi wewenang, (4) menganugerahi, (5) mengabulkan, (6) membiarkan, (7) mengijinkan, (8) melepaskan, (9) memaafkan, (10) memperkenalkan.
 - 6) Tipe menasihati (*to advice*), yang meliputi: (1) menasihati, (2) mengingatkan, (3) mengkonseling, (4) mengusulkan, (5) mendorong. Selanjutnya, Nadar (2006:55) dalam TT direktif dalam kaitanya dengan realisasi strategi kesopanan berbahasa dapat diklasifikasi menjadi enam, yaitu: (1) menyuruh, (2) memerintah, (3) meminta, (4) memohon, (5) mengundang, (6) menasihati.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa taksonomi pengklasifikasian TT pada umumnya dan TT direktif pada khususnya dengan realisasi bentuk-bentuk TT direktif ke dalam penggunaan aktivitas berbahasa yang berinteraksi dalam budaya lokal tertentu masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Jenis-jenis tuturan direktif dalam proses pembahasan RPJPD dapat juga didasarkan atas teori komponen tutur Hymes (1974) yang mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya ada 8 faktor yang menentukan wujud ujaran seseorang. Faktor-faktor itu adalah **setting atau scene (s), participants (p), Ends (E), Act sequence (A) , Key (K), Instrumentalities (I) Norm of Interaction (A) dan Genre (G)**. Secara nemonic kesemua faktor-faktor itu diringkas menjadi **SPEAKING**.

2.2.7 Prinsip Kerja Sama

Di dalam prinsip orang berkomunikasi antara penutur dan mitra tutur dapat berjalan lancar apa bila mereka memiliki *frame of refren* yang sama (latar belakang yang sama) terhadap suatu obyek yang dibicarakan. Diantara mereka terdapat "kesepakatan bersama". Konvensi kesepakatan bersama tersebut antara lain dua prinsip utama, yakni: (1) prinsip kerja samadan (2) prinsip sopan santun, serta (3) prinsip ironi. Menurut Grice dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama setiap penutur harus memenuhi harus memenuhi 4 maksim percakapan Berikut ini akan dipaparkan prinsip-prinsip kerja sama sbb:

2.2.7.1 Maksim kuantitas

Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Pada intinya maksim kuantitas penutur tidak menyimpangkan nilai kebenaran (*truth value*). Sebagai contoh tuturan sebagai berikut: "Tetangga saya hamil" artinya tidak perlu ditambah keterangan tetangga saya yang perempuan hamil. Dengan kata lain tuturan yang tidak mengandung informasi yang sungguh-sungguh diperlukan mitra tutur, dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas dalam prinsip kerja sama Grice. Demikian sebaliknya, apabila tuturan itu mengandung informasi yang berlebihan akan dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas.

2.2.7.2. Maksim kualitas

Maksim percakapan ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Dengan kata lain peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta yang sebenarnya di dalam bertutur. Dalam hal ini fakta itu harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan nyata.

2.2.7.3. Maksim Relevansi

Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Dengan kata lain antara peserta tutur agar terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan. Bertutur dengan tidak memberikan kontribusi yang demikian dianggap tidak mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama ini.

2.2.7.4. Maksim Pelaksanaan

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak takabur, tidak taksa dan tidak berlebihan serta runtut. Dengan kata lain, peserta tutur bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur. Dengan demikian orang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal-hal itu dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama Grice karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan. Sebagai contoh tuturan Parjito (+) "Ayo, cepat dibuka!"
(-) "Sebentardulu, masih dingin".

Informasi indeksal: Dituturkan oleh seorang kakak kepada adiknya.

Kata dibuka dalam tuturan di atas mengandung kadar ketaksaan dan kekaburan sangat tinggi.

2.2.8. Prinsip Kesopanan

Di dalam setiap pertuturan dapat diasumsikan bahwa terdapat kerja sama antara penutur dan mitra tutur. Suatu tuturan yang dikemukakan oleh penutur selalu dilandasi atau mengandung maksud tertentu. Penutur dalam hal ini berharap agar mitra tuturnya dengan kemampuan komunikatifnya dapat menangkap maksud yang diungkapkan atau disyaratkan oleh tuturan yang diartikulasikannya yang dikutip oleh Harun Joko Prayitno dari Wijana (1999:7).

Dalam bertutur penutur harus bertanggung jawab atas segala apa yang dituturkan (dikomunikasikan). Untuk itulah di dalam proses

komunikasi diperlukan apa yang dikemukakan oleh Grice (1975) prinsip kerjasama pertuturan. Prinsip-prinsip kerjasama ini kemudian untuk lebih detailnya dijabarkan ke dalam berbagai maksim (bidal) penuturan.

2.2.8.1 Prinsip Kerukunan (PK)

Menurut Geertz (1961) ada dua prinsip dasar yang sangat menentukan pola pergaulan sosial di dalam masyarakat Jawa. Keduanya ialah prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Yang pertama, prinsip kerukunan berasal dari kata *rukun* ("*harmonious*"), mengacu kewajiban setiap anggota masyarakat untuk memelihara keseimbangan sosial dan prinsip hormat bermakna "hormat" merujuk ke "kewajiban" setiap anggota masyarakat untuk menunjukkan hormat kepada orang lain sesuai dengan status dan kedudukan masing-masing di dalam masyarakat.

Tampaknya ada cara lain untuk melihat yang dikatakan oleh Geertz, sebagai penutur jati bahasa Jawa yang dibesarkan di dalam budaya Jawa, sebenarnya di kebudayaan Jawa ada satu prinsip yang mendasar di dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa. Prinsip dasar ini adalah prinsip keseimbangan, yang bertumpu pada kerukunan, sehingga prinsip keseimbangan ini "*isomorfis*" dengan prinsip kerukunan. Asumsi ini berimplikasi bahwa prinsip hormat (*kurmat bahasa Jawa*) itu hanyalah salah satu jabaran prinsip dasar kerukunan tersebut. Dengan kata lain, di masyarakat Jawa ada satu prinsip dasar yaitu prinsip kerukunan dan prinsip keseimbangan yang mengatur pergaulan sosial masyarakat Jawa dan prinsip ini dapat dijabarkan menjadi bidal-bidal (*maxims*) yang salah satunya bidal kurmat. Menurut Asim Gunawan (2003:4) perihal hormat itu hanyalah konsekuensi "tuntutan" hidup rukun yang merupakan syarat "*conditi sine quanon*" bagi adanya keseimbangan tidak menunjukkan hormat dapat merusak keseimbangan sosial karena ada orang yang sakit hati dan akibatnya orang menjadi tidak rukun, dan keseimbangan sosial pun akan terganggu.

Menurut pandangan orang Jawa, alam semesta ini terbagi menjadi dua, yaitu "*jagad gedhe*" (makrokosmos) dan "*jagad cilik*" (mikrokosmos) (Anderson, 1990:34) yang masing-masing harus berada di dalam keseimbangan agar tidak kacau balau. Sebagai analogi bintang-bintang, matahari, bulan, planet, satelit berada dalam keseimbangan dan karena itu, mereka tidak saling bertabrakan. Demikian pula dalam diri manusia perlu ada keseimbangan rohani dan jasmani agar tidak ada kekalutan di dalam dirinya. Seperti yang tersirat di atas, keseimbangan tercapai jika unsur-unsur pembentuknya berada dalam keadaan rukun. Keadaan rukun ini akan ada jika unsur-unsur itu berada di dalam tempat atau kedudukan yang sudah ditetapkan atau sudah "melekat" (*inheren*). Selama ada perselisihan, konflik bahkan selama satu unsur saja tidak berada di kedudukan yang sudah ditetapkan baginya, selama itu pula keseimbangan akan terusik. Keseimbangan akan terusik jika ada unsur-unsurnya yang tidak terusik.

Menurut Falsafah Jawa, semuanya akan baik jika berada di dalam keseimbangan baik keseimbangan batin, maupun keseimbangan fisik, dan keseimbangan di dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut prinsip ini setiap anggota masyarakat Jawa diharapkan selalu berusaha ikut menjaga keseimbangan di dalam kehidupan kesehariannya dalam hal apapun. Di dalam perikehidupan kemasyarakatan, cara menjaga keseimbangan itu ialah dengan menjaga kerukunan di antara sesama anggota masyarakat. Kerukunan dapat dijaga jika anggotanya antara lain saling menghindari perselisihan atau konflik. Caranya ialah dengan "*wani ngalah*" (berani mengalah) seperti yang dinasihatkan dalam sebuah tembang Jawa "*Wani ngalah, luhur wekasane*" orang yang berani mengalah akhirnya (berkedudukan tinggi), tentu saja hal di atas tidak bermakna bahwa kewajiban sosial untuk menjaga kerukunan itu hanya terdapat di dalam masyarakat Jawa, dalam derajat yang berbeda-beda, kewajiban untuk menjaga kerukunan itu tentu juga ada di dalam masyarakat di suku lain, kerukunan itu disebut dengan istilah ketertiban,

keteraturan atau istilah lain.

2.2.8.2 Maksim Kerjasama (PKS)

Pada dasarnya orang dalam berkomunikasi itu hendaknya saling bekerjasama antara penutur dengan mitra tutur agar komunikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Setiap peserta pertuturan sama-sama menyadari bahwa ada prinsip-prinsip yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan lawan tutur (Wijana, 1996:68). Partisipasi komunikasi sangat penting untuk memenuhi dan mematuhi prinsip kerja sama yang terbagi 4 maksim yaitu :

- (1) **Maksim kuantitas**, yang mengikat setiap pelibat tutur untuk memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicara.
- (2) **Maksim kualitas**, yang mewajibkan setiap pelibat tutur untuk berbicara dan mengatakan hal yang sebenarnya.
- (3) **Maksim relevansi**, yang mengharuskan setiap pelibat tutur untuk berbicara yang relevan (gayut) dengan pokok pembicaraan yang telah disepakati
- (4) **Maksim pelaksanaan** (cara), yang mengharuskan setiap pelibat tutur berbicara secara langsung, tidak kabur (taksa), dan tidak berlebih lebihan (Parker, 1986:23; Wardaugh, 1986:202).

Merujuk pada 4 maksim dari prinsip kerjasama itu bila dapat dipenuhi dari masing-masing peserta tutur maka akan terjadi komunikasi lewat bahasa yang efektif dan efisien. Sukar dibantah bahwa nasehat-nasehat Grice itu baik agar komunikasi berjalan efisien. Oleh karena itulah komunikator yang mematuhi nasehat-nasehat itu akan dapat berkomunikasi dengan baik. Persoalannya, baik menurut tolok ukur apa? Bila tolok ukurnya adalah penyampaian informasi belaka, bidal-bidal Grice itu memang perlu diikuti. Namun, persoalannya bahwa tujuan komunikasi bukanIah semata-mata untuk

menyampaikan informasi. Di dalam praktek (diskusi/dialog) penggunaan bahasa "**Prinsip Kerja Sama-PKS**" lebih sering tidak dipatuhi orang, karena berbagai alasan antara lain demi kesantunan.

Beberapa pakar mengemukakan masalah kesantunan berbahasa namun dalam penelitian ini akan mengacu prinsip kesantunan yang diajukan oleh Leech (1983:119) karena pendapat ini dianggap paling lengkap. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Maksim kebijaksanaan (*tact maxim*): kurangi kerugian orang lain tambah keuntungan orang lain.
- b. Maksim kedermawanan (*generosity maxim*): kurangi keuntungan diri sendiri, tambah kerugian diri sendiri.
- c. Maksim penghargaan (*approbation maxim*): kurangi cacian pada orang lain, tambah pujian pada orang lain.
- d. Maksim pemufakatan (*agreement maxim*): kurangi ketidakcocokan antara diri sendiri dengan orang lain, tingkatkan kecocokan antara diri sendiri dengan orang lain.
- e. Maksim kesederhanaan (*modesty maxim*): kurangi pujian pada diri sendiri tambah cacian pada diri sendiri.
- f. Maksim simpati (*sympathy maxim*): kurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain. Perbesar simpati antara diri sendiri dengan orang lain.

2.2.8.3 Prinsip Kesantunan atau Prinsip Sopan Santun (PSS)

Prinsip kesantunan ini berkaitan dengan pandangan norma sosial teori kontrak percakapan, teori maksim percakapan dan teori penyelamat muka. Pandangan norma sosial masyarakat bahwa tiap masyarakat memiliki norma, adat istiadat dan tatanan sosial. Dengan demikian asumsinya adalah bahwa masyarakat mempunyai seperangkat norma yang di dalamnya ada kaidah yang secara umum tidak tertulis. Kesantunan adalah tindak yang bersifat mengingat Mr maupun Mt (penutur *commit to user* mitra tutur). Dengan demikian, agar

supaya tuturannya dapat dipahami oleh penutur harus memperhatikan kaidah giliran bertutur. Pada prinsipnya kesantunan bertilik tolak dari prinsip kerja sama, yaitu apa yang akan dan harus dikatakan secara benar, kapan harus mengatakannya dan bagaimana harus mengatakannya agar tuturannya enak dan mudah di dengar petutur.

Menurut Leech (1983:132) prinsip kesopan-santunan memiliki sejumlah maksim, yaitu: maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan dan maksim kesimpatian. Dengan demikian, PSS ini beranggapan dasar bahwa minimalkan pengungkapan tuturan direktif yang tidak santun. Oleh sebab itu, prinsip ini menganut kaidah untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Menurut Brown-Levinson (1978) derajat kesantunan dalam bertutur dapat dilakukan dengan delapan strategi, yaitu: (a) pakailah ujaran tak langsung, (b) pakailah ujaran berpagar, (c) tunjukkan dengan pesimisme, (d) minimalkan paksaan, (e) berikan penghormatan kepada Mr, (f) mintalah maaf, (g) pakailah bentuk impersonal, (h) ujarkan tindak tutur melalui ketentuan yang bersifat umum.

Kemudian menurut Blum-Kulka (1992:187) bahwa tindak tutur direktif melalui sembilan modus, yaitu: (1) bentuk imperatif, (2) performatif eksplisit, (3) berpagar, (4) pernyataan keharusan, (5) pernyataan keinginan, (6) rumusan saran, (7) pernyataan pertanyaan, (8) isyarat kuat, (9) isyarat halus. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa TT direktif akan efektif dituturkan jika penutur lebih banyak memahami situasi tutur dan prinsip-prinsip sopansantun dalam bertutur.

2.2.8.4 Prinsip Ironi (PI)

Prinsip ironi pada hakikatnya merupakan bentuk bela diri yang memadukan seni menyerang dengan sebuah keluguan. Jadi, fungsi

ironi adalah apa bila prinsip kesopanan tidak dapat dipertahankan, kehancurannya akan mengenai kedua belah pihak, baik pr maupun Mt, tuduhan akan dibalas dengan tuduhan, ancaman akan dibalas dengan ancaman, dan ironi bisa digunakan. Oleh karena itu biasanya ,ironi ini digunakan untuk menghindari agresi apabila situasi sudah mendekati konflik. Dengan menggunakan PI memungkinkan seseorang untuk bertutur tidak sopan melalui tuturan yang seakan-akan sopan Caranya adalah dengan memberi kesan melanggar PKS tetapi sebetulnya menaatinya. Dengan demikian , agaknya PI disfungsional,dalam arti kalau PSS mendorong terwujudnya hubungan yang ramah dan menghindari konflik dalam hubungan-hubungan sosial, sementara PI memungkinkan penutur untuk bertutur tidak sopan dan berpeluang menggunakan bahasa yang antisosial. Oleh karena itu, dikatakan bersikap ironis apabila menggunakan sopan santun yang tidak tulus sebagai pengganti tidak sopan, sehingga PI pada akhirnya tetap merugikan dan menyudutkan mitra tutur dengan cara-cara bertutur yang tidak berterus terang. Di dalam praktek penggunaan PI menurut Harun Joko Prayitno (2009) bagi penutur yang berlatar belakang budaya Jawa tercermin dalam ungkapan "*nyemoni*" (nyindir). Prinsip ini banyak digunakan oleh orang Jawa sebagai wujud kekesalan penutur atau ditunjukkan oleh mitra tutur. Kekecewaan penutur ini muncul karena sesuatu yang dikehendaki oleh penutur tidak dilakukan oleh mitra tutur atau sebaliknya. Jadi, PI terjadi karena tidak dipatuhinya PKS dan tidak diindahkannya PSS. Pada prinsipnya PI ini digunakan untuk menghindari konflik.

2.2.8.5 Prinsip Relevansi (PR)

Menurut Sperber dan Milson (1986:155-158) merumuskan PR itu dengan mengatakan bahwa setiap tindak komunikasi yang ostensif itu mengomunikasikan dengan tentang adanya relevansi yang optimal. Komunikasi yang ostensif adalah komunikasi yang berisi jaminan adanya relevansi. Dengan demikian, suatu tindak tutur direktif ostensif

adalah suatu tindak tutur yang dimaksudkan secara jelas oleh penutur. Inti dari semua itu adalah, jika tidak ada relevansi yang optimal tentu penutur tidak akan bertindak tutur direktif.

Implikatur PR ini dalam cara tindak tutur direktif adalah bahwa penutur dapat memilih realisasi bentuk TT direktif melalui eksplikatur dan implikatur. Yang dimaksud eksplikatur adalah maksud secara eksplisit dimaksudkan oleh penutur. Implikatur adalah maksud yang tidak dinyatakan tetapi dikomunikasikan oleh penutur. Jadi, eksplikatur adalah makna yang tersurat, sedangkan implikatur adalah makna yang tersirat.

2.2.8.6 Prinsip Seloroh / Kelakar (PS)

Pada dasarnya prinsip seloroh (PS), ada yang menamakannya sebagai prinsip kelakar, berlawanan dengan PI. Menurut Gunarwan yang dikutip Harun Joko Prayitno (2009:97) penerapan prinsip ini adalah penutur bertutur tidak santun, tetapi daya ilokusnya santun. Dengan demikian, jika ditilik dari bentuk tuturannya tidak santun, tetapi implikturnya santun. Fungsinya untuk menunjukkan keakraban atau kedekatan hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur. Oleh karena itu, prinsip ini biasanya hanya diterapkan oleh penutur yang hubungannya dengan penutur yang sudah sangat akrab dan berlangsung dengan suasana-suasana non resmi atau non kedinasan.

2.2.8.7 Prinsip Kultural yang Mendasari Cara Berkomunikasi

Penutur Jawa

Pada dasarnya ada dua prinsip yang mendasar yang perlu diketahui oleh orang Jawa dalam berkomunikasi, yang pertama adalah prinsip menghormati orang lain, karena kedudukannya dalam suatu masyarakat karena harus dihormati. Kedua, prinsip menghindari konfrontasi terbuka untuk menjaga hubungan yang harmonis.

Pada prinsip pertama, orang Jawa pada umumnya percaya

bahwa hubungan sosial dalam masyarakat sifatnya hierarkis. Hubungan tersebut perlu dipelihara yang antara lain ditunjukkan melalui penggunaan bahasa mereka. Segenap orang perlu mengetahui kedudukannya dalam masyarakat, sehingga hubungan sosial tadi dapat dipelihara dengan baik. Untuk itu setiap orang perlu menghormati orang lain yang kebetulan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Budaya Jawa yang dominan adalah yang lebih mengutamakan sikap menghormati untuk menunjukkan sopan santunnya. Dengan demikian penghormatan bentuk luarnya dari pada bentuk batinnya di sini menjadi penanda sopan tidaknya penutur yang berlatar belakang budaya Jawa. Bangsa Indonesia pada dasarnya dikenal sebagai bangsa yang ramah dan menjunjung prinsip gotong royong serta dua sistem nilai dalam masyarakat Jawa yaitu nilai rukun dan nilai hormat (Sri Samiati Taryana; 2006:29).

Prinsip kedua, pada umumnya orang Jawa meyakini bahwa mereka perlu menghindari konflik dengan orang lain secara terbuka agar hubungan yang harmonis dengan mitra tuturnya dapat dipelihara. Hubungan yang harmonis ini sering dikatakan sebagai ungkapan yang mengedepankan "*rukun*", sehingga terkenal dengan ungkapannya *rukun agawe santoso*. Kerukunan merupakan modal kesentosaan. Kerukunan antar sesama perlu terus dipelihara dengan berbagai cara, antara lain dengan menunjukkan sikap yang tenang dan tidak mengumbar emosi secara berlebihan dan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa tutur dengan logat yang halus dan sopan. Kedua prinsip itulah yang akhirnya turut melatarbelakangi sikap dan cara orang Jawa di dalam mengungkapkan pendapat dan menyatakan kehendaknya.

2.2.9 Teori Skala Kelangsungan dan Derajat Kesantunan

Menurut teori strategi bertutur, setiap tuturan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tuturan langsung dan tuturan tidak langsung Berdasarkan pandangan para pakar linguistik bahwa tingkat

kelangsungan dapat diukur menurut (1) ketembuspandangan; (2) besar-kecilnya jarak tempuh; dan (3) kejelasan pragmatiknya.

Yang dimaksud dengan tingkat kelangsungan berdasarkan besar kecilnya jarak tempuh adalah jarak antara tindak ilokusi yang berada dalam diri dengan titik tujuan ilokusi yang terdapat dalam diri mitra tutur. Dengan demikian, semakin jauh jarak tempuhnya, semakin tidak langsunglah tuturan itu. Demikian pula berlaku sebaliknya, semakin dekat jarak tempuhnya akan semakin langsunglah tuturan itu.

Fenomena di atas, dalam kajian sosiopragmatik menjadi menarik sebab kejelasan pragmatik ini sesungguhnya berkaitan erat dengan skala kesantunan, yakni semakin jelas maksud sebuah tuturan akan semakin tidak santunlah tuturan itu. Hal itu berarti pula semakin tidak transparan maksud sebuah tuturan akan semakin santunlah tuturan itu. Dengan demikian dengan perkataan lain dapat dinyatakan penggolongan TT ke dalam bentuk-bentuk tindak tutur akan memungkinkan dapat teridentifikasinya peringkat kesantunan tuturan dalam kegiatan bertutur.

Faktor penentu wujud dan derajat kesantunan dapat bersifat linguistik dan ekstralinguistik. Penanda linguistik itu berujud berbagai macam aspek bahasa, seperti panjang-pendeknya tuturan, urutan pemakaian kata dan frasa penanda kesantunan yang semuanya berpengaruh terhadap persepsi kesantunan. Adapun penentu ekstralinguistik menunjuk kepada berbagai aspek luar bahasa yang kemunculannya bersama tuturan berpengaruh terhadap persepsi kesantunan, yang lazimnya disebut dengan situasi tutur.

Kemudian mengenai skala kesantunan yang yaitu model Brown dan Levinson (1983) yang paling relevan dengan topik penelitian ini. Skala kesantunan tersebut: (1) skala jarak sosial antara mitra tutur, (2) skala kontekstual, dan (3) skala kultural, (4) ketidaktegasan.

2.2.10 Teori Implikatur Tuturan dan Daya Pragmatik

Praanggapan, pada hakekatnya merupakan suatu kalimat diucapkan selain dari makna yang dinyatakan dengan pengucapan

kalimat itu, turut disertakan pula tambahan makna yang tidak dinyatakan tetapi tersiratkan dari pengucapan kalimat itu. Contoh kalimat tersebut berbunyi: ada spanduk yang melintang di jalan Sudirman. Apabila dalam kenyataannya memang ada spanduk yang terpasang melintang di jl. Sudirman, tuturan itu dapat dinilai benar atau salahnya.

Di dalam pertuturan yang sesungguhnya, (02) dan (01) dapat secara lancar berkomunikasi karena mereka berdua memiliki semacam kesamaan latar belakang pengetahuan tentang sesuatu yang dipertuturkannya. Dengan demikian antara (02) dan (01) terdapat semacam kontrak percakapan tidak tertulis bahwa apa yang sedang dipertuturkan itu saling berkaitan, sehingga bisa dengan mudah saling memahami. Menurut Grice (1975) bahwa sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut, Proposisi yang diimplikasikan itu dinamakan implikatur tuturan.

Menurut Wijana (1996:37) seperti yang dikutip Harun Joko Prayitno (2009:106) menyatakan bahwa hubungan antara kalimat yang mengimplikasikan dan kalimat yang diimplikasikan tidak menyebabkan konsekuensi mutlak. Tidak adanya konsekuensi mutlak (keterkaitan semantis) antara kalimat yang mengimplikasikan dan kalimat yang diimplikasikan itu memungkinkan munculnya implikatur yang tidak terbatas jumlahnya. Sebagai contoh wacana sebagai berikut: * Pak guru datang. Implikatur percakapan dari wacana itu: (1) Aku mengerjakan soal (2) Meja gurunya dibersihkan, (3) Anak-anak duduk rapi dan teratur. Jawaban (1) aku segera mengerjakan soal, mengimplikasikan bahwa Pak guru meninggalkan kelas tadi supaya anak-anak mengerjakansoal, dan jawaban (2) Meja Guru dibersihkan, mengimplikasikan bahwa Pak Guru akan marah kepada para siswa kalau di meja guru kelas kotor atau berserakan kapur. Jawaban ke (3) anak-anak duduk rapi dan teratur, mengimplikasikan bahwa Pak Guru

tidak berkenan kalau kelas di tinggal pak Guru para siswa gojek dan tempatnya berpindah-pindah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implikatur tuturan pada prinsipnya adalah proses penarikan kesimpulan atas suatu proposisi.

2.2.11 Teori Situasi Tutur

Pengertian konteks situasi tutur dalam kajian pragmatik adalah segala sesuatu yang mengiringi direalisasikannya suatu pertuturan. Segala sesuatu itu bisa berupa latar belakang pengetahuan yang muncul dan dipahami secara bersama, baik oleh penutur maupun mitra tutur dan aspek-aspek nonkebahasaan lainnya yang mengiringi, menyertai dan melatarbelakangi digunakannya suatu pertuturan tertentu.

Konteks situasi tutur dalam kajian pragmatik memegang peran penting. Konteks situasi tutur inilah yang menjadi pengendali maksud sebuah pertuturan. Konteks situasi tutur ini pulalah yang menjadi pilar lahirnya bidang kajian pragmatik. Bahkan menurut Rohmadi (2004:1) bahwa kajian bahasa tidak akan dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks situasinya.

Konteks situasi tutur berkaitan erat dengan masyarakat tutur dan wahana kebudayaan yang mewadahi dan konteks situasi tutur seperti yang dikutip Harun Joko (2009:109) dari Mey (1983:42-43) dikelompokkan menjadi dua macam, yakni konteks sosial (*social context*) dan konteks sosietal (*societal context*). Konteks sosial adalah konteks kebahasaan yang muncul sebagai akibat dari munculnya komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dengan latar belakang sosial budaya tertentu.

Konteks sosietal merupakan konteks yang faktor penentunya adalah kedudukan sosial relatif masyarakat tutur dalam situasi sosial tertentu. Dengan demikian sosok konteks sosial didasari oleh solidaritas sementara itu kekuasaan mendasari konteks sosietal.

commit to user

2.2.12 Teori Wacana

Pada awalnya, kata wacana dalam bahasa Indonesia digunakan untuk mengacu pada **bahan bacaan, percakapan dan tuturan**. Istilah wacana mempunyai acuan yang lebih luas dari sekedar bacaan. Bahkan para ahli telah menyepakati bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang paling besar yang digunakan dalam berkomunikasi. Satuan bahasa di bawahnya secara berturut-turut adalah kalimat, frase, kata dan bunyi. Menurut Cook (1989:6-7) menegaskan wacana merupakan suatu penggunaan bahasa dalam berkomunikasi baik secara tulisan maupun lisan. Sementara menurut Halliday dan Hassan (1979:23), wacana merupakan satu kesatuan semantik dan bukan kesatuan gramatikal. Kesatuan yang bukan lantaran bentuknya (morfem, kata, klausa dan kalimat), melainkan kesatuan arti. Dalam situasi komunikasi, apa pun bentuknya wacananya, diasumsikan adanya penyapa (*addresor*) dan pesapa (*addressee*). Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara sedangkan pesapa adalah pendengar. Dalam wacana tulis, penyapa adalah penulis sedangkan pembaca sebagai pesapa. Dalam sebuah wacana, harus ada unsur pesapa dan penyapa. Tanpa adanya kedua unsur itu, tidak akan terbentuk suatu wacana.

Dalam komunikasi secara lisan (seperti tuturan), wacana merupakan proses komunikasi secara lisan yang berupa rangkaian ujaran. Dalam proses penyusunan perda tentang RPJPD tuturan terjadi antara penutur (bisa pemandu, pengarah, nara sumber, penyusun RPJPD) dengan petutur (peserta Musrenbangda, peserta seminar, peserta FGD dan anggota DPRD). Ujaran yaitu kalimat yang diucapkan secara lisan. Dalam komunikasi lisan di dalam membahas draf RPJPD para peserta tutur dilakukan secara bergantian berbicara dengan atau dengan topik penyusunan RPJPD. Setiap peserta tutur mempunyai hak dan kewajiban mendengarkan atau merespon pembicaraan mitra tuturnya. Ketika nara sumber bertindak selaku

pembicara, ia dapat menyampaikan tuturan direktif untuk menyampaikan informasi, mengajak, memerintah, memohon, saran dan menyampaikan usul/saran. Sebaliknya, mitra tutur mendengarkan kemudian bersiap-siap berganti peran sebagai pembicara untuk merespon pembicaraan terdahulu. Demikianlah, proses itu terjadi.

Dalam komunikasi lisan, ujaran sangat dipengaruhi oleh konteks. Oleh karena wacana lisan hanya bersifat temporer yang fana (artinya setelah diucapkan langsung hilang), penafsirannya harus melibatkan konteks ketika ujaran itu diucapkan.

2.2.13 Beberapa Pendekatan Memaknai Makna

Untuk memaknai suatu tuturan perlu dilakukan berbagai pendekatan, menurut William Frawley (1992:17) ada 4 pendekatan memaknai makna tuturan:

1) Pendekatan pertama, makna berdasarkan referensi (acuannya)

Bila kita bertanya kepada seseorang tentang kata "anjing" biasanya kita akan diberi penjelasan yaitu makhluk Tuhan yang berbulu, buas, penuh dengan kejujuran dan sebagainya. Pemaknaan sebuah kata tersebut merupakan yang konstan dalam berbagai konteks. Padahal makna referensi dari objek di dunia sejarah pembahasan yang panjang dan ketidakajegan. Padahal di bidang pragmatik yang diacunya sesuai dengan kenyataannya. Referensi dapat selalu konstan, sedangkan makna dapat beragam sesuai dengan konteksnya. Referensi tidak dapat dideterminasikan atau tidak nyata, sementara di sana masih terkandung banyak makna.

2) Pendekatan kedua, makna sebagai bentuk penalaran

Pendekatan logika terhadap makna menjadi bahasan yang menarik tentang isi dari suatu tuturan yang relevan secara gramatikal. Penelitian logika terhadap makna telah lama dilakukan oleh para pakar pragmatik antara lain seperti: Mc.Cawley, Bach dan Ladusaw. Ada dua alasan pentingnya membahas logika dan

makna yaitu (1) Logika berdasarkan tipenya dikaitkan dengan kebenaran, kesimpulan, dan isi dari tuturan tersebut, (2) Logika memiliki maksud yang eksplisit dan teliti akan isi dari ekspresi yang dituturkan. Dari berbagai penelitian mengenai penalaran dan makna dapat menentukan isi dari setiap ujaran (ekspresi) dengan membuat perbedaan statusnya penyampaian informasi (kalimat) yang salah atau pun yang benar. Kemudian menganalisis hubungan antara dua buah tuturan dengan membuat urutan dari tarikan kesimpulan tentang isi yang ada di dalamnya. Sebab logika berlandaskan pada analisis semantik tentang isi dari setiap ujaran untuk menentukan tarikan kesimpulan yang dianggap benar. Sebagai contoh: Amir (peserta MUSRENBANG) menghantam Bob (Moderator MUSRENBANG). Secara intuitif kami mengetahui bahwa jika Amir menghantam/memukul mengimplikasikan adanya "kontak" sosial/komunikasi antara si Amir dan si Bob di dalam pelaksanaan MUSRENBANG.

3) Pendekatan ketiga makna sebagai konteks dan pengguna

Di mana setiap ekspresi linguistik mengacu bersifat stabil dalam berbagai konteks karena mereka menyatu dalam ekspresi itu sendiri. Hanya sebagai perluasan referensi, diperlukan sub-ordinat untuk pengkhususan, dan bentuk logika merupakan hal yang paling dipahami setelah fakta, sehingga secara gramatikal, makna yang relevan tidak ditentukan oleh penggunaannya.

Konteks dan penggunaan suatu hal yang sangat akrab dan dikenal di bidang pragmatik untuk menentukan makna suatu ujaran. Sebagai contoh, seandainya kita sedang berdiri di tepi sungai, dan saya berkata: "*I was near that bank yesterday*" (saya berada di tepi sungai itu, kemarin). Kita secara langsung memahami bahwa kata "*bank*" mengacu pada "*river bank*" (tepi sungai), bukanlah sebuah "lembaga keuangan". Berbeda bila kita

berada di Wall Street, dan saya berkata: *I was near that bank yesterday* (Saya berada di dekat bank itu kemarin). Anda tidak akan mungkin berpikir bahwa saya mengacu pada area tepian sebuah sungai. Dengan demikian, tentu saja kontekslah yang menentukan makna.

4) Pendekatan ke-4, Pemaknaan sebagai bagian dari budaya

Pendekatan ini berpandangan bahwa budaya adalah pemaknaan akhir yang sifatnya manusuka bahwa pemaknaan linguistik merupakan kesatuan yang telah ditentukan oleh konteks kebudayaan di mana bahasa itu digunakan. Persoalannya bagaimana pewarisan kebudayaan dapat terjadi. Budaya itu sendiri dijabarkan sebagai sistem dalam kemasyarakatan yang terdiri dari kepercayaan dan teori-teori tentang pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari diwariskan dari generasi ke generasi melalui sebuah tradisi yang simbolis. Budaya merupakan seperangkat pemaknaan-pemaknaan umum yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk membuat aturan berdasarkan pengalaman, asal mulanya dan untuk membuat ramalan tentang masa depan. Sebuah bahasa memberikan ekspresi untuk merefleksikan konteks kebudayaan yang beragam di mana bahasa itu dipergunakan. Setiap orang yang pernah tinggal beberapa waktu di dalam terbentuk budaya lain yang berbeda dengan miliknya akan segera menyadari bahwa dunianya terbentuk sedikit berbeda di dalam budayanya yang baru. Yang telah disusun untuk pemaknaan di suatu tempat tidak selalu tepat bila diterapkan di tempat lain.

2.2.14 Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Setiap Penyusunan PERDA bahwa aspek filosofis, politik, yuridis dan sosiologis penting mendapatkan perhatian dalam menyusun Perda, sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

- 1) **Secara filosofis**, perda mendasarkan Pancasila, yaitu pandangan mendasar untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka azasnya kerakyatan dan partisipatif, transparansi serta akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan.
- 2) **Politis**, menguatkan kelembagaan pemerintahan (perampingan, efisiensi dan efektivitas pelayanan), memperbaiki, menjaga dan menjamin hubungan serta kepercayaan rakyat.
- 3) **Yuridis**, menguatkan kepastian dan penegakan hukum dalam mewujudkan fungsi-fungsinya dengan mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.
- 4) **Sosiologi**, perda memperhatikan kebutuhan, kondisi dan kapital sosial masyarakat serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga aspek formil dan materiilnya mengakomodasikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pasal 137 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa perda dibentuk berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. **Azas kejelasan tujuan**, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas hendak dicapai.
- b. **Azas kelembagaan** atau organ pembentuk yang tepat maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga / pejabat yang berwenang.
- c. **Azas kesesuaian** antara jenis dan materi muatan, maksudnya dalam pembentukan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.
- d. **Azas dapat dilaksanakan**, maksudnya adalah setiap pembentukan

peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan

- e. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur negara.
- f. **Asas kejelasan rumusan**, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. **Asas keterbukaan**, maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 6 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :

- a. **Asas pengayoman**, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. **Asas kemanusiaan**, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-perundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. **Asas kebangsaan**, maksudnya adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. **Asas kekeluargaan**, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk

mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. **Asas kenusantaraan**, maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistim hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. **Asas Bhineka Tunggal Ika**, maksudnya adalah bahwa materi muatan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. **Asas keadilan**, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, maksudnya adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. **Asas ketertiban dan kepastian hukum**, maksudnya adalah bahwa ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. **Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan**, maksudnya adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

2.2.15 Perda sebagai alat pemerintahan dan Demokratisasi

Di era otonomi daerah dan desentralisasi, DPRD dan pemda mempunyai kewenangan yang **luas** dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan. Akan tetapi, seringkali pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan satu sama lain. Untuk itu DPRD dan Pemda perlu selalu memperhatikan kerangka hukum dan/atau tata urutan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi pertentangan di antara peraturan perundang-undangan yang seringkali terjadi, sehingga dapat dihindari.

Terdapat serangkaian langkah utama yang perlu dilalui agar proses penyusunan perda dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaannya dapat efektif. Langkah-langkah utama tersebut dimulai dari identifikasi agenda politik, pemerintahan dan pembangunan dan diakhiri dengan penetapan perda oleh DPRD, selanjutnya dilaksanakan oleh pemda. Faktor lain yang penting dipertimbangkan dalam proses penyusunan perda adalah "*Political game*" yang melibatkan pelaku-pelaku utama yaitu: DPRD, Pemda dan pemerintah Pusat. Untuk menjamin proses yang demokratis dan memudahkan, DPRD perlu merumuskan ketentuan-ketentuan yang lebih memadai dalam tata tertib DPRD. Sebab, tata tertib DPRD perlu dipandang lebih dari pada sebagai alat untuk mengatur proses internal. Tata tertib itu harus dimengerti sebagai aturan-aturan dasar yang memperhitungkan berbagai kepentingan politik dari berbagai fraksi (PDI-P, PAN, Golkar, PKB, PKS, Demokrat dan PNI) yang ada di dalam lembaga itu.

Tata tertib DPRD menentukan lembaga perwakilan rakyat ini dapat melaksanakan berbagai fungsi dan tugasnya secara efektif atau tidak. Sebab tata tertib itu juga dapat menentukan sejauh mana DPRD dapat melembagakan berbagai prinsip tata pemerintahan yang baik dan demokratis dari dalam dirinya sendiri. Seringkali didapatkan bahwa para politisi yang duduk di DPRD enggan untuk membuat tata tertib yang disertai dengan kode perilaku. Sebab, serangkaian dari ketentuan itu akan "mempersulit diri". Di masa mendatang, ketika DPRD dengan seluruh anggotanya harus membuktikan dan memberi contoh akuntabilitas, perumusan dari kedua aturan itu tidak dapat dihindarkan.

Memperjuangkan kepentingan rakyat atau kepentingan umum adalah

termasuk wilayah politik. Dalam artian perjuangan kepentingan publik atau umum adalah perjuangan politik, bukan kepentingan individu, meskipun terbuka kemungkinan masuknya kepentingan pribadi dalam wilayah kepentingan. Tetapi dilihat dari ciri-ciri sebagai kepentingan publik jelas sebagian dari kehidupan politik. Kepentingan umum, tentu memuat tujuan yang hendak dicapai secara kolektif, dalam memperjuangkan tujuan kolektif diperlukan kerja sama. Untuk mewujudkan kepentingan umum diperlukan organisasi atau kelompok pendukung.

Untuk memelihara kepentingan umum diperlukan sebuah aturan main. Dari contoh ini, tujuan kolektif kerja sama, organisasi dan aturan main merupakan elemen yang akan berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai proses pengaruh yang ditransformasikan oleh seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain mengikuti apa yang dikehendaki oleh yang mempengaruhi. Tanpa proses pengaruh dan mempengaruhi manusia tidak bisa digerakkan kepada suatu tujuan bersama, membina kerjasama dan membentuk organisasi. Bentuk pengaruh dalam bentuk kongkrit sering dikatakan sebagai kekuasaan, di mana pengaruh itu dapat dipaksakan baik secara persuasif maupun dengan paksa.

Membangun aliansi adalah sebagai usaha membangun pengaruh dan kekuatan untuk mempengaruhi pihak lain untuk tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud bisa diartikan sebagai upaya membangun dukungan, bisa juga untuk memperkuat kerja sama membentuk suatu kekuatan untuk keperluan atau tujuan yang hendak dicapai. Aliansi dapat dilakukan antara kelompok atau elit politik yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama.

Aliansi strategis berarti membangun kerja sama untuk meningkatkan pengaruh dan kekuatan dengan kelompok atau elit tertentu. Pengertian strategis memiliki pengertian kepada nilai pengaruh yang dimiliki oleh suatu kelompok yang diajak beraliansi. Nilai pengaruh ini bisa terjadi karena penguasaan sumber kelangkaan termasuk kekuasaan, kekuatan posisi, ekonomi, ilmu dan teknologi dan status sosial dalam struktur masyarakat.

Memenangkan kepentingan rakyat berarti apapun yang dilakukan oleh anggota dewan tetap yang menjadi pemegang utama adalah kepentingan rakyat. Hal ini adalah tolok ukur keberhasilan perjuangan seorang anggota dalam membina karier politiknya. Pelbagai usaha dapat dilakukan oleh seorang anggota dewan untuk membangun aliansi strategis guna memenangkan kepentingan rakyat.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan dasar teoretik sebagaimana dikemukakan di atas, maka kerangka pikir penelitian ini dideskripsikan ke dalam proses kerangka pikir penelitian sebagai berikut.

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap pemerintah daerah tingkat propinsi dan kabupaten/ kota wajib menyusun RPJPD untuk masa 20 tahun mendatang.
2. Menurut Pasal 13 dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 menjelaskan bahwa (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
3. Dalam rangka penyusunan RPJPD setiap kepala daerah bersama dengan DPRD hendaknya melakukan upaya penyusunan RPJPD dengan kekuatan hukum berupa (Perda), dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi bagi RPJPD Kabupaten/Kota serta memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG RPJPD.
4. Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
 - a. Penyiapan rancangan awal (draf) RPJPD yang dipersiapkan oleh pihak eksekutif.
 - b. Pelaksanaan MUSRENBANG merupakan salah satu proses pembahasan Perda RPJPD di tingkat kabupaten/kota.
 - c. Pembahasan draf Perda tentang RPJPD antara pihak eksekutif bersama pihak legislatif (DPRD) untuk dijadikan peraturan daerah.
5. Maksud sebuah penuturan sangat dipengaruhi oleh faktor konteks baik

konteks sosial, ekonomi dan budaya maupun konteks situasional dan motif dan strategi yang ingin dicapai oleh penutur, sehingga penafsirannya harus melibatkan konteks ketika ujaran itu diucapkan.

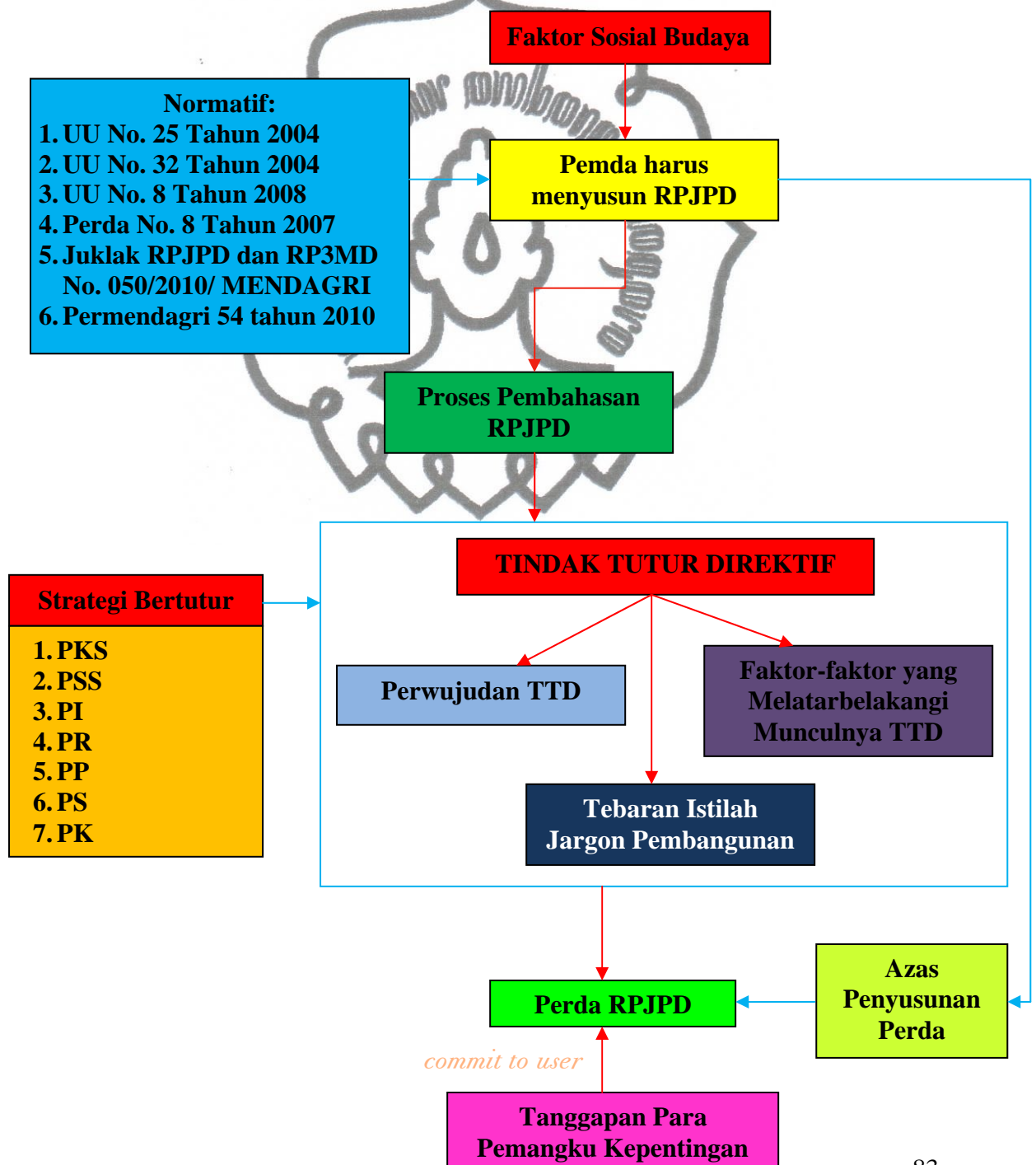
6. Bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat yang paling utama, di samping itu memang ada alat komunikasi lain, seperti: bunyi siulan, kinetik (bahasa isyarat), tanda-tanda lalu lintas, namun bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif.
7. Dalam menganalisis tuturan berdasarkan asumsi umum bahwa penutur dan mitra tutur saling memberi kesempatan bertutur dengan asumsi bekerja secara tekstual dan informasi situasional yang memungkinkan adanya simpulan yang sangat khusus tentang makna baik penutur maupun tuturan itu.
8. Setiap anggota masyarakat khususnya masyarakat Jawa diharapkan selalu berusaha ikut menjaga keseimbangan dalam kehidupan kesehariannya di dalam hal apa pun. Untuk menjaga keseimbangan itu, maka perlu menjaga kerukunan di antara sesama anggota masyarakat
9. Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur, sedangkan tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang dilakukan oleh penutur sendiri lantaran tuturan yang dibuat mengikat dirinya untuk melakukan tindakan sesuai dengan maksud yang dikehendakinya.

Berbicara pragmatik selalu berkaitan dengan cara masyarakat tutur menggunakan bahasa mereka: bagaimana tindak tutur diungkapkan di dalam suatu peristiwa tutur, yakni secara langsung atau tidak, strategi tutur yang mana yang dipilih, maksud penutur disampaikan melalui eksplikatur atau melalui implikatur dan sebagainya. Penggunaan bahasa dengan demikian, diatur oleh kondisi pragmatik, yaitu maksud penutur, motivasi yang memicu maksud itu, kepada siapa dia bertutur, di mana, tentang apa dan seterusnya. Namun demikian kondisi pragmatik ini “tertakluk” kepada nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Artinya, cara suatu tindak tutur diungkapkan, hal ini bergantung kepada termasuk *commit to user* warga budaya yang manakah si penutur

itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pragmatik, sebagai sub-disiplin linguistik, yang mempunyai hubungan yang erat dengan sosial budaya yang ada di masyarakat setempat.

Berdasarkan studi pustaka dan studi pendahuluan yang telah dilakukan sebagaimana dikemukakan di atas, maka kerangka pikir penelitian ini ilustrasikan ke dalam proses bagan penelitian sebagai berikut.

Bagan 2-1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tentang kajian pragmatik terhadap proses pembahasan peraturan daerah tentang RPJPD di Kabupaten Karanganyar dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dengan alasan antara lain Kabupaten Karanganyar yang saat ini belum memiliki dokumentasi RPJPD dan pada tahun 2008 sedang menyusun RPJPD. Oleh karena itu, Kabupaten Karanganyar yang dipilih sebagai lokasi penelitian.

3.2 Bentuk dan Strategi Penelitian

Dengan memperhatikan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yang lebih mengutamakan pada masalah penggunaan tindak tutur dalam proses penyusunan RPJPD, maka jenis penelitian dengan strateginya yang terbaik adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada masalah proses dan makna (Sutopo, 2006: 36). Artinya analisis dan interpretasi hasil penelitian sudah dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data tentang proses penyusunan *draft* Perda RPJPD. Bentuk angka–angka matematis, angka presentase dan angka tabel hanya digunakan sebagai temuan awal untuk kepentingan analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berarti bebas dengan atau tidak dengan angka–angka sama sekali. Angka–angka itu tetap diperlukan dalam kapasitasnya sebagai dasar dan untuk memperkaya temuan penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata–kata dan bahasa pada suatu konteks khusus

yang dialami seperti yang dikutip oleh Sutarno Haryono (dalam Moleong, 2007:6). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Peneliti mencatat dengan teliti dan cermat data yang berwujud kata-kata, kalimat, wacana, gambar–gambar/foto, catatan harian memorandum, video-tape. Dengan kata lain peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan pada indikator-indikator yang jadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti. Peneliti melakukan analisis data untuk membuat simpulan (Edi Subroto, 2007:8).

Pada penelitian ini sasarannya berupa data tertulis atau lisan dari orang–orang dan perilaku yang akan diamati, maka penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Selain itu, juga akan mempertimbangkan bahwa peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawancara serta informasinya akan berwujud data deskriptif, secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa adanya di lapangan (Sutopo, 2002:111). Dengan demikian penelitian kualitatif akan lebih mengutamakan deskripsi proses tentang mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi, yang mengarah pada pemahaman makna tindak tutur terhadap proses penyusunan perda tentang RPJPD. Untuk itu dalam melakukan analisisnya nanti harus berpikir secara holistik, artinya bila di lapangan nanti ada beragam variabel lain yang ada yang ditemukan meski bukan posisi yang terfokus selama tetap ada hubungan dengan variabel utamanya dan bila memiliki posisi yang sangat penting juga perlu dibuat deskripsi penjelasannya.

Strategi yang digunakan yaitu studi kasus tunggal (satu karakteristik objek), karena penelitian ini akan terarah pada satu karakteristik tindak tutur terhadap proses penyusunan perda RPJPD untuk tingkat kabupaten. Mengingat lokasi di Kabupaten Karanganyar nanti sasarannya pada proses penyusunan perda RPJPD pada tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten yang akan dibuat unit analisis sendiri–sendiri pada tingkat kecamatan, yang selanjutnya akan disatukan dalam analisis antar unit untuk menemukan simpulan secara utuh/ lengkap.

commit to user

Dalam penelitian ini, masalah yang diungkap selain berada di dalam kesatuannya, tidak terlepas dari kondisi yang lain yang menyatu dalam suatu konteks. Sebab berbagai variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini tidak bisa dikaji dan dipahami secara terpisah dari posisi dan keterkaitan dalam konteks keseluruhannya, yang meliputi faktor genetik, faktor objektif, dan faktor afektif dan akan diketahui makna pragmatiknya terhadap proses penyusunan Perda RPJPD tersebut.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data di dalam penelitian ini adalah informan dan aktivitas serta dokumen/ arsip yang terkait dengan tindak tutur hubungannya dengan proses penyusunan RPJPD di tingkat kabupaten. Berbagai data dan informasi sangat diperlukan guna memecahkan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Berbagai sumber data telah ditentukan sebagai titik tolak pencarian data, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi sumber data yang diperoleh secara insidental. Maksudnya adalah sumber data yang didapatkan secara spontan dan bukan dari narasumber yang telah ditentukan, melainkan secara kebetulan dan sekelompok orang yang sedang membicarakan terkait dengan data yang diperlukan. Hal ini akan terjadi perolehan data yang beragam, keragaman informasi akan melengkapi kemantapan analisis yang lebih akurat. Beragam sumber data dikelompokkan jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata sampai dengan yang paling samar-samar, dan mulai dari yang paling terlibat sampai dengan yang bersifat sekunder (Sutopo, 2006:57).

Data yang akan dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini menggunakan pendekatan parsial di mana pendekatan ini hanya meliputi, faktor obyektif dan sekilas tanggapan masyarakat terhadap perda RPJPD sedangkan jenis datanya bersifat kualitatif. Sumber data dan sasaran penelitian yang akan digali dan dimanfaatkan meliputi:

Latar Belakang Penyusunan RPJPD

commit to user

Pada tahap ini informasi/data yang akan dikumpulkan yaitu latar belakang atau alasan penutur menggunakan jenis tuturan direktif dalam proses pembahasan penyusunan Perda RPJPD sejak dari tingkat desa sampai pembahasan di DPRD dan proses dalam mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah. Disamping itu, secara normatif dasar hukum perlunya pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) harus menyusun RPJPD. Landasan hukum yang digunakan yaitu Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang–Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu juga dapat dijadikan sumber data yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 dan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 23 Tahun 2008 tentang RPJPD Propinsi Jawa Tengah serta Perda No. 8 Tahun 2007 Kabupaten Karanganyar tentang tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelaksanaan MUSRENBANG Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses Pembahasan RPJPD

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu **Proses Pembahasan Perda RPJPD** sejak dari tingkat desa sampai ditetapkannya draft Perda RPJPD menjadi Perda. Pada Tahap Proses Pembahasan Perda untuk memperoleh informasi tentang bentuk-bentuk tindak tutur direktif, dan bagaimana tindak tutur direktif diwujudkan/ diungkapkan dalam proses pembahasan Perda–RPJPD yang dipersiapkan oleh pihak eksekutif. **Untuk itu, data penelitian yang digali lebih lanjut atau yang diteliti atau yang dikumpulkan yaitu tuturan yang bersifat direktif dalam proses pembahsan RPJPD baik di eksekutif maupun legislatif.**

3.4 Sumber Data

1. Untuk tingkat desa, yaitu aktivitas tuturan proses pembahasan Perda RPJPD, di mana di tingkat desa diselenggarakan bersamaan dengan

commit to user

Musrenbangda tingkat desa untuk jumlah desa yang diambil ada 3 desa yang kriterianya sebagai berikut :

- 1.1 **Desa Dagen**, Kecamatan Jaten, mewakili desa yang maju mempunyai skor IPD-nya (Indeks Pembangunan Desa) tertinggi sebesar 7.9972. Di samping itu, dilihat dari aspek sosial budaya mewakili desa yang berada di dekat kota, sehingga diharapkan akan dapat mewakili pola tuturan masyarakat desa yang maju.
- 1.2 **Desa Karangbangun**, Kecamatan Matesih, mewakili desa yang dikategorikan desa pada perkembangan tingkat sedang yang mempunyai skor IPD-nya sebesar 3.1025 dalam kategori sedang untuk tingkat Kecamatan Matesih. Dari aspek sosial budaya, desa-desa ini dapat mewakili daerah pedesaan yang rural-urban (desa-desa yang baru berkembang), sehingga akan dapat mengetahui kebiasaan bertutur dalam acara menyusun program pembangunan (Musrenbangda) di desa-desa ini.
- 1.3 **Desa Jatikuwung**, Kecamatan Gondangrejo, mewakili desa yang dikategorikan desa pada perkembangan pada tingkat rendah yang mempunyai skor IPD-nya sebesar 0,0333 dalam kategori rendah untuk tingkat Kecamatan Gondangrejo. Dari aspek sosial budaya mewakili desa-desa yang berada di daerah yang belum maju (*rural-comunity*). Dengan harapan akan dapat mengetahui kebiasaan bertutur masyarakatnya dalam ikut menyusun program pembangunan daerahnya khususnya jenis tuturan direktif. Untuk itu **informannya** dalam tahap ini yaitu semua peserta Musrenbangda tingkat desa termasuk Seksi PMD dan pengelola P2KP/PNPM tingkat kecamatan utamanya yang menggunakan jenis tuturan direktif dalam membahas proses pembahasan RPJPD.

Keterangan:

Indeks Pembangunan Desa. Indeks ini diperoleh dari hasil dekomposisi 4 sub-indeks, yaitu (1) IKpp (Indeks Kapasitas pemerintahan), (2) IPKW (Indeks Perkembangan Wilayah), (3) IKbM (Indeks Keberdayaan Masyarakat), (4) IKsM (Indeks Keswadayaan Masyarakat), sehingga dirumuskan $IPD = (0,249 \times IKpp) + (0,279 \times IPKW) + (0,251 \times IKbM) +$

(0,221x IksM). Dengan demikian skor yang dihasilkan IPD akan dapat mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan di suatu desa tersebut dengan skala 0 sampai dengan 10.

2. Untuk Tingkat Kecamatan dipilih 3 Kecamatan, data yang dikumpulkan yaitu: informasi yang berkaitan dengan jenis tuturan direktif dalam proses pembahasan RPJPD.

2.1 Kecamatan Jaten dipilih dengan pertimbangan :

- 1) Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah–RT/RW–Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi 3 wilayah yaitu wilayah timur, wilayah tengah dan wilayah barat. Untuk itu dipilihnya Kecamatan Jaten mewakili wilayah Kabupaten Karanganyar bagian tengah.
- 2) Kecamatan Jaten yang dipilih mewakili kecamatan yang skor IPK-nya (Indeks Pembangunan Kecamatan) tertinggi 4.610.
- 3) Dilihat dari IKpP (Indeks Kapasitas Pemerintahan) Kecamatan Jaten juga mewakili kecamatan yang skornya tertinggi yaitu 3.716.
- 4) Kecamatan Jaten dipilih berdasarkan IKbM (Indeks Keberdayaan Masyarakat) juga memiliki skor tertinggi sebesar 0,745.

2.2 Kecamatan Matesih dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Mewakili kecamatan di bagian timur yang tanahnya perbukitan dan pegunungan yang sebagian besar penduduknya bekerja dalam bidang pertanian sayuran dan perkebunan serta peternakan.
- 2) Mewakili kecamatan yang skor IPK-nya sedang yaitu 3.0180.
- 3) Mewakili kecamatan yang IKpP-nya sedang 2.5510.
- 4) Mewakili Kecamatan yang skor IKbM-nya sedang yaitu 0,1415.

2.3 Kecamatan Gondangrejo dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Mewakili kecamatan di bagian barat yang kondisi wilayah tanahnya gersang dan jumlah penduduk miskinnya paling banyak dibandingkan jumlah penduduk miskin yang ada di kecamatan lainnya.
- 2).Mewakili kecamatan yang skor IPK-nya paling rendah yaitu 1.6052.
- 3) Mewakili kecamatan yang skor IKpP-nya paling rendah 1.4128.
- 4) Mewakili kecamatan yang skor IKbM-nya paling rendah yaitu 0.0772.

Penjelasan :

- a) Indeks Pembangunan Kecamatan. Indeks ini diperoleh dari hasil penghitungan rata-rata indeks total dari Indeks Pembangunan Desa (IPD) di masing-masing kecamatan, sehingga dapat dikatakan sebagai Indeks total tingkat kecamatan.
- b) Indeks Kapasitas Pemerintahan (IKpP). Indeks ini diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata IKpP di sejumlah desa dalam satu kecamatan. Indeks IKpP ini diperoleh dari (1) Indeks Kapasitas Aparat (IKA), (2) Indeks Keuangan Daerah (IKD), (3) Indeks sarana dan prasarana Pemerintahan (ISP), sehingga dirumuskan IKpP yang terdiri dari $(0,383 \times IKA) + (0,334 \times IKD) + (0,283 \times ISP)$
- c) Indeks Keberdayaan Masyarakat (IKbM). Indeks ini diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata IKbM di sejumlah desa dalam satu kecamatan. Indeks IKbM ini diperoleh dari hasil dekomposisi 3 subindeks yaitu: (1) Indeks Kependudukan dan Ketenagakerjaan (IKK), (2) Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM), (3) Indeks Sosial Politik dan Budaya (ISB), sehingga dirumuskan IKbM yaitu: $(0,231 \times IKK) + (0,527 \times ISM) + (0,147 \times ISB)$.

Kaitanya dengan pertimbangan sosial budaya yang menjadi faktor penting berkaitan dengan tindak tutur. Bagi daerah atau kecamatan yang indek pembangunannya tinggi mungkin memiliki karakteristik bertutur sendiri lebih terbuka dan demokratis. Sedangkan di kecamatan yang sedang atau kurang maju karakteristik bertuturnya kemungkinan akan lebih tertutup bahkan keras atau hanya manut saja. Untuk itu pentingnya mengambil lokasi yang bervariasi ini diharapkan akan mendapatkan **variasi bertutur** dalam menanggapi proses penyusunan RPJPD dalam menuju perda. Untuk itu yang menjadi informannya yaitu seluruh peserta MUSRENBANG tingkat kecamatan utamanya yang menggunakan jenis tuturan direktif dalam proses membahas pembahasan RPJPD.

commit to user

3. Proses Pembahasan Perda RPJPD tingkat Kabupaten ada 2 jenis yaitu:

a. Di lingkungan eksekutif

Kegiatan ini biasanya diselenggarakan pihak eksekutif meliputi proses pembahasan draft Perda RPJPD maupun ekspos dengan khalayak baik itu berupa seminar, diskusi ataupun FGD yang melibatkan semua “pemangku kepentingan”, tokoh masyarakat, tokoh ormas dan tokoh politik yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Jenis data yang dikumpulkan semua informasi yang terkait dengan proses pembahasan draf RPJPD yang menggunakan jenis tuturan direktif. Untuk itu, yang menjadi informan yaitu semua peserta yang terlibat dalam proses pembahasan RPJPD yang menggunakan jenis tuturan direktif baik di kalangan SKPD maupun LSM.

b. Di lingkungan eksekutif dan legislatif (DPRD)

Kegiatan ini diselenggarakan setelah Perda RPJPD dibahas antara pihak eksekutif dengan DPRD setempat. Pembahasan draft perda ini biasanya cukup panjang diawali dari penyerahan draft perda dari bupati kepada DPRD kemudian dilanjutkan pembentukan Pansus Perda. Anggota pansus ini yang bertugas secara intensif membahas draft perda. Setelah dipandang cukup baik dilaporkan kepada rapat paripurna di DPRD setempat. Untuk itu, data yang dikumpulkan pada tahap ini informasi jenis tuturan direktif yang dilakukan oleh semua peserta yang terlibat dalam proses pembahasan draf Perda RPJPD. Oleh karena itu, informan yang terlibat dalam jenis tuturan direktif dalam proses pembahasan draf Perda RPJPD.

4. Proses Pembahasan Perda RPJPD di tingkat propinsi.

Pembahasan ini menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional setelah draft Perda RPJPD dibahas bersama DPRD kabupaten dan bila DPRD kabupaten sudah menyetujui hanya belum ditetapkan menjadi perda sebelum mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah. Untuk data yang kumpulkan pada tahap ini yaitu mengkaji jenis tuturan direktif proses pembahasan draft perda

RPJPD antara pihak kabupaten dengan tim review propinsi (Gubernur–Bappeda propinsi dan atau Biro Hukum propinsi). Setelah ada persetujuan/ dikonsultasikan dengan Gubernur Jawa Tengah, draft perda RPJPD kabupaten tersebut baru ditetapkan menjadi perda RPJPD kabupaten (daerah) dalam sidang paripurna di tingkat DPRD kabupaten. Dengan demikian yang menjadi sumber data pada tahap ini yaitu selain tim review Bappeda propinsi dan tim review Biro hukum propinsi yang menggunakan jenis tuturan direktif dalam membahas draf perda RPJPD tersebut.

Tanggapan Pemangku Kepentingan

Tanggapan pemangku kepentingan, yaitu terfokus pada dampak dan tanggapan “*pemangku kepentingan*” terhadap bahasa Perda RPJPD, secara tidak langsung memberikan penilaian, sehingga penilaian itu sebagai persepsi untuk dilakukan dengan konsep pengembangan yang mengarah pada kemandirian di dalam Penyusunan Perencanaan Daerah dalam waktu jangka panjang. Adapun sumber informasinya antara lain : Pengurus KADIN, LSM, dari unsur Perguruan Tinggi Swasta, Dewan Pendidikan, anggota DPRD, dari aspek Organisasi Kemasyarakatan, aspek organisasi kewanitaan dan kepala SKPD serta beberapa tokoh masyarakat yang pada waktu proses pembahasan RPJPD terlibat di dalamnya.

Data yang dibutuhkan pada kegiatan ini yaitu dampak produknya atau tanggapan beragam pengamat, “*pemangku kepentingan*” terhadap bahasa perda RPJPD setelah ditetapkan menjadi perda. tentang RPJPD di Kabupaten Karanganyar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data sebenarnya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang ingin diperoleh. Pemilihan teknik pengumpulan data berkaitan erat dengan rancangan penelitian yang dipilih. Sekalipun tidak mutlak, pada penelitian kualitatif biasanya lebih banyak didominasi oleh teknik pengumpulan data *commit to user* interview atau wawancara dan pengamatan

langsung. Menurut Edi Subroto (2007) menekankan bahwa data yang dipergunakan dari berbagai sumber dan berbagai teknik itu dipergunakan secara bersama, saling mengontrol, saling melengkapi dan saling menguntungkan. Menurut Slamet (2006:85), dari berbagai macam teknik pengumpulan data yang ada tidak lain hanyalah semacam “tongkat”. Sebab pada praktiknya pengumpulan data lebih merupakan seni. Instrumen utama dari pengumpulan data adalah penelitiannya dengan ketrampilan mengolah naluri dan kepekaan. Dengan demikian, seorang peneliti adalah orang yang memiliki naluri meneliti dan orang yang memiliki kepekaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Wawancara Mendalam

Jenis pengumpulan data ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal. Arah pertanyaan akan terfokus, sehingga informai yang bisa dikumpulkan semakin rinci dan mendalam. Kelonggaran dan kelenturan cara ini akan mampu mengarah keobyektifan informasi dalam menghasilkan informasi yang benar. Metode wawancara mendalam bersifat deskriptif dan eksplanatori, dengan metode ini si peneliti berusaha menjaring informasi deskriptif mengenai fakta atau fenomena (sosio) linguistik, dan di samping itu berupaya menggali informasi yang berupa penjelasan mengenai munculnya fakta dan fenomena itu. Di sinilah letak kerumitan penggunaan wawancara mendalam dibandingkan dengan metode wawancara biasa. Menurut Wiseman dan Aron (1970:27), dengan menggunakan metode wawancara mendalam itu, peneliti dituntut untuk dapat menyelami intensitas perasaan orang yang diwawancarai mengenai fenomena sosial, “kerumitan” yang dimaksudkannya dengan fenomena itu, serta bagaimana orang itu mengaitkannya dengan bidang-bidang lain dari kehidupan sosialnya. Dengan memberi informan kesempatan menjawab secara terbuka, informan memberikan penilaian atas sikap orang lain dan bagaimana hal ini mempengaruhi sikap serta perilaku mereka. Ini semua harus dapat dijaring

oleh pewawancara, termasuk informasi yang diperoleh dari uraian mengenai peristiwa masa lalu, yang di dalam metodologi sering disebut data longitudinal restrospektif. Menurut Wisememan, bakat dan keterampilan merupakan kunci keberhasilan penggunaannya, apalagi jika peneliti menjumpai bahwa ada informan yang tidak “suka” berbicara dan hanya memberi jawaban-jawaban sepotong-potong serta pendek-pendek. Peneliti dalam hal ini harus dapat “merampatkan” inti sari jawaban dari keseluruhan ujaran informan. Keuntungan menggunakan wawancara mendalam ini teknik ini cukup fleksibel. Kelemahannya adalah bahwa teknik ini, berbeda dengan teknik kuesioner, survei, tidak dapat menjangkau informan potensial dalam jumlah yang besar tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, waktu dan tenaga.

Wawancara mendalam akan dilakukan kepada semua informan:

- 1) Ketua Bappeda selaku penanggung jawab penyusunan draft Perda RPJPD tingkat kabupaten. Untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang pembahasan draft Perda RPJPD, fungsi dan pesan makna serta bentuk tuturan yang akan dinarasikan dalam draft Perda RPJPD.
- 2) Ketua Tim Penyusun Draft Perda RPJPD tingkat Kabupaten. Pada fase ini diharapkan untuk mendapatkan informasi tentang proses pembahasan draft Perda RPJPD, bentuk-bentuk tuturan direktif dan mengungkapkan tuturan dalam menanggapi draft Perda RPJPD.
- 3) Ketua pansus pembahasan/pembahasan draft perda RPJPD di DPRD. Kegiatan ini untuk mendapatkan informasi tentang proses pembahasan perda, bagaimana tindak tutur direktif diungkapkan dalam membahas perda tersebut.
- 4) Ketua review perda RPJPD Propinsi Jawa Tengah, untuk mendapatkan informasi tentang proses persetujuan perda RPJPD dari gubernur, bentuk tindak tutur direktif dan makna yang harus terkandung dalam RPJPD.
- 5) Ketua MUSRENBANG tingkat kecamatan. Pada fase ini untuk mendapatkan bentuk tindak tutur direktif yang muncul dan bentuk

commit to user

pengungkapannya dalam menanggapi atau mengusulkan program pada tahap proses penyusunan draft Perda RPJPD.

- 6) Kepala desa selaku penanggung jawab pelaksanaan MUSRENBANG di tingkat desa untuk mempertajam data tentang tindak tutur direktif dalam menanggapi proses penyusunan RPJPD di tingkat desa.
- 7) Kepala SKPD, tokoh masyarakat, Ketua LSM setempat yang dahulu ikut membahas draft RPJPD dan tanggapan utamanya bahasa Perda RPJPD Kabupaten Karanganyar.

2. Observasi Langsung

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat nonverbal. sekalipun dasar utama dari pada metode observasi adalah penggunaan indera. Dalam observasi ini peneliti akan mengamati secara langsung proses pelaksanaan sejak dari proses penyusunan draft Perda RPJPD sampai tingkat pembahasan perda tersebut. Observasi ini dilakukan dengan cara formal dan informal. Untuk mengamati lebih tajam terhadap berbagai peristiwa dan kegiatan yang terjadi pada saat kegiatan tersebut, dalam observasi ini juga akan dilakukan teknik simak dengan dasar cakap, rekam, dan pengamatan terlibat pasif.

Observasi langsung kegiatan pengumpulan data yang bersifat non verbal di mana peneliti tidak berperan ganda. Peneliti berperan sebagai pengamat belaka. Dalam hal ini peneliti tidak turut serta sebagai aktor yang melibatkan diri di dalam suatu kegiatan. Langkah-langkah dalam observasi langsung yaitu:

a) Menemukan tujuan penelitian

Tidak ada peneliti yang berangkat ke lokasi penelitian tanpa tujuan yang jelas mengenai tema penelitian. Peneliti sebelum ke lokasi penelitian menetapkan tema yang hendak diteliti. Sumber tema itu bisa diperoleh dari berbagai sumber informasi.

b) Menentukan kelompok subjek yang akan diobservasi

Subjek penelitian adalah pelaku atau aktor yang memberikan data hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Orang yang diamati

oleh peneliti bukanlah individu tunggal, melainkan sejumlah orang yang menjadi aktor sejumlah orang itu memberikan data nonverbal hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.

c) Menerobos masuk ke kelompok subjek yang diteliti.

Peneliti yang tidak mengerti bahasa dari subjek-subjek yang diteliti ibaratnya seorang tuli yang menonton pesta musik. Untuk itu hambatan dapat juga datang dari ketidakmampuan peneliti menterjemahkan budaya masyarakat yang diteliti.

d) Mengakrabkan dengan subjek yang diteliti

Mengakrabkan diri dengan subjek yang diteliti bukan hal yang mudah. Penelitian yang menggunakan teknik observasi mengisyaratkan bahwa peneliti adalah alat atau instrumen penelitian.

e) Melakukan penelitian dengan mengamati dan mencatat keadaan lapangan dalam jangka waktu tertentu

Setelah peneliti berhasil memperoleh ijin dari masyarakat atau kelompok yang hendak diteliti dan telah akrab dengan situasi maupun dengan orang-orang anggota masyarakat kemudian peneliti mengamati dan mencatat hasil pengamatan.

f) Keluar dari penelitian

Bila seluruh data yang diperlukan dan penelitian dianggap sudah selesai, selanjutnya peneliti meninggalkan lokasi penelitian sambil mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadanya dan mohon maaf bila ada kesalahan.

g) Menganalisis data

Setelah peneliti memperoleh sejumlah data hasil pengamatan, langkah selanjutnya ialah menyusun hasil pengamatan itu ke dalam suatu sistematika sesuai dengan topik penelitiannya. Lofland menganjurkan, sekalipun kita telah diketahui sebagai peneliti, aturan yang baik ialah jangan mencatat dengan cara yang merugikan bila mengambil catatan di lapangan. Dengan demikian dapat dikatakan observasi langsung berperan pasif ini akan dilakukan formal dan informal untuk mengamati berbagai kegiatan yang

dilakukan dalam proses penyusunan Perda tentang RPJPD sejak dari Musrenbang tingkat desa, Musrenbang tingkat kecamatan, penyusunan tingkat kabupaten, pembahasan di DPRD serta proses konsultasi di Propinsi Jawa Tengah.

3. Mencatat dokumen

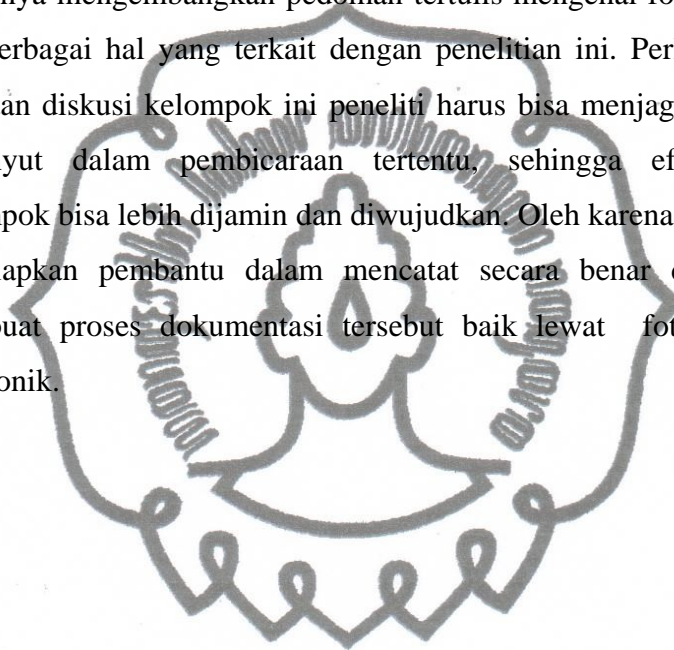
Dokumen dan arsip biasanya merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan peristiwa atau aktivitas tertentu (Sutopo, 2006: 61). Data tertulis yang berupa dokumen atau arsip yang terkait dengan peristiwa penyusunan Perda RPJPD baik dari tingkat pusat (di Depdagri yang berupa Juklak Musrenbang dan Juklak penyusunan RPJPD dan RPJM yang biasanya dikeluarkan oleh Kantor BAPPENAS) sampai dokumentasi tingkat desa.

Dokumen yang sifatnya tidak tertulis yang terkait dengan penyusunan Perda RPJPD, yang berupa audio, antara lain beragam kaset ataupun CD, dokumentasi elektronik dan foto-foto kegiatan proses penyusunan Perda RPJPD. Fungsi sumber data yang berupa dokumen dan arsip tersebut akan peneliti gunakan sebagai analisis tambahan untuk mencermati tentang makna pragmatik dalam proses penyusunan RPJPD. Menurut Sutopo (2006: 62) dalam mengkaji dokumen peneliti sebaiknya tidak hanya mencatat yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap makna yang tersirat dari dokumen tersebut. Di samping itu, dalam mengkaji dokumen dan arsip peneliti perlu mencermati/menguji keaslian dokumen tersebut. Pengujian bisa lewat kesaksian seseorang yang mengetahuinya atau dengan mengkaji beragam aspek formalnya. Termasuk isi dokumen dan arsip isinya benar atau tidak.

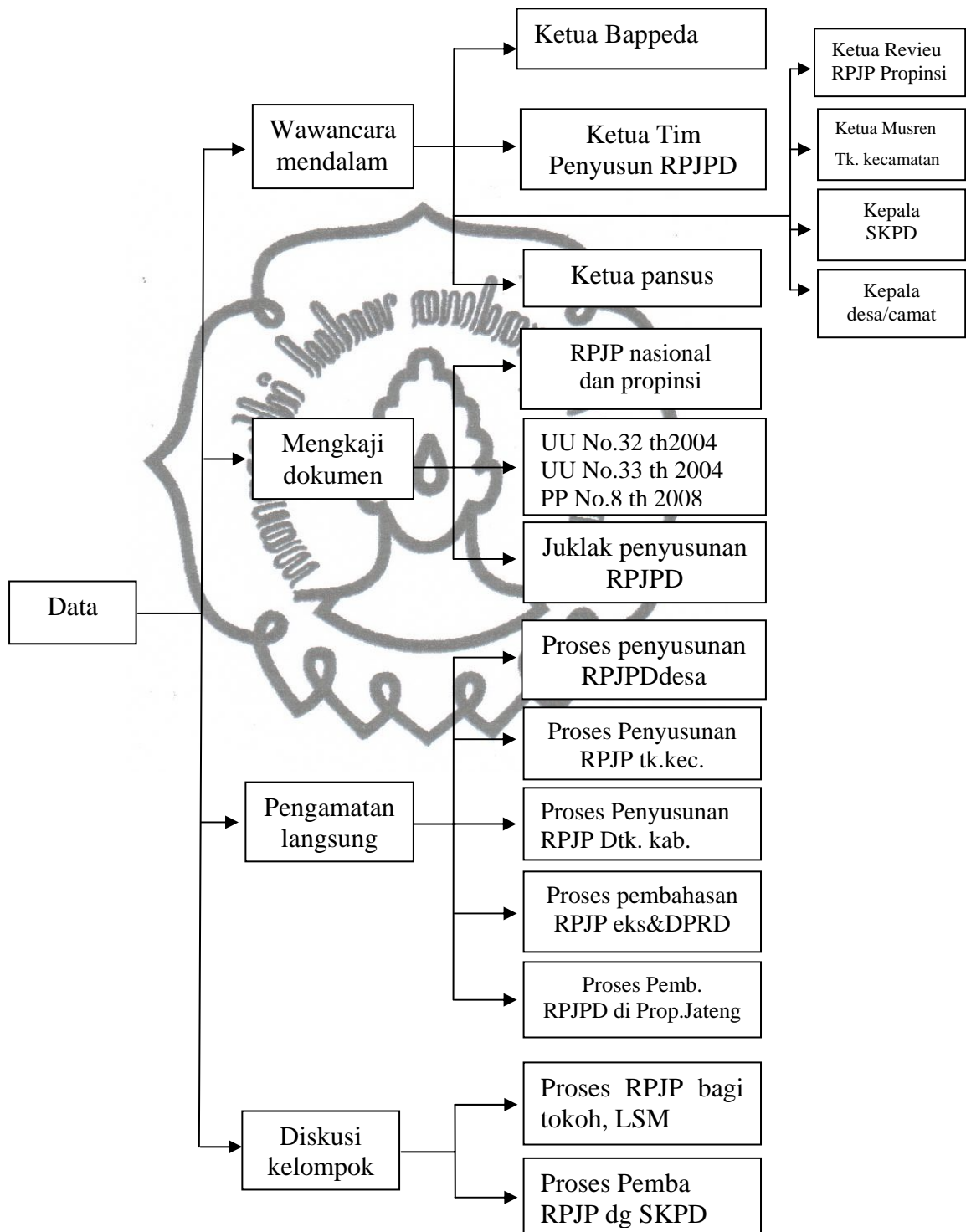
4. Dilakukan diskusi kelompok

Diskusi kelompok diselenggarakan dalam rangka mempertajam data yang telah diperoleh dengan metode yang lain. Teknik diskusi kelompok ini sangat bermanfaat dalam menggali data terutama mengenai sikap, minat, motivasi dan latar belakang mengenai sesuatu kondisi utamanya dari aspek pragmatiknya. Pada dasarnya diskusi kelompok ini merupakan cara

wawancara kelompok, dan data yang diperoleh sekaligus sudah merupakan data yang lebih mantap karena sudah dibahas oleh banyak nara sumber sebagai anggota diskusi kelompok. Untuk peserta diskusi kelompok ini kriterianya betul-betul dipilih orang yang menguasai permasalahan tentang penyusunan dokumentasi pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaan diskusi kelompok peneliti juga sudah melakukan persiapan sebelumnya, utamanya mengembangkan pedoman tertulis mengenai fokus permasalahan dan berbagai hal yang terkait dengan penelitian ini. Perlu disadari dalam kegiatan diskusi kelompok ini peneliti harus bisa menjaga diri untuk tidak terhanyut dalam pembicaraan tertentu, sehingga efektivitas diskusi kelompok bisa lebih dijamin dan diwujudkan. Oleh karena itu, peneliti harus menyiapkan pembantu dalam mencatat secara benar dan lengkap dan membuat proses dokumentasi tersebut baik lewat foto maupun video elektronik.



Bagan di bawah ini merupakan teknik pengumpulan data yang dipilih, sekaligus menjelaskan keterkaitannya dengan sumber datanya.



Bagan ke 3-1: Bagan hubungan teknik pengumpulan data dengan sumber data.

commit to user

3.6 Teknik Cuplikan (sampling)

Cuplikan atau sampling berkaitan dengan pemilihan dan pembatasan jumlah serta jenis dari sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Pemikiran mengenai teknik cuplikan ini hampir tidak bisa dihindari oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, mengingat selalu terdapat beragam keterbatasan yang dihadapi peneliti, baik menyangkut waktu, tenaga dan biaya (Sutopo, 2006:62). Terutama penelitian kualitatif cenderung menggunakan teknik cuplikan yang bersifat selektif dengan pertimbangan konsep teoretis yang digunakan, keingintahuan pribadi peneliti, karakteristik empirisnya dan lain-lain (Goetz dan Le Compte dalam Sutopo, 2006:229). Untuk itu dalam penelitian kualitatif, teknik cuplikannya cenderung bersifat purposif karena dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data di dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal atau yang sangat kompleks. Kesahihan perolehan informasi dari sumber data sangat membantu untuk menentukan kualitas data, maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber yang betul-betul mampu dan memiliki kontribusi dalam proses penyusunan RKPDD untuk tingkat kabupaten. Dengan demikian peneliti dituntut memahami peta sumber yang tersedia, dalam beragam posisinya, karena setiap posisinya akan memiliki akses informasi yang berbeda. Metode purposif sampling memberikan kesempatan secara maksimal pada kemampuan peneliti untuk menyusun teori yang dibentuk dari lapangan dengan sangat memperhatikan kondisi lokal. Cuplikan ini kedudukannya tidak mewakili populasi tetapi mewakili informasinya, sehingga bilamana generalisasi harus dilakukan, maka arahnya cenderung sebagai generalisasi teori (Sutopo, 2006). Oleh karena itu, informasi yang dibutuhkan dipilih berdasarkan kredibilitas, kualitas, dan keluasan wawasan dalam suatu permasalahan yang dikaji, sehingga informasi yang diperoleh betul-betul berkualitas dan sah. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini peneliti memilih informan yang diharapkan mampu memberikan informasi yang memiliki kedalaman dan keakuratan data guna menjawab permasalahan yang diajukan secara valid dan berkualitas.

Dalam penelitian ini, pada prinsipnya peneliti akan memilih informan yang dipandang paling tahu dan ada kaitannya dengan masalah penelitian ini, sehingga kemungkinan besar pilihan informan dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data (Patton, 1980), Metode semacam ini lebih sering sebagai internal sampling artinya peneliti diberi kesempatan untuk mengambil keputusan, bila peneliti mempunyai suatu pikiran umumnya yang ada di lapangan mengenai yang sedang dipelajari, dengan siapa sebaiknya harus bicara dan ke permasalahan observasi yang lebih tepat.

3.7 Validitas Data

Validitas dalam penelitian kualitatif ini juga sangat diperhitungkan. Validitas adalah suatu nilai kebenaran (*truth value*) dari suatu penelitian. Validitas artinya dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian kualitatif, validitas mengacu ke kebenaran dan keakuratan temuan–temuan penelitian, sejauh mana temuan–temuan tersebut secara akurat merefleksikan tujuan penelitian dan dapat mewakili realitas yang diteliti. Validitas dan realibilitas menjadi pedoman kebenaran dan otentik penelitian.

Validitas dibagi dua yaitu internal dan eksternal. Validitas internal mengacu ke laporan peneliti yang menampilkan realitas dari para partisipan melalui alur tulisan yang koheren dan kutipan–kutipan dari wawancara. Deskripsi laporan tersebut dilakukan secara detail atas pengambilan keputusan dan catatan–catatan lapangan lainnya, sehingga dapat menjadi bukti yang menjelaskan kondisi partisipan dan situasi sebenarnya.

Validitas eksternal mengacu ke kemampuan generalisasi dari penelitian (*generalisability*) yang dapat diterapkan pada situasi lain yang serupa. Hal ini menuntut pentingnya deskripsi yang rinci dalam penelitian, sehingga peneliti lain dapat memperoleh pengetahuan yang cukup untuk melakukan penilaian–penilaian. Ukuran validitas penelitian kualitatif lainnya adalah konsep layak dipercaya dan otentitas. Penelitian kualitatif akan layak dipercaya apabila penelitian tersebut mampu mencerminkan

realitas dan ide-ide dari partisipannya. Keadaan layak dipercaya dari suatu penelitian kualitatif seperti (Lincoln dan Guba, Holloway: dalam Jumanto, 2006:56) mencakup elemen-elemen kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas (*dependability*) dan konfirmabilitas.

Edi Subroto (2007:38) menyatakan bahwa data itu sah kalau data itu benar-benar sesuai dengan masalah yang diteliti dan ajek kalau data itu terdapat secara menyakinkan pada beberapa sumber atau setelah diuji dengan pemakaian beberapa teknik. Pernyataan itu menunjukkan adanya kesahihan data yang harus dipertanggungjawabkan dan tentu saja data yang betul-betul akurat dan terpercaya.

Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang akan dalam penelitian ini, teknik pengembangan validitas data yang biasa yang dalam penelitian kualitatif yaitu teknik triangulasi yang ditawarkan Patton, (dalam Sutopo, 2006:92). Ada 4 macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data, (2) triangulasi peneliti, (3) triangulasi metodologis, (4) triangulasi teoretis. Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 triangulasi yaitu triangulasi data dan triangulasi metode, untuk lebih jelasnya dapat diikuti penjelasan berikut. Triangulasi data atau sumber mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data artinya data yang sejenis akan lebih mantab kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Untuk mengetahui makna tuturan dalam proses penyusunan Perda RPJPD dapat diamati langsung pada saat pembahasan di DPRD, dapat juga dilakukan wawancara mendalam dengan anggota tim penyusun, Ketua Pansus Pembahasan Perda RPJPD atau dengan ketua Bappeda setempat. Dengan demikian dengan cara membandingkan untuk melihat persamaan, perbedaan kemudian mencari alasan dari masing-masing untuk mendapatkan simpulan yang memadai.

Triangulasi metode dalam penelitian kualitatif mengarah pada perbedaan teknik. Di sini yang *commit to user* diutamakan adalah penggunaan metode

pengumpulan data yang berbeda, bahkan lebih jelasnya untuk diusahakan mengarah sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya.

3.8 Teknik Analisis

Karakteristik metodologi penelitian kualitatif, metode analisisnya bersifat induktif. Dalam arti analisisnya sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi semua simpulan yang dibuat sampai dengan teori yang mungkin dikembangkan, dibentuk dari semua data yang telah berhasil dikumpulkan di lapangan. Selain itu, bagi kemantapan dan pendalaman data proses yang dilakukan selalu dalam bentuk siklus.

Unit analisis dalam penelitian adalah tiap tingkatan pemerintahan (tingkat desa, kecamatan, dsb). Proses analisis dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data dalam bentuk refleksi. Karena penelitian ini akan dilakukan pada 4 tingkat pemerintahan dari tingkat desa sampai tingkat propinsi. Secara garis besar teknik analisa atau dalam penelitian ini menggabungkan model analisa domain, taksonomi, komponen sial dan tema (Spreadley; 1980 yang dikutip Rudi Hartono, 2011:86) dan model analisis interaktif Miles dan Huberman, 1994 (dalam Sutopo, 2006). Maka teknik analisisnya yang akan digunakan adalah analisis antar unit/kasus (*cross site analysis*). Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasinya, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Aktivitas dalam bentuk interaktif tersebut dilakukan baik pada analisis setiap unit kasus maupun pada analisis antar unit, untuk memahami kesamaan dan juga perbedaannya. Dalam melaksanakan proses ini aktivitas peneliti tetap selalu bergerak di antara komponen analisis dengan pengumpulan data selama proses pengumpulan data masih berlangsung (Slamet, 2006:140).

Dengan demikian dalam penelitian ini analisis datanya menggunakan dua teknik analisis sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Secara garis besar teknik analisis data dalam penelitian ini menggabungkan Model

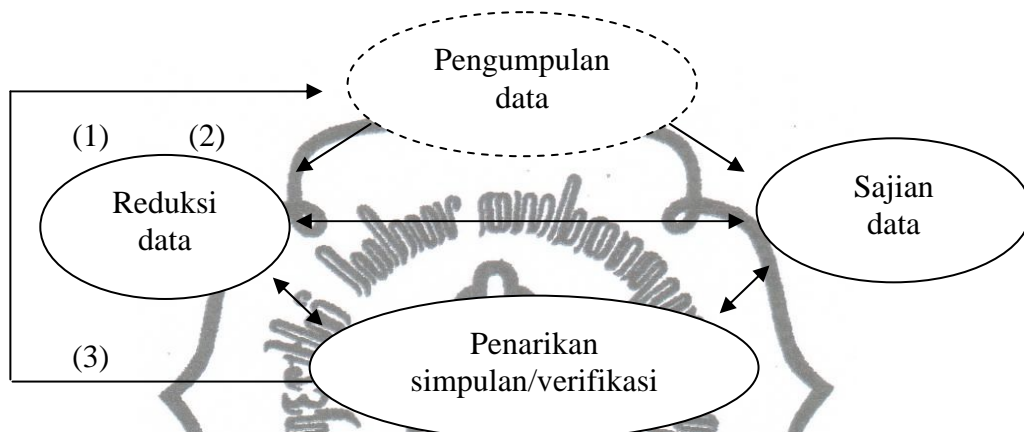
Taksonomi (Spradley, 1980), Model Interaktif (Miles & Huberman, 1944). Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan tiga kategori analisis, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial. **Tahap pertama**, data dan informasi dari setiap faktor dikumpulkan wawancara mendalam dengan para pemuka kepentingan yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data dari para pemuka kepentingan dan tokoh-tokoh masyarakat (Faktor afektif) yaitu tanggapan pembaca secara tertulis terhadap bahasa perda tentang RPJPD. **Kedua**, setelah masing-masing data dari setiap faktor dikumpulkan, selanjutnya data tersebut dikategorikan dengan menggunakan model taksonomi (1980) pada tingkat keterbacaan semua tuturan dianalisis berdasarkan skala penilaian yaitu tindak tuturan dianalisis berdasarkan skala penilaian, yaitu tingkat keterbacaan tinggi (3), tingkat keterbacaan sedang (2) dan tingkat keterbacaan rendah (1).

Proses analisis data tersebut terus dilakukan hingga selesai. Semua hasil disajikan dalam berbentuk tabel, diagram dan grafik. Dalam proses analisis data selama di lapangan, peneliti melakukan peninjauan ulang seluruh analisis data secara interaktif mulai dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan simpulan. Selanjutnya, peneliti hanya bergerak di antara tiga komponen analisis tersebut sesudah pengumpulan data selesai pada tiap unitnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa dalam penelitian ini. Namun bilamana simpulan akhir dirasakan belum cukup mantap, maka peneliti tetap akan berusaha untuk kembali ke lapangan untuk menggali data dengan pertanyaan yang terfokus dengan tujuan untuk mendapatkan data yang bisa mendukung simpulan akhirnya, sebelum laporan penelitian disusun secara lengkap.

Karena sifat penelitian kualitatif yang lentur dan terbuka, penelitian ini menggunakan strategi kasus terpancang dengan kegiatan penelitian yang dipusatkan pada tujuan dan pertanyaan yang jelas dirumuskan. Namun proposal ini bersifat terbuka dan spekulatif karena segalanya secara pasti akan ditentukan oleh keadaan yang sebenarnya ditemukan di lokasi studi. Juga perlu dijelaskan bahwa penelitian kualitatif ini proses analisis secara

keseluruhan bersifat *empirico inductive*, yang sangat berbeda dengan proses analisis dalam penelitian kuantitatif yang bersifat *hypothetico deductive* dengan mengajukan hipotesis penelitian.

Untuk lebih jelasnya, proses model analisis interaktif (Sutopo, 2006:120) dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut.



Bagan ke3-2: Bagan model analisis interaktif

Dari pengalaman lapangan model ini menunjukkan bila simpulan akhir kurang mantap, peneliti akan kembali ke lapangan untuk menggali data dengan pertanyaan fokus untuk mendapatkan tambahan data yang dapat melengkapi dan menguatkan atau menyempurnakan simpulan akhir sebelum laporan penelitian disusun secara lengkap.

3.9. Tempat Penelitian

3.9.1 Masa Berlakunya RPJPD

Masa berlakunya RPJPD yaitu tahun 2005 – 2025.

3.9.2 Deskripsi Latar Belakang Lokasi Penelitian

3.9.2.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah yang terletak pada $110^{\circ}40'$ - $110^{\circ}70'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}28'$ - $7^{\circ}46'$ lintang selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan permukaan air laut, beriklim tropis dengan temperatur 22° - 31° C. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen, sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri, sebelah timur dengan

Propinsi Jawa Timur serta di sebelah barat berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Secara administrasi Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 1.876 RW, 6130 RT dan 17 Kecamatan yang meliputi 162 desa dan 15 kelurahan. Secara topografis Kabupaten Karanganyar merupakan dataran dan pegunungan dengan ketinggian tempat yang sangat bervariasi, ketinggian 0-100 meter seluas 8,11 %, 101 -500 meter seluas 45,32 %, 501-1000 meter seluas 36,59 % di atas 1000 m seluas 9,98 % dan luas wilayah seluruhnya 773,78 km.

3.9.2.2 Aspek Sumber Daya Alam

Kabupaten Karanganyar sebagian besar jenis tanahnya terdiri dari tanah litosol yang berwarna coklat (di bagian tengah) dan di bagian timur terdiri dari tanah pegunungan yang berwarna coklat tua sampai kehitam-hitaman. Di bagian barat terdiri dari tanah mediteran andosal yang berwarna hitam, dasar tanah debuan andesit sampai pasir bergeluh. Kondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun curah hujan rata-rata 1,151 mm pertahun dan hujan rata-rata 84 hari/tahun. Secara hidrografis Kabupaten Karanganyar memiliki berbagai sumber air yang antara lain disebabkan oleh karena terletak di kaki Gunung Lawu ,di mana keadaan tanahnya makin ke barat makin datar dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Potensi tambang/bahan galian yang terdapat di Kabupaten Karanganyar berupa andesit pasir, tanah urug, sirtu, tanah liat, batu gamping (belum digarap), emas, tanah eksplorasi, kaolin, andesit, tras, gibs dan batu lempeng. Jenis penggunaan tanahnya sebagian besar adalah untuk sawah seluas 22 882 9496 ha, ladang 178 911,198 ha, perkebunan 31 976.166 ha pekarangan/bangunan: 205 772 168 ha, padang gembala 2 161.009 ha, tambak/kolam 250 914 ha dan lain-lain 26 517 643 ha.

3.9.2.3 Aspek Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan potensi pembangunan yang cukup strategis namun dengan kualitas yang lebih rendah akan menjadi beban berkepanjangan. Jumlah penduduk tahun 2008 ada 864.689 jiwa. Sebagian besar merupakan penduduk produktif yakni sekitar 60,2 %. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2008 rata-rata sebesar 0,91 % pertahun, sedangkan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 1.086 jiwa/km.

Dilihat dari sebaran penduduk Kabupaten Karanganyar di 17 kecamatan maka kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Karanganyar, yaitu 73.750 jiwa (8,85 %), kemudian Kecamatan Jaten ada 68.528 jiwa (8,25 %) dan Kecamatan Gondangrejo ada 63.584 jiwa (8,78%), sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi yaitu: 27.133 jiwa (3,23 %), Kecamatan Ngargoyoso: 34.745 jiwa (4,23 %) dan Kecamatan Kerjo sebesar 36.659 jiwa (4,38%).

Dari sisi kelompok umur terlihat bahwa kelompok umur usia produktif (16-64 tahun) sebesar 585 987 jiwa (68,40%) dan nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) 278.702 jiwa (33,70 %). Dengan demikian angka beban tanggungan penduduk usia produktif (*dependency ratio*) sebesar 49,78 %).

Upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan antara lain melalui pelayanan KB, peningkatan akses dari kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi, peningkatan keikutsertaan pria dalam ber KB dan penguatan jaringan program. Untuk upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran telah dilakukan antara lain melalui penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, penyelenggaraan bursa kerja dan pengembangan informasi tenaga kerja.

Sementara itu, pembangunan pendidikan di Kabupaten Karanganyar selain memperhatikan sistem Pendidikan Nasional yang berjalan, juga memperhatikan sasaran komitmen di bidang pendidikan dan kesepakatan

pendidikan untuk semua penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar selain dilaksanakan melalui jalur nonformal juga jalur formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah sampai dengan pendidikan tinggi.

Derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari 3 indikator utama yaitu: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Usia Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan data yang ada di BPS Kabupaten Karanganyar tahun 2008. AKI tercatat sebesar 82,3 per 100.000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian ibu terbanyak adalah pendarahan, eklamsi, pendaharahan sebelum persalinan dan infeksi. AKB sebesar 7,3 per 1.000 kelahiran hidup. Untuk UHH di Kabupaten Karanganyar tercatat 76,8 pada tahun 2008. Pada tahun 2008 sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani sendiri, buruh tani, buruh industri, buruh bangunan, pengusaha, pedagang, angkutan, PNS/TNI/POLRI dan pensiunan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum gambaran mengenai kondisi dan potensi Kabupaten Karanganyar tercermin dalam slogan yang dicanangkan dan telah diresapi maknanya oleh seluruh lapisan masyarakat. Slogan dimaksud adalah **Karanganyar TENTERAM** (Tenang, Teduh, Tertib, Rapi, Aman dan Makmur) dan **INTANPARI** (Industri, Pertanian dan Pariwisata) sebagai potensi daerah.

3.9.2.3 Aspek Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Karanganyar secara makro pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dari data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 5,13 persen. Struktur perekonomian didominasi oleh 3 sektor yaitu: industri pengolahan sebesar 51,55 %, pertanian 19,68 %, perdagangan, hotel dan restoran ada 10,33%. Agar tercapai pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil diperlukan berbagai kebijakan pemerintah yang meliputi: penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, peningkatan produktivitas

tenaga kerja serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah propinsi mendukung dan mendorong berkembangnya sektor riil. Kebijakan tersebut merupakan salah satu penciptaan iklim kondusif bagi investor dalam dan luar negeri dalam segala hal di antaranya, kepastian hukum promosi terpadu, intermediasi perbankan, ketenagakerjaan, kebijakan tata ruang yang konsisten dan penyediaan infrastruktur yang memadai produksi pada di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2007 mencapai 246 033 ton dengan luas produksi 42.848 ha dan produksi jagung sebanyak 26 867 ton, sedangkan luas lahan kritis mencapai 1400 ha. Kemudian banyaknya fasilitas perdagangan seperti pasar ada 52 buah, toko, kios dan warung ada : 9.807 buah, KUD/ BUUD ada 17 buah dan koperasi simpan pinjam ada 910 buah. Mengenai pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2007 sebesar Rp 641.317.357.080,- terdiri dari PAD sebesar Rp 56.889.064.224,- dan dari dana perimbangan pemerintah pusat sebesar Rp 537.053.195.722,-, dana tranfer dari Propinsi Rp 40.875.097.134,- dan lain-lain pendapat yang syah sebesar Rp. 6.500.000.000,-, sedangkan dana swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa tahun 2007 sebesar Rp 59.712 049.950,-. Di samping itu, kemampuan masyarakat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2007 sebesar Rp 6.224.781.840,- dan PDRB atas harga konstan sebesar Rp 4.401.301.740,-.

3.9.2.5. Aspek Sosial Politik dan Budaya

3.9.2.5.1 Aspek Wilayah Administratif

Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagai menjadi 17 Kecamatan, yang menjadi sejumlah 177 desa/kelurahan 15 kelurahan dan 162 desa. Dari sejumlah 177 desa/kelurahan tersebut terbagi lagi menjadi sebanyak 1.091 dusun, sebanyak 2.313 dukuh. Jumlah rukun warga pada tahun 2009 sejumlah 1835 RW dengan sebanyak 6020 RT dan pada tahun 2009 jumlah RW meningkat menjadi sebanyak 1876 RW dengan jumlah RT yang semakin berkembang menjadi sebanyak 6.130 RT. Klasifikasi

desa/kelurahan sejak tahun 2008 semuanya sudah masuk dalam kategori desa swasembada.

3.9.2.5.2 Aspek Politik dan kamtibmas

Komposisi keanggotaan DPRD di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2009 sebanyak 45 anggota yang berasal dari:

- Partai Golkar : 12 anggota
- PDIP : 14 anggota
- PKS : 4 anggota
- Partai Demokrat : 7 anggota
- PAN : 3 anggota
- PKB : 2 anggota
- Partai pelopor : 3 anggota

Bila dilihat menurut wilayah kecamatan, maka kecamatan dengan jumlah anggota DPRD yang terbanyak adalah Kecamatan Jaten yaitu sebanyak 10 anggota (atau 22,22 % dari total), sedangkan Kecamatan Matesih dan Karanganyar masing-masing sebanyak 7 anggota (15,56% dari total).

Pada tahun 2009 jumlah komisi yang ada di DPRD Kabupaten Karanganyar ada sebanyak 4 komisi yaitu : (1) komisi A dengan anggota sebanyak 11 orang; (2) komisi B, dengan anggota sebanyak 11 orang; (3) komisi C dengan anggota sebanyak 11 orang dan (4) komisi D, dengan anggota sebanyak 9 orang.

KORPRI

Berdasarkan data yang masuk di DPC (Dewan Pengurus Cabang) KORPRI di Kabupaten Karanganyar, jumlah anggota KORPRI di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2009 sebanyak 13.531 orang.

Dengan demikian selama kurun waktu 2005-2009 telah terjadi upaya efisiensi aparatur pemerintah dan upaya peningkatan kualitas serta tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah. Hal ini tampak pada adanya kecenderungan penurunan jumlah aparatur pemerintah dan terjadinya penurunan proporsi aparatur pemerintah golongan 1 dan II serta

meningkatnya proporsi aparatur pemerintah golongan III dan IV. Peningkatan tersebut lepas dari kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan kepegawaian secara umum maupun diklat teknis bagi aparatur pemerintah.

Tujuan pembangunan di bidang politik adalah terciptanya stabilitas politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan daerah di segala bidang. Dengan demikian juga akan dapat mewujudkan kemampuan daya tangkal yang tangguh guna menjamin terpeliharanya pertahanan dan keamanan yang tangguh, di samping meningkatnya kesadaran bela negara yang tinggi dari setiap warga masyarakat, sehingga terjadi stabilitas wilayah yang mantap juga.

Kekuatan saat ini yaitu terbukanya sistem demokrasi adanya undang-undang di bidang politik yang mendukung terciptanya iklim politik yang transparan dan akuntabel, adanya jaminan kelangsungan hidup masyarakat dan tumbuhnya kesadaran bela negara dengan kepemilikan daya tangkal yang tangguh, serta adanya undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah.

Namun yang menjadi tantangan juga cukup banyak yaitu: konflik sosial dan politik yang muncul merupakan tantangan dalam upaya memperkokoh integrasi bangsa serta upaya menciptakan proses pendanaan kehidupan politik, belum terciptanya proses pendanaan kehidupan politik, belum terciptanya budaya politik yang bersifat demokratis merupakan suatu tantangan bagi pelaku-pelaku politik masyarakat dan pemerintah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan, gejolak sosial, gejala emosional masyarakat dan gejolak politik akibat ketidakadilan pembangunan yang menjurus anarkis dan disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan sosial, politik dan keamanan yaitu:

- 1) Terwujudnya infra struktur dan supra struktyur politik yang mampu menunjang menjalankan dan melaksanakan aspirasi masyarakat.
- 2) Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan keadilan rakyat.

- 3) Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan berkeadilan.
- 4) Pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat keamanan
- 5) Pembinaan kader hansip dan daerah rawan bencana
- 6) Pengiriman latihan keterampilan pertahanan keamanan
- 7) Peningkatan dan penyempurnaan sarana dan prasarana di bidang keamanan yang lebih memadai.
- 8) Pembinaan bela negara bagi warga masyarakat.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dengan didasari ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara identitas dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Berbagai tindakan kebijaksanaan telah diambil oleh Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah dan ketepatan penggunaan dana yang tersedia. Hal ini ditujukan untuk menguasai ketergantungan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada instansi yang lebih tinggi. Walaupun dalam keadaan resesi ekonomi yang berkepanjangan dan menghadapi berbagai hambatan dan kendala, namun daerah kabupaten Karanganyar kondisi sosial, politik dan keamanan dalam keadaan tenteram, aman, tenang, stabil, mantap dan terkendali serya berusaha untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang pelaksanaannya dilandasi oleh kearifan dan kebijakan yang mantap.

Untuk mempertahankan keadaan di Kabupaten Karanganyar yang tenteram, aman dan tenang ini, maka pemerintah daerah mengambil beberapa kebijakan antara lain:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih profesional.

commit to user

2. Pengembangan kerja sama lintas wilayah dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban daerah.
3. Peningkatan dan pengembangan Linmas agar setiap lapisan masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi akibat bencana, sehingga keinginan fisik dan material dapat dihindarkan sekecil mungkin.
4. Peningkatan peran Hansip dalam melaksanakan fungsi LINMAS untuk penanggulangan bencana alam, keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan yang mempunyai kesadaran politik yang tinggi dan berjiwa demokratis.
6. Mengoptimalkan tugas-tugas aparatur pemerintah secara berkesinambungan yang berkualitas, sehingga dapat menciptakan dan mengatur iklim politik secara sejuk di daerahnya.
7. Menjaga terpeliharanya stabilitas politik yang sehat, dinamis, mantap guna menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Meningkatkan kemandirian partai politik dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsinya.
9. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat dalam rangka pengembangan etika dan budaya politik sesuai dengan tuntutan reformasi.
10. Mengawasi dan mengamati jalannya reformasi agar pelaksanaan reformasi tidak berjalan menyimpang dari tujuan/ azas reformasi semula.
11. Penyelenggaraan pembinaan hukum agar dapat mendukung pembangunan pada umumnya dan khususnya pembangunan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.
12. Mengembangkan budaya hukum untuk mencapai kesadaran dan kepatuhan hukum.
13. Memperbaiki perundang-undangan yang tidak sesuai termasuk tuntutan reformasi dan globalisasi.
14. Mengingatkan integrasi moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, transparansi dan akuntabilitas daerah yang mantap.

commit to user

3.9.2.5.3 Aspek Sosial Budaya

Kabupaten Karanganyar memiliki potensi wisata baik wisata alam budaya budaya maupun buatan dikembangkan sebagai objek wisata rekreatif dan menarik. Jenis objek wisata di Kabupaten Karanganyar berupa objek wisata alam sebanyak 18 buah, wisata budaya ada 14 buah dan wisata buatan ada 7 buah. Adat istiadat yang ada di Kabupaten Karanganyar dipengaruhi oleh adat/kebiasaan rakyat Surakarta dan Jawa Timur yaitu masyarakat yang jujur, terbuka dan sebagian besar bermata pencaharian agraris. Kebudayaan yang terdapat di Karanganyar merupakan peralihan antara Surakarta dan Jawa Timur. Berbagai Kesenian yang pada setiap kecamatan, berupa dalang seniwati, wayang orang, ketoprak, lawak, drama, ludruk reog, rabana, samroh dan lesung jemembrung dan sebagainya. Kesenian rakyat tersebut masih sering dipertunjukkan pada acara-acara tertentu, seperti hajatan tiap 17 Agustus dan acara-acara resmi lainnya.

Mengenai bahasa harian masyarakat Kabupaten Karanganyar menggunakan tuturan dengan menggunakan bahasa Jawa, sedangkan untuk kegiatan resmi dalam acara resmi seperti upacara dan peresmian serta acara seminar dan Musrenbang menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan dalam masa Pemerintahan Bupati Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, S.Pd., M.Hum. setiap hari Rabu dalam acara resmi pemerintah daerah di minta menggunakan bahasa Jawa.

3.10 Prosedur Kegiatan

Kegiatan penelitian ini seluruhnya direncanakan sebagai berikut.

3.10.1 Persiapan

1. Penulisan proposal, dengan konsultasi sampai baik.
2. Seminar proposal.
3. Uji kelayakan proposal.
4. Mengurus perijinan penelitian: Universitas, Pemda, Propinsi Jateng.

5. Menyusun protokol penelitian, pengembangan pedoman pengumpulan data (daftar pertanyaan dan petunjuk observasi) dan juga penyusunan jadwal kegiatan secara digital/rinci.

3.10.2 Pengumpulan Data

1. Mengumpulkan data di lokasi studi dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan mencatat dokumen/ arsip.
2. Melakukan review, pembahasan beragam data yang telah terkumpul dengan melaksanakan refleksinya. Menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang paling tepat, dan menentukan fokus, serta pendalaman, dan pemantapan data, pada proses pengumpulan data berikutnya.
3. Mengatur data dalam kelompok untuk kepentingan analisis, dengan memperhatikan semua variabel yang terlibat yang tergambar pada kerangka pikir.

3.10.3 Analisis Data

1. Melakukan analisis awal, bila unit data desa, kecamatan, kabupaten, dan propinsi sudah cukup lengkap.
2. Mengembangkan bentuk sajian data, dengan menyusun koding dan matriks bagi kepentingan analisis lanjut.
3. Melakukan analisis unit jenis/ tingkat pemerintahan tertentu (analisis per unit) dan mengembangkan analisis antar unit.
4. Melakukan verifikasi, pengayaan dan pendalaman data. Bila dalam persiapan analisis ternyata ditemukan data yang kurang lengkap atau kurang jelas, maka perlu dilakukan pengumpulan data lagi secara lebih terfokus.
5. Melakukan analisis antar unit. Semua hasil analisis unit disatukan dalam proses analisis antar unit dan dikembangkan struktur sajian datanya bagi susunan laporan.
6. Merumuskan simpulan akhir sebagai temuan penelitian

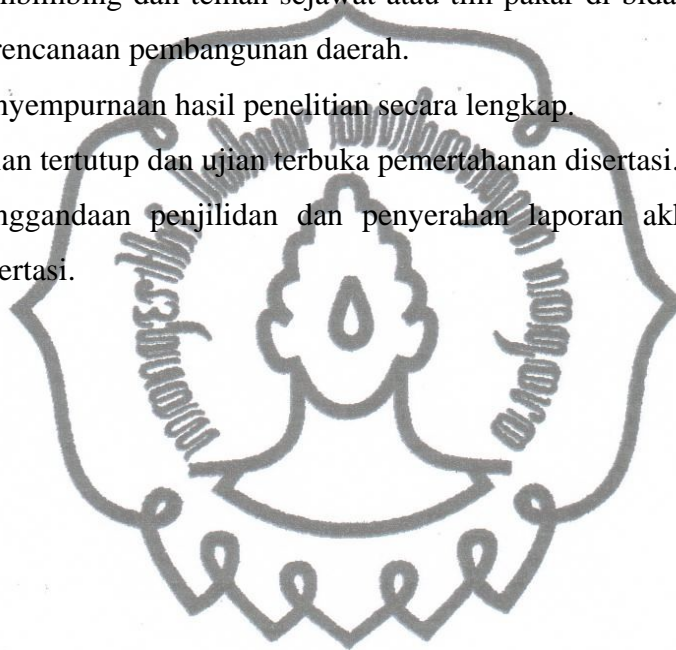
commit to user

7. Merumuskan implikasi kebijakan sebagai bagian dari pengembangan saran dalam laporan akhir penelitian.

3.10.4 Penyusunan Laporan

Tahap ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun draf laporan untuk dikonsultasikan dengan tim pembimbing
2. Merevisi draf laporan penelitian berdasarkan masukan dari tim pembimbing dan teman sejawat atau tim pakar di bidang pragmatik dan perencanaan pembangunan daerah.
3. Penyempurnaan hasil penelitian secara lengkap.
4. Ujian tertutup dan ujian terbuka pemertahanan disertasi.
5. Penggandaan penjilidan dan penyerahan laporan akhir (*final report*) disertasi.



5.1.2 Pembahasan proses pembahasan RPJPD di kalangan organisasi non-pemerintah (LSM)

5.1.2.1 Jenis-jenis Tindak Tutur Direktif dalam proses pembahasan draf RPJPD di kalangan organisasi non-Pemerintah (LSM)

Pendahuluan

Dalam proses pembahasan RPJPD di tingkat eksekutif ini dipisahkan antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah -SKPD- (dinas, badan) dengan organisasi non pemerintah (LSM, Organisasi kemasyarakatan, Organisasi profesi, Perguruan tinggi swasta). Pemisahan dalam pembahasan RPJPD ini dimaksudkan agar lebih intensif dan spesifik, sebab pola pembahasan kedua kelompok itu memiliki spesifikasi sendiri-sendiri, sehingga kalau dipisah akan lebih terfokus dan tajam.

Dalam pembahasan RPJPD ini, peserta tutur berjumlah 30 orang terdiri dari para anggota LSM, organisasi kemasyarakatan seperti Muhamadiyah, NU, Pramuka, Karangtaruna, PKK, Organisasi profesi seperti KADIN, IDI, HKTI, PGRI, Perguruan tinggi swasta seperti: Akademi Peternakan Karanganyar, AMI, Akademi Pariwisata, Universitas Surakarta.

Situasi tutur dalam pembahasan RPJPD sangat mempengaruhi ketenangan dan ketajaman dalam melakukan dialog antara petutur dan mitra tutur. Tempat pembahasan di kantor pertemuan BAPPEDA yang ruangnya tidak begitu luas dan juga tidak sempit cukup untuk memuat sejumlah sekitar 30 peserta. Ruangannya jauh dari keramaian dan sudah ber-AC, sehingga udaranya sejuk dan sepi dari gangguan suara kendaraan bermotor.

Tuturan merupakan salah satu refleksi dari bentuk tindakan atau aktivitas dalam menanggapi terhadap pembahasan RPJPD di Kabupaten Karanganyar tahun 2005 s.d. 2025. Dengan demikian, tuturan dapat berujud sifatnya tanggapan, masukan atau saran bahkan tidak sedikit yang berwujud kritikan terhadap draf RPJPD. Berikut ini, jenis-jenis tuturan yang terjadi:

Tuturan ke-32 dituturkan aktivis LSM, “Setelah paparan tadi dijelaskan BAB II tentang data belum ada, kok lucu, kok bisa menyusun visi dan misinya (*mengkritik*) dari mana nalarnya. **nyuwun sewu ini.**”



Gambar : 2 Gambar salah satu penutur aktivis LSM yang sedang bertutur menyampaikan kritikan terhadap draf Perda RPJPD.

Tuturan ke-32, yang disampaikan oleh aktivis LSM yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, seorang sarjana Pertanian, memang di kalangan teman-temannya dikenal kritis, dalam tuturan ini dengan terus terang *mengkritik* tentang penyusunan visi dan misi, "pada hal data BAB II belum ada kok bisa ? tanyanya!". Karena penutur (02) ini terbiasa berpikir tingkat mikro dalam membina kelompok-kelompok produktif di pedesaan, sehingga masuk akal.

Tuturan tersebut disampaikan dalam suasana formal di ruang seminar Bappeda Kabupaten Grobogan yang sangat sejuk karena ruangnya ber-AC. Dalam tuturannya sangat mendapat perhatian teman-temannya karena mendapat atau mengajukan pertanyaan yang paling awal dan nadanya dengan terus terang mengkritik draf Perda RPJPD. Dalam tuturannya penutur menggunakan jenis **kalimat langsung** dengan jelas dan langsung menunjuk dengan mengkritik bab II belum bisa menyusun visi dan misinya. Implikturnya, penyusunan visi dan misi seharusnya sesuai dengan potensi dan kondisi daerahnya.

Tuturan ke-33 disampaikan seorang aktivis LSM, "Saya *mengajak* kepada forum ini untuk lebih mencermati arah kebijakan apakah telah sesuai dengan potensi dan peluang potensi daerah kita harus **mawas diri tho.**"

commit to user

Tuturan ke-33, disampaikan oleh penutur (02) juga dari kalangan LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, seorang sarjana ekonomi, anggota WALHI dan di kalangan teman-temannya dikenal vokal. Oleh karena itu, dalam tuturannya terus terang mengkritik terhadap sistematisa berpikir bahwa visi belum ada indikatornya bagaimana mengukurnya? Tetapi sebenarnya kalau dicermati dan dibaca dengan cermat, setelah rumusan visi itu telah dirumuskan ukuran-ukuran atau indikator yang terkandung dalam visi. Seperti halnya kesejahteraan, cerdas, kompetitif dan berbudaya sudah diberi indikatornya, mungkin hanya penutur belum sempat membaca saja. Dalam tuturannya menggunakan jenis tuturan **langsung literal** artinya tindak tutur yang diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutarannya. Dalam arti penutur meminta agar visi yang disusun sesuai potensinya dan mudah diukur. Implikasinya, visi Pembangunan Daerah itu harus sesuai potensi daerah dan mudah diukur.

Tuturan ke-34, disampaikan Kasubid Bappeda dalam tuturannya. "Saya *mengajak* kepada forum MUSRENBANG untuk lebih mencermati arah kebijaksanaannya apakah telah sesuai potensi dan peluang yang ada sesuai dengan slogan **INTAN PARI**."

Tuturan ke-34, disampaikan oleh penutur sarjana pemerintahan, jabatan struktural sebagai Kepala Bidang data dan monitoring serta Litbang di BAPPEDA. Dalam hal ini yang paling bertanggungjawab terhadap penyusunan RPJPD ini, sehingga sekaligus menanggapi kritikan dari penutur yang dari LSM tadi. Secara logika memang benar Penutur kalau belum ada Bab II mengapa bisa buat visi. Tetapi tim penyusun RPJPD ini sudah punya data kondisi existing (data terbaru tahun itu) yang sebagai dasar untuk menyusun RKPD atau program tahunan, sebab kebetulan tim RPJPD juga tim RKPD, sehingga untuk keperluan penyusunan visi tidak menjadi masalah. Tuturan itu (02) disampaikan secara formal dalam acara MUSRENBANG RPJPD di kantor Bappeda Grobogan. Dalam tuturannya, penutur menggunakan jenis **kalimat langsung** sesuai dengan maksud tuturannya penutur secara langsung mengajak untuk mencermati arah kebijakan sudah sesuai dengan potensi daerahnya. Implikasinya perlunya kualitas arah kebijakan sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya.

Tuturan ke-35 disampaikan fungsionaris LSM, "Saya *menegur* kepada tim penyusun RPJPD agar dibentuk komisi-komisi yang nanti tentu akan efektif dalam membahas draf RPJPD."

Tuturan ke-35, disampaikan penutur, seorang fungsionaris LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan seorang fungsionaris partai Gerindra di Kabupaten Karanganyar, di kalangan teman-teman LSM dikenal pemikir kritis, berpendidikan sarjana Pendidikan. Dalam tuturannya menggunakan TTD menegur kepada tim penyusun RPJPD agar dalam pembahasan arah kebijaksanaannya dapat lebih intensif dan perencanaan itu nanti betul-betul dapat dilaksanakan di lapangan perlu dibahas di tingkat komisi. Dalam tuturannya, disampaikan dalam acara formal pada pembahasan draf RPJPD di Gedung Bappeda Kabupaten Karanganyar. Dalam tuturannya, penutur disampaikan dengan intonasi kadang-kadang tinggi dan kadang - kadang rendah dan enak didengarkan oleh peserta MUSRENBANG lainnya. Dalam tuturannya penutur menggunakan jenis **kalimat langsung**, di mana (01) dalam tuturannya langsung menegur kepada tim penyusun RPJPD agar dibentuk komisi-komisi. Implikasinya, draf Perda RPJPD agar pembahasannya dapat intensif perlu dibahas lewat komisi-komisi.

Tuturan ke-36 dituturkan seorang guru dalam tuturannya menegaskan bahwa."Saya *menghimbau* kepada tim penyusun RPJPD, agar masa RPJPD dimulai dari tahun 2008-2027."



commit to user

Gambar :3 Salah satu penutur dalam MUSRENBANG, Pengurus KADIN Kabupaten Karanganyar yang sedang menanggapi draf RPJPD Kabupaten Karanganyar.

Tuturan ke-36, disampaikan oleh penutur, seorang pengurus KADIN Kabupaten Karanganyar, Dr. di bidang manajemen pendidikan, juga seorang Dosen yang sudah cukup senior di UNS. Dalam tuturannya menggunakan TTD menghimbau kepada tim penyusun RPJPD agar tahunnya dimulai tahun 2008 s.d. 2027. Memang dilihat dari segi logika kurang pas kalau disusun tahun 2008 mengapa berlakunya baru tahun 2005. Tetapi Kabupaten Karanganyar itu merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dokumen RPJPD seluruh Indonesia agar dapat sama memang waktunya perlu disesuaikan dengan dokumentasi RPJP nasional dan propinsi. Dalam tuturannya penutur menggunakan jenis **kalimat langsung**, dimana penutur dalam pembicaraannya langsung pada pokok masalah yaitu waktu berlakunya pembahasan draf RPJPD. Implikaturnya, masa berlakunya RPJPD disesuaikan dengan RPJP pusat dan RPJP propinsi, sehingga masa berlakunya di RPJP di seluruh Indonesia harus sama yaitu dari tahun 2005–tahun 2025 mendatang.

Tuturan ke-37 disampaikan oleh seorang guru, ”Saya *meminta* pengertian kepada para peserta di ruangan ini untuk memahami bahwa dokumen nasional, propinsi dan kabupten harus sinkron.”

Tuturan ke-37, disampaikan oleh penutur, seorang guru dan sarjana pendidikan serta aktif di berbagai forum utamanya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Penutur ini sebenarnya menanggapi penutur no. 36 yang mempermasalahkan waktu berlakunya RPJPD.

Sebenarnya, menurut penjelasan dari pihak BAPPENAS sewaktu menjelaskan tentang masa RPJPD di Propinsi Jawa Tengah untuk jangka panjang waktunya dibuat sama/seragam supaya dalam PILKADA dapat diselenggarakan bersamaan, sehingga akan lebih efektif. Dalam tuturannya, penutur menggunakan jenis **kalimat langsung** di mana penutur secara langsung meminta pengertiannya bahwa dokumen pembangunan dari nasional, propinsi dan

kabupaten itu harus ada benang merahnya bahkan waktunya sama, sehingga terjadi sinkronisasi dan stabilitas yang sama. Implikasinya, Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tentu masa kerjanya dokumentasi pembangunan daerah harus sama dengan masa dokumentasi pembangunan dengan tingkat pusat dan daerah.

Tuturan ke-38 diungkapkan oleh aktivis LSM, "Kabupaten Karanganyar sebagai daerah pertanian kenapa kebijakan khusus yang terkait dengan upaya pengembangan tanaman tradisional belum nampak tajam, karena itu saya diundang untuk *mencegah* agar hal itu diperhatikan dalam RPJPD, sehingga nantinya menjadi Pripemda (Prioritas Pembangunan Daerah)."

Tuturan ke-38, dituturkan oleh penutur, seorang sarjana pendidikan dan aktivis LSM yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat. Dikalangan LSM, penutur dikenal pemikiran kritis dan tajam. Oleh karena itu, TTD yang digunakan menggunakan TTD melarang dengan sub TTD mencegah, dengan demikian harapannya sebelum RPJPD diperdakan arah kebijakan tentang pengembangan tanaman obat atau herbal telah dimasukkan dahulu. Dalam tuturannya penutur menggunakan jenis kalimat **langsung**, di mana penutur secara langsung mengingatkan dan mencegah sebagai daerah yang berbasis agronomi jangan sampai lupa memasukan arah kebijakan tentang tanaman obat di dalam RPJPD tersebut. Implikasinya, sebagai daerah agronomi maka tanaman obat-obatan untuk jangka panjang perlu dilestarikan.

Tuturan ke-39 dituturkan aktivis PN-PM, "Draf RPJPD sudah banyak memuat kebijakan tentang penurunan kemiskinan, tetapi RPJPD belum memuat ikon tentang pemberdayaan wanita yaitu MDG (*menyindir*)."

Tuturan ke-39, dituturkan penutur, aktivis PN-PM Kabupaten Karanganyar, di mana dalam kegiatan PN-PM memang sasarannya para Ibu rumah tangga dan lembaganya. Oleh karena itu, tuturan yang digunakan TTD menyindir sebab ikon MDG ini merupakan kunci dalam mengembangkan kegiatan kewanitaan. Karena kalau sampai draf RPJPD tidak mencantumkan program MDG Kabupaten Karanganyar akan ketinggalan zaman. Dalam tuturannya penutur menggunakan jenis **tuturan langsung** dimana penutur secara langsung mengkritik atau setidaknya mengingatkan agar RPJPD

memasukan ikon pemberdayaan wanita atau yang lebih dikenal Millenium Development Gold (MDG).

Tuturan ke-40 dituturkan seorang dosen APK menegaskan. "Kami memberikan *tawaran* dalam rumusan visi kata berbudaya diganti bermartabat, sehingga akan meningkatkan disiplin."

Tuturan ke-40, dituturkan oleh penutur, seorang Sarjana Pertanian, Dosen di Akademi Peternakan Karanganyar (APK) dan Fungsionaris Gabungan Wanita Kabupaten Karanganyar. Dalam tuturannya, menggunakan jenis tuturan direktif *tawaran* mengenai kata berbudaya di dalam visi RPJPD. berdasarkan pengalamannya sering berorganisasi di masyarakat, mencermati kata berbudaya mempunyai konotasi negatif, "oleh karena itu mbok diganti bermartabat ". Dalam tuturannya penutur menggunakan jenis **kalimat langsung**, di mana penutur secara langsung dan dengan tegas menawarkan kata berbudaya diganti kata bermartabat. Implikturnya tampaknya kata berbudaya masih ada yang menilai konotasi negatif, sebab saat ini wacana di masyarakat kata berbudaya selalu dikaitkan dengan berbudaya korupsi.

Tuturan ke-41 disampaikan oleh pengurus PKK, " *Wonten ing kesempatan puniko kulo bade memohon* lagi dengan hormat, agar keorganisasian wanita secara langsung tampak tersendiri dalam draf Perda RPJPD."

Tuturan ke-41, dituturkan oleh penutur, seorang pengurus PKK tingkat Kabupaten Karanganyar dan seorang istri Kepala Desa di Kelurahan Kota Karanganyar. Dalam tuturannya menggunakan TTD **memohon** dalam menanggapi draf RPJPD agar ada arah kebijakan Pembangunan yang mewadahi tentang organisasi kewanitaan. Menurut pengamatannya yang ada arah kebijakan tentang ketahanan keluarga, sekali lagi dia memohon agar organisasi wanita ada kebijakan khusus atau menjadi prioritas utama. Dalam tuturannya penutur menggunakan **jenis kalimat langsung**, dimana 02 secara langsung dan memohon sebab 02 tetap menjaga rendah diri, sehingga menggunakan kata memohon kegiatan wanita masuk dalam draf RPJPD. Implikturnya, masalah kewanitaan untuk jangka panjang dipandang sangat penting, sehingga perlu perhatian bagi tim penyusun RPJPD.

Tuturan ke-42. diungkapkan oleh fungsionaris angkatan '45, "Organisasi angkatan 45 memberikan *teguran* kepada tim penyusun RPJPD kok tidak memasukan kepribadian bangsa."

Tuturan ke-42, dituturkan oleh seorang fungsionaris Organisasi Angkatan 45, seorang pensiunan guru dan aktif di bidang organisasi sosial. Dalam tuturannya menggunakan TTD *teguran* kepada tim penyusun RPJPD agar draf RPJPD tersebut harus memuat kepribadian masyarakat, sebab kepribadian bangsa tersebut merupakan kunci penegakan moral suatu bangsa.

Tuturan itu disampaikan dalam suasana formal dalam acara MUSRENBANG RPJPD di ruang seminar BAPPEDA Kabupaten Karanganyar yang diselenggarakan sejak pagi hari sampai siang hari. Dalam tuturannya menggunakan **jenis tuturan langsung**, di mana penutur secara langsung memberikan teguran kepada tim penyusun RPJPD agar *menguri-nguri* kepribadian bangsa. Implikasinya, nilai-nilai kepribadian untuk masa mendatang perlu dilestarikan.

Tuturan ke-43, dituturkan oleh tim penyusun RPJPD, "Saya ingin *mengingatkan* bahwa RPJPD ini isinya hanya arah kebijakan sifatnya masih sangat umum belum sampai pada program kerja."

Tuturan ke-43, dituturkan oleh penutur, salah satu anggota tim penyusunan RPJPD, seorang sarjana sosial politik dan seorang guru di daerah Solo Raya. Dalam tuturannya menggunakan TTD *mengingatkan* kepada para peserta MUSRENBANG bahwa yang namanya RPJPD itu hanya memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang sifatnya masih sangat umum dalam arti di dalam RPJPD belum sampai pada program bahkan kegiatan. Oleh karena itu tuturan:43 itu lebih banyak menanggapi tuturan sebelumnya, memang penutur ini yang lebih tahu tentang proses penyusunan RPJPD. Dalam tuturannya penutur menggunakan jenis kalimat **langsung**, di mana penutur secara langsung mengingatkan kepada peserta musrenbang bahwa RPJPD itu isinya hanya arah kebijakan belum sampai pada program. Implikasinya, RPJPD itu hanya memuat arah kebijakan saja. Dengan demikian, RPJPD itu isinya masih bersifat umum, belum sampai pada program.

Tuturan ke-44, disampaikan oleh fungsionaris PEPABRI, "Saya *mengancam* kepada tim penyusun RPJPD seobjektif mungkin dan dapat dengan tajam mengadopsi masukan dari masyarakat terutama nilai-nilai juang 45."

Tuturan ke-44 dituturkan oleh penutur, seorang Pensiunan ABRI, fungsionaris PEPABRI, memang di kalangan masyarakat terkenal sebagai pemikir yang keras dan suaranya agak cedal-cedal tetapi keras. Mengingat pentingnya RPJPD dalam menentukan masyarakat Kabupaten Karanganyar, karena itu dengan nada keras mengancam kepada tim penyusunan harus memasukkan nilai-nilai juang 45. Dalam tuturannya, penutur menggunakan jenis tuturan. Dalam tuturannya, penutur menggunakan jenis kalimat **tidak langsung**, di mana penutur untuk menjelaskan bahwa RPJPD ini belum sampai pada program dan kegiatan maka dengan berbagai ilustrasi dan contoh-contoh, sehingga tim penyusun merasa tidak diperintah. Implikasinya pentingnya nilai-nilai juang 45 dijadikan falsafah dalam menyusun RPJPD.

Di dalam proses penyusunan RPJPD tingkat Kabupaten di kalangan eksekutif bersama organisasi non-pemerintah sebagian besar menggunakan tuturan direktif. Adapun jenis-jenis tuturan direktif yang muncul dalam pembahasan perencanaan RPJPD di tingkat kabupaten di kalangan eksekutif bersama non-pemerintah sebagai berikut.

TABEL 5.13

Realisasi bentuk TTD dalam proses penyusunan RPJPD di tingkat kabupaten di kalangan eksekutif bersama organisasi non-pemerintah berdasarkan frekuensi perwujudan kategori dan sub TTD berdasarkan frekuensinya.

No.	Tipe Dasar	Sub	Wujud sub TTD	Frek.	Persentase	
					terkategori	Per sub ttd
1	mengkritik	1	mengkritik	2	33,3	15,3
		2	menegur	2	33,3	15,3
		3	menyindir	1	16,6	7,7
		4	mengancam	1	16,3	7,7
			Jumlah	6	100	46

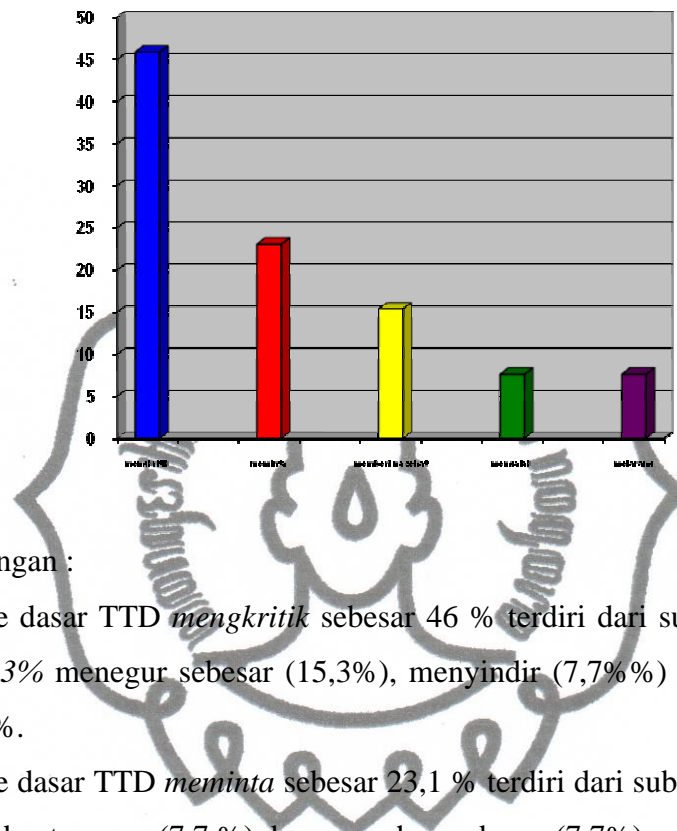
2	mengajak	1	mengajak	1	100	7,7
			Jumlah	1	100	7,7
3	memberi nasehat	1	menghimbau	1	50	7,7
		2	mengingatkan	1	50	7,7
			Jumlah	1	100	15,4
4	meminta	1	meminta	1	33,3	7,7
		2	tawaran	1	33,3	7,7
		3	memohon	1	33,3	7,7
			Jumlah	3	100	23,1
5	melarang	1	mencegah	1	100	7,7
			Jumlah	1	100	7,7
			Jumlah seluruhnya	13	100	100

Sumber : Diolah dari data Primer tahun 2009.

Data di atas menggambarkan tipe dasar direktif yang paling banyak digunakan dalam proses perencanaan RPJPD tingkat kabupaten di kalangan organisasi non pemerintah yaitu *mengkritik* (46%) dengan sub-TTD yaitu: *mengkritik, menegur, menyindir dan mengancam*. Hal ini wajar sebab di kalangan LSM sering muncul pemikiran yang kritis selalu memberikan alternatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, di kalangan para LSM memang lebih tajam atau mengetahui fenomena yang ada di lapangan, sehingga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ada alternatif lain. Di samping itu, untuk tipe tuturan TTD *meminta* juga cukup tinggi ada 23,1% dengan sub TTD : *meminta, tawaran dan memohon*. Jenis tuturan tersebut setelah dicermati ternyata sub-TTD *meminta* dituturkan penutur anggota tim penyusunan RPJPD dari unsur pemerintah, sub-TTD *tawaran* disampaikan oleh Ibu Dosen dari APK dan memohon disampaikan Ibu Surati dari PKK Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian tipe tuturan dan sub TTD ini disampaikan bukan dari kalangan LSM. Sub-TTD ini meliputi : *menghimbau dan mengingatkan* yang disampaikan oleh penutur pengurus KADIN dan penutur anggota tim penyusun RPJPD. Urutan perwujudan TTD berdasarkan kategori

TTD dalam proses penyusunan RPJPD di tingkat kabupaten di lingkungan eksekutif di kalangan non-pemerintah dapat diilustrasikan seperti grafik no. 5.2 berikut ini.

Gambar grafik 5.2



Keterangan :

1. Tipe dasar TTD *mengkritik* sebesar 46 % terdiri dari sub-TTD : mengkritik (15,3% menegur sebesar (15,3%), menyindir (7,7%)) dan mengancam ada 7,7%.
2. Tipe dasar TTD *meminta* sebesar 23,1 % terdiri dari sub-TTD : meminta (7,7 %) dan tawaran (7,7 %) dan memohon sebesar (7,7%).
3. Tipe dasar TTD *memberi nasehat* sebesar 15,4 % terdiri dari sub-TTD : menghimbau (7,7 %) dan mengingatkan sebesar (7,7%)
4. Tipe dasar TTD *melarang* sebesar 7,7 % terdiri dari sub-TTD mencegah ada 7,7 %.

Selanjutnya bila dilihat lebih tajam lagi dilihat dari frekuensi kemunculannya sub-TTD dapat dilihat tabel di bawah ini.

TABEL 5.14

Realisasi bentuk TTD dalam proses penyusunan RPJPD berdasarkan keseringan perwujudan sub-TTD di kalangan organisasi non-Pemerintah.

No.	Wujud sub-TTD	Frekuensi	%	Kategori
1	mengkritik	2	15,3	Tinggi
2	menegur	2	15,3	Tinggi
3	menyindir	1	7,7	Rendah
4	mengancam	1	7,7	Rendah
5	mengajak	1	7,7	Rendah
6	menghimbau	1	7,7	Rendah
7	mengingatkan	1	7,7	Rendah
8	meminta	1	7,7	Rendah
9	menawar	1	7,7	Rendah
10	memohon	1	7,7	Rendah
11	mencegah	1	7,7	Rendah
	Jumlah	13	100.	

Sumber : Diolah dari data primer 2008

Catatan: rendah = 7,7 – 10,2

sedang = 10,3 - 12,5

tinggi = 12,6 - 15,1

Data diatas menunjukkan bahwa sub-TTD yang paling tinggi (15,3 %) yang terbanyak digunakan para penutur di kalangan organisasi non pemerintah dalam membahas draf Perda RPJPD yaitu mengkritik, seperti yang dituturkan penutur No. 32 aktivis LSM ketika *mengkritik* kepada tim Penyusun RPJPD mengenai proses penyusunan VISI RPJPD. Begitu juga yang dilontarkan oleh penutur ke-33 aktivis LSM ketika memberikan TTD jenis *mengkritik* terhadap bagaimana cara mengukur visi nantinya. Begitu juga untuk sub-TTD *menegur* dilakukan oleh penutur ke-35 oleh aktivis LSM pada tuturannya menegur kepada BAPPEDA agar pembahasan RPJPD dilakukan secara komisi-komisi. Di samping itu, penutur ke-42 pengurus organisasi angkatan 45 juga menegur kepada tim penyusun RPJPD masalah kepribadian bangsa dalam RPJPD tetap masuk dalam arah kebijakan, sehingga nantinya masyarakat Karanganyar untuk

jangka panjang tetap berpegang pada norma dan etika berbudaya. Selanjutnya sub-TTD yang lain digunakan pada tingkat yang rendah seperti mengancam, menyindir, mengingatkan, meminta dan mencegah.

Tabel 5.15

Kaitan antara TTD, sub-TTD, tindak tutur langsung dan tidak langsung dan Implikaturnya serta daya pragmatiknya di tingkat kabupaten di kalangan organisasi non-pemerintah

No.TT	TTD	Sub –TTD	Jenis Tuturan
32	mengkritik	mengkritik	langsung
33	mengkritik	mengkritik	langsung literal
34	mengajak	mengajak	langsung literal
35	mengkritik	menegur	langsung literal
36	menasehati	menghimbau	langsung
37	meminta	meminta	langsung
38	melarang	mencegah	langsung
39	mengkritik	menyindir	langsung
40	meminta	menawar	langsung
41	meminta	memohon	langsung
42	meminta	menegur	langsung
43	menasehati	mengingatkan	langsung
44	mengkritik	mengancam	tidak langsung

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2008

Dari data-data di atas menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan draf RPJPD di tingkat kabupaten di lingkungan organisasi non-pemerintah sebagian besar menggunakan kalimat langsung. Maksudnya, para peserta seminar atau MUSRENBANG dalam bertutur membahas draf RPJPD yang menggunakan TTD untuk mengatakan secara sopan, perintah dapat diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintah secara langsung. Bila hal ini

terjadi terbentuk tindak tutur langsung. Mengenai implikatur dan daya pragmatiknya pada intinya (02) lebih banyak memasalahkan rumusan visi, karakter bangsa dan nilai-nilai angkatan pejuang 45 begitu juga mengenai potensi daerah pada intinya dimohon dimasukkan dalam arah kebijakan pembangunan yang harus dimuat dalam draf RPJPD.

5.1.2.2. Perwujudan TTD dalam Proses Pembahasan RPJPD di Tingkat Kabupaten di Kalangan non-Pemerintah

a) Realisasi Bentuk TTD Kategori Mengkritik (*to Critize*)

Realisasi bentuk TTD kategori *mengkritik* dalam proses penyusunan RPJPD di tingkat eksekutif di kalangan organisasi non pemerintah sebesar 46 %. Untuk lebih jelasnya seperti uraian berikut ini:

(a) Bentuk sub TTD mengkritik

Mengkritik dalam pengertian ini yaitu memberikan teguran di dalam proses pembahasan RPJPD di forum tingkat kabupaten bersama dengan organisasi non pemerintah. Dalam tuturan ini disampaikan oleh seorang fungsionaris LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, anggota WALHI. Penutur ini di kalangan teman-teman LSM di Solo Raya ini memang dikenal kritis utamanya terhadap kebijakan pemerintah. Dalam tuturan itu, mengkritisi cara menyusun visi dan misi pembangunan daerah, dari segi logika data-data yang tercantum dalam Bab 2 bahwa belum ada tim penyusun bisa menyusun visi, (tuturan ke-32). Itu kan aneh kata seorang WALHI, walaupun setelah ada penjelasan dari tim penyusun draf RPJPD akhirnya dapat menerima alur pemikiran tersebut.

(b) Bentuk sub-TTD menegur

Realita sub-TTD menegur ini juga cukup tinggi ada 15,3 % dari 46 % dari tipe dasar TTD yang terjadi dalam proses perencanaan RPJPD di tingkat kabupaten bersamaan organisasi non pemerintah. Tujuan sub-TTD menegur ini untuk mengingatkan dan menasehati secara keras kepada dalam hal ini tim penyusun RPJPD supaya melakukan suatu pekerjaan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam tuturan ke-35 disampaikan oleh penutur

fungsionaris LSM, yang menyoroti tentang agar pembahasan draf RPJPD dapat intensif mohon dibahas di tingkat komisi-komisi.

Kemudian tuturan ke-42 disampaikan Bapak Sudir, seorang fungsionaris organisasi Angkatan 45, yang menegur kepada tim penyusun RPJPD agar jangan sampai lupa memasukkan nilai-nilai kepribadian bangsa dalam draf RPJPD. Sebab nilai-nilai kepribadian bangsa di dalamnya mengandung nilai pembangunan bangsa dan moral bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Karanganyar pada khususnya.

(c) Bentuk sub-TTD menyindir

Dalam penelitian ini yang dimaksud sub-TTD yaitu yaitu sub-TTD yang bertujuan untuk mengingatkan atau menegur seseorang secara tidak langsung atau tidak terus terang. Menurut Leech (1993:148), menyebutnya sebagai strategi sindiran. Yang dimaksud strategi sindiran yaitu penuturan sebuah ilokusi yang tujuannya diinterpretasi sebagai suatu tujuan tambahan dari pelaksanaan sebuah ilokusi lain. Dalam penelitian ini terjadi pada tuturan ke-39 yang disampaikan penutur pengelola PN-PM, dengan tuturan mestinya alangkah indahnya kalau draf RPJPD ini (*menyindir*) juga telah memasukkan ikon pemberdayaan wanita yaitu MDG.

(d) Bentuk sub-TTD mengancam

Pengertian mengancam dalam penelitian ini yaitu adalah suatu TTD yang mengandung maksud utama agar (01) tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang dinyatakan oleh (02). Jika (01) tidak melakukan sesuatu tindakan sebagaimana yang diancamkan oleh (02) akan berakibat pada kesulitan. Akhirnya, jika kesulitan ini tidak segera dapat teratasi akan menyusahkan bagi (02), (01) atau bahkan menyusahkan keduanya.

Dalam penelitian ini seperti pada tuturan ke-44 yang disampaikan seorang fungsionaris PEPABRI Kabupaten Karanganyar. Intinya, penutur mengancam kepada tim penyusun RPJPD agar seobjektif mungkin dan partisipatif serta harus dapat mengadopsi semua usulan dari masyarakat jangan melakukan *aji mumpung*.

b) Realisasi TTD mengajak (to invite)

TTD Jenis mengajak dalam penelitian ini sebesar 7,7 % yang terdiri dari sub-TTD mengajak, untuk lebih jelasnya seperti uraian berikut.

(a) Bentuk sub-TTD mengajak

Sub-TTD mengajak adalah suatu sub-TTD yang mempunyai tujuan untuk meminta bisa berwujud menyilahkan, menyuruh dan lain sebagainya supaya (01) menuruti sebagaimana yang diharapkan oleh (02). Dalam penelitian ini sub-TTD mengajak seperti pada tuturan yang ke-34 yang disampaikan penutur dari BAPPEDA Kabupaten Karanganyar melalui forum Musrenbangda RPJPD mengajak kepada forum ini untuk mencermati arah kebijakan yang telah sesuai atau yang belum sesuai dengan potensi di Kabupaten Karanganyar. Sebab penyusunan RPJPD ini hanya memuat arah kebijakan yang sifatnya tentu masih sangat umum dan untuk masa 20 tahun, sehingga diperlukan kecermatan dan ketajaman dalam melihat masalah dan potensi proyeksi ke depan.

c) Realisasi TTD memberi nasehat (to advice)

Tindak tutur direktif memberi nasehat dalam kajian ini mencapai 15,4% yang terdiri dari menghimbau ada 7,7 % dan mengingatkan ada 7,7 %. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti uraian berikut.

(a) Bentuk sub-TTD mengingatkan

Pengertian sub-TTD mengingatkan dalam penelitian ini yaitu suatu TTD yang bertujuan untuk memberi ingat atau memberi nasehat, teguran, peringatan supaya seorang ingat akan kewajiban pekerjaan atau tindakan yang harus dilaksanakan. Ini artinya (01) punya tanggung jawab atau kesempatan atau peluang dan karena lupa maka perlu diingatkan, sehingga hal yang dipandang penting tadi dapat dimasukkan dalam draf RPJPD.

Dalam penelitian ini, seperti yang dituturkan penutur anggota tim penyusun RPJPD (tuturan ke-43) berkaitan menanggapi usulan-usulan yang seolah-olah berbagai program harus masuk dalam draf RPJPD, selanjutnya penutur *mengingatkan* bahwa draf RPJPD itu hanya memuat arah kebijakan yang sifatnya masih umum, sehingga belum masuk program bahkan

commit to user

kegiatan. Perlu saya sampaikan bahwa program dan kegiatan itu nantinya akan diakomodasi pada program RPJM dan RKPD tahunan.

(b) Bentuk Sub-TTD menghimbau

Sub-TTD menghimbau adalah suatu TTD yang mempunyai maksud meminta, menyerukan atau mengajak (O1) melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh sebagai mana dikehendaki oleh (O2). Dalam penelitian ini seperti pada tuturan ke-36 disampaikan oleh penutur pengurus KADIN, dalam tuturannya menghimbau kepada tim penyusun RPJPD bila tahunnya dimulai dari tahun 2008-2027. Dari segi logika mestinya betul, tetapi dari segi perencanaan Daerah yang merupakan sistem dari pemerintah pusat yang salah satu masa RPJPD di pemerintah pusat dan propinsi itu berlakunya pada tahun 2005 s.d. 2025, tentu Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari Pemerintah atasannya harus ada kesamaan masa berlakunya RPJPD tersebut.

d) Realisasi Bentuk TTD Kategori Meminta (*to request*)

Realisasi bentuk TTD kategori *meminta* (*to request*) di dalam proses penyusunan RPJPD terdiri dari *meminta* (7,7%), *tawaran* (7,7%) dan *memohon* (7,7%). Untuk lebih jelasnya dapat diikuti tabel berikut.

(a) Bentuk sub-TTD meminta

Pengertian sub-TTD meminta adalah suatu sub-TTD yang bertujuan untuk memohon dan mengharapkan kepada (O1) supaya diberi sesuatu atau menjadi sebuah kenyataan sebagaimana yang diminta oleh (O1). Dalam penelitian ini seperti tuturan ke-37 yang disampaikan penutur anggota tim penyusun RPJPD menggunakan sub-TTD meminta kepada para peserta MUSRENBANG RPJPD, agar memahami dan mengerti bahwa RPJPD itu hanya memuat arah kebijaksanaan pembangunan yang tentu sifatnya agak umum, belum menyentuh atau sampai pada program atau kegiatan yang sudah lebih operasional atau lebih teknis.

(b) Bentuk sub-TTD Tawaran

Maksud sub-TTD tawaran adalah suatu tindak bahasa yang bertujuan untuk menawari atau menawarkan sesuatu kepada (O1) supaya dapat menentukan suatu pilihan sesuai dengan kemauannya. Tidak terdapat unsur

paksaan bagi (01) untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam penelitian seperti pada tuturan ke-40 yang dituturkan oleh penutur Dosen dari APK dan pengurus Gabungan Organisasi Wanita. Dalam tuturannya, penutur menggunakan sub-TTD menawarkan bahwa bunyi berbudaya pada visi sebaiknya diganti sebab kata berbudaya rasa-rasanya “*kok kurang srek*”. Sebab berbudaya saat ini punya konotasi tidak baik seperti berbudaya korupsi, malas, hingga ini akan berpengaruh pada masyarakat Karanganyar.

(c) Sub –TTD memohon

Pengertian sub-TTD memohon adalah merupakan suatu tindak berbahasa yang bertujuan untuk meminta dengan hormat kepada (01) supaya melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh (02). TTD jenis ini merupakan suatu bentuk TTD yang menempatkan (02) lebih rendah kedudukannya dari pada (01). TTD ini berpandangan bahwa seolah-olah (02) sangat membutuhkan dilakukannya suatu tindakan oleh (01), sehingga (02) berharap untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, penutur menggunakan sub-TTD memohon seperti tuturan ke-41 yang dituturkan penutur, Ibu Kepala Desa, agar draf RPJPD dapat memasukkan arah kebijakan tentang keorganisasian wanita secara langsung. Sebab untuk jangka panjang peranan wanita akan sangat menentukan perkembangan karakteristik bangsa.

(e) Realisasi Bentuk TTD- kategori melarang

Kemudian untuk tipe dasar TTD memberi **melarang** sebesar 7,7 % terdiri dari sub-TTD *mencegah* sebesar 7,7 %, untuk lebih jelasnya seperti uraian berikut.

(a) Sub-TTD mencegah

Pengertian sub-TTD mencegah di dalam penelitian ini adalah upaya untuk menahan merintangi atau mengikhtiari supaya jangan terjadi sesuatu. Rencana atau keinginan (02) dalam sub-TTD ini bertujuan supaya (01) ditahan atau dirintangi tidak melakukan sesuatu.

Dalam penelitian ini tuturan ke-38 yang disampaikan oleh penutur, fungsionaris LSM menggunakan sub-tuturan mencegah dengan harapan

sebab di wilayah Kabupaten Karanganyar produk unggulan dan andalan produksi pertanian. Maka dalam kesempatan ini penutur mencegah agar masalah tanaman obat herbal harus dimasukkan dalam arah kebijakan dalam pembangunan pertanian dalam jangka panjang, sebelum RPJPD ini diperdakan.

5.1.2.3 Realisasi TTD dalam proses Pembahasan RPJPD di kalangan eksekutif bersama organisasi non Pemerintah kaitanya dengan prinsip kerja sama dan Prinsip kesopanan.

Tindak tutur direktif pada dasarnya menghendaki bentuk verbal yang sesuai dengan fungsi dan maksud TTD yang diinginkan (02). Untuk mencapai maksud yang diharapkan tersebut TTD harus dapat memberikan hubungan status dan peran pelaku tutur. Peran dan status pelaku tutur inilah yang kemudian berkaitan dengan status kekuasaan (02)–(01). Hal demikian inilah yang menyebabkan kedudukan seseorang dalam proses perencanaan RPJPD berkorelasi dengan status sosial dan kekuasaan yang disandang di masyarakat.

Konsekuensi logis dari kekuasaan itu adalah strategi penggunaan kekuasaan seseorang ke dalam cara berkomunikasi seseorang kepada mitra tuturnya. Perwujudan TTD dan sub-TTD dengan kekuasaan tersebut disebabkan oleh antara lain bahwa seseorang atau penutur harus bekerja sama atau menyenangkan, sehingga perlu menghindari pertentangan, bermakna positif, jelas maksudnya bahkan memiliki nilai-nilai hormat, nilai rendah hati, nilai sadar tempat (Jawa *empan–papan*) dan nilai tenggang rasa.

Ketika seseorang mengedepankan unsur kerja sama itulah sebenarnya dia dalam bertindak tutur direktif memegang prinsip kerja sama (PKS). Ketika seseorang mengutamakan hal yang menyenangkan itulah dia sebenarnya berpijak pada prinsip sopan-santun atau lebih dikenal PSS. Bila penutur berupaya menghindari pertentangan itulah dia sebenarnya berpedoman pada prinsip Ironi (PI) dalam MUSRENBANG RPJPD. Ketika PI mengharuskan bertutur direktif santun tetapi yang ditutur tidak benar karena apa yang dimaksudkan adalah hal yang sebaliknya. Ketiga prinsip

inilah yang dijadikan prinsip dasar untuk menganalisis TTD yang digunakan dalam proses perencanaan RPJPD.

Penerapan prinsip lokal terakhir, yaitu PK adalah jika seorang penutur dalam bertindak TTD selalu menunjukkan rasa hormatnya kepada mitra tuturnya sesuai dengan kedudukannya, maka sesungguhnya ia telah memegang prinsip kerukunan (PK). Untuk lebih jelasnya masing-masing bentuk TTD kaitannya dengan norma kesantunan seperti uraian berikut.

a) Realisasi Bentuk TTD dalam kaitannya dengan PKS

Agar supaya realisasi TTD itu memenuhi tuntutan PKS maka harus dikemukakan dengan cara-cara yang efisien, rasional, jelas, transparan dan penuh kerja sama semaksimal mungkin, sembari memberikan informasi yang tepat dan memadai.

Realisasi TTD dan sub-TTD dalam kaitannya dengan PKS yang dibahas dalam bagian ini dipusatkan hanya tiga maksim. Ketiga maksim itu adalah maksim kuantitas, maksim kualitas dan maksim cara.

Realisasi TTD dan sub-TTD yang memenuhi maksim kuantitas di dalam penelitian ini didasarkan pada kejelasan direktif yang dituju. Realisasi sub-TTD yang dikemukakan secara jelas adalah mengandung maksud: permohonan (tuturan ke-41), permintaan (tuturan ke-37), menghimbau (tuturan ke-37).

b) Realisasi Bentuk TTD dalam kaitannya dengan PSS

Landasan yang digunakan dalam PSS untuk menerjemahkan TTD yang bermodus tak langsung dalam penelitian ini adalah semakin suatu TTD tak langsung maka tuturan itu semakin santun. Dalam kenyataannya sub-TTD PSS ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya lokal dalam penelitian ini yaitu bahasa Jawa. Di mana ada suatu nilai di kebudayaan Jawa itu bila melakukan tuturan diharapkan menjaga kesopanan.

Modifikasi PSS agak lain tentang kaidah realisasi TTD supaya dapat memenuhi kesantunan agar proses tuturan dapat berjalan dengan lancar. Menurut para pakar linguistik derajat PSS dapat dinyatakan dengan menggunakan berbagai modus, sejak dari TTD yang **bermodus** imperatif, eksplisit, berpagar,

berpernyataan saran dan berisyarat halus, berpernyataan dan berpernyataan kelakar. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti tabel berikut.

TABEL 5.16

Realisasi kesantunan TTD PSS serta Implikatur dan maksud TTD dalam perencanaan RPJPD di tingkat kabupaten di kalangan organisasi non-Pemerintah

Kode TT	Modus TTD	TTD	Sub-TTD	Maksud TTD	Implikatur
34	Langsung	Mengajak	mengajak	mencermati potensi dan arah kebijakan pembangunan	Arah kebijaksanaannya agar lebih tajam
37	bersifat umum	Meminta	Meminta	Masa RPJPD diseluruh tingkatan pemerintahan harus sama	Masa RPJPD harus 2005 s.d. 2025.
41	penghormatan	Meminta	memohon	Pentingnya organisasi wanita	Organisasi wanita agar masuk di RPJPD.
43	Berpagar	menasehati	mengingatkan	RPJPD sifatnya masih umum	RPJPD hanya berisi arah kebijakan saja

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2008

Data di atas menunjukkan bahwa prinsip kesantunan PSS dalam proses perencanaan RPJPD ternyata modus TTD-nya sangat bervariasi mulai dari modus tidak langsung, bersifat, penghormatan dan berpagar, selanjutnya jenis dasar direktifnya terdiri dari mengajak, meminta dan menasehati. Kemudian mengenai implikatur dari jenis-jenis tuturan yang disampaikan intinya menghendaki adanya masukan terhadap RPJPD baik itu menyangkut masa RPJPD, dan isi yang ada di dalam RPJPD.

c) Realisasi bentuk TTD dalam kaitannya dengan PI

Pada prinsipnya PI dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan (02) untuk tidak mematuhi PKS. Dengan kata lain PI merupakan bentuk bela diri yang

memadukan seni menyerang dengan sebuah keluguan. Alasan inilah kemudian dikalangan budaya Jawa menyatakan bahwa PI sebenarnya prinsip cemooh tetapi halus.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tuturan yang mewujudkan PI yaitu tuturan ke-32, :tim penyusun kok dapat membuat visi dan misi, opo karena pinternya tim penyusun, tuturan ke-33 draf ini sudah bagus,tapi begini boleh tho kita ngritik:. Tuturan ke-36 seperti: setelah “*tak rasa-rasa kok kurang srek-srek*”, mengapa saya demikian, kita ini kan sudah masuk tahun 2008 kan. Tuturan ke-38, tanaman obat herbal kok kurang tajam,syukur alhamdulillah hari ini saya diundang untuk dapat mencegah, Tuturan ke-39, tetapi mestinya alangkah indahnya kalau draf RPJPD ini (menyindir) juga telah memasukkan ikon MDG. Tuturan ke-44 segala sesuatunya ibaratnya milik-miliknya sendiri, apa lagi yang jadi anggota dewan seolah-olah negaraku, buat aturan dan anggaran hanya yang menguntungkan dirinya sendiri.

d) Realisasi TTD dalam kaitannya dengan Prinsip Relevansi (PR)

Implikatur PR ini dalam cara bertindak tutur direktif adalah bahwa penutur dapat memilih realisasi bentuk TTD melalui eksplikatur dan implikatur. Eksplikatur adalah maksud yang secara eksplisit dimaksudkan oleh penutur. Implikatur adalah maksud yang tidak dinyatakan tetapi dikomunikasikan oleh penutur. Jadi, eksplikatur adalah makna yang tersurat, sedangkan implikatur adalah makna yang tersirat. Maksim relevansi ini kemudian diangkat menjadi sebuah prinsip tersendiri oleh oleh Sperber dan Wilson (1986:158) melalui teori evolutifnya yang berjudul *Relevance Communication and Cognition*. Menurutny, jika prinsip relevansi ini ditaati dengan benar maka maksim kuantitas, kualitas dan cara dapat diabaikan. Teori relevansi ini menegaskan bahwa yang terpenting dalam proses berkomunikasi adalah komunikator harus dapat mengungkapkan pesan yang relevan kepada komunikan. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti tabel berikut.

Tabel 5.17

Realisasi Prinsip Relevansi (PR) dalam proses Pembahasan Perda RPJPD tingkat kabupaten di kalangan eksekutif bersama organisasi non-pemerintah

No.	Realisasi TTD	Jenis tindak tutur		Implikatur TTD	No.TT
		langsung	Tidak langsung		
1	mengkritik	Langsung	-	Penyusunan visi agar runtun dan sistematis	32
2	menegur	langsung	-	Pembahasan draf RPJPD agar tajam mohon dibuat komisi-komisi.	35
3	Menghimbau	langsung	-	masa RPJPD harus sinkron dengan RPJPD pemerintah atasnya	36
4	memohon	langsung	-	mohon organisasi kewanitaan dicantumkan dalam RPJPD	41
5	teguran	langsung	-	mohon kepribadian bangsa dimasukkan dalam arah kebijakan RPJPD	42.

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2008

Tabel di atas menggambarkan bahwa maksim PR dalam proses perencanaan RPJPD di tingkat kabupaten di lingkungan eksekutif bersama organisasi non pemerintah realisasi TTD bermacam-macam seperti: mengkritik, menegur, menghimbau, memohon dan menegur secara umum lebih banyak yang menggunakan kalimat tidak langsung.

e) Realisasi TTD dalam kaitannya dengan Prinsip Pollyanna (PP)

Prinsip ini sesungguhnya dapat dimasukkan ke dalam PSS . Namun Leech (1983 :147-153) menyatakan prinsip itu sebagai prinsip tersendiri jika dikaitkan dengan yang dinamakannya sebagai hipotesis Pollyanna. Hipotesa ini mengatakan ada kecenderungan orang lebih senang menggunakan kata-kata yang baik di dalam mengatakan sesuatu yang bermakna negatif. Mengenai realisasi TTD yang berprinsip PP seperti tabel berikut.

Tabel 5.18

Realisasi TTD dalam proses pembahasan RPJPD di tingkat kabupaten
di kalangan eksekutif bersama organisasi non Pemerintah kaitannya dengan PP

No.	realisasi TTD	Prinsip pollyanna	Tingkatan adverbial	No. TT
1	mengkritik	ungkapan yang menyakitkan	opo karena pinternya tim penyusun tho	32
2	mengkritik	ungkapan yang menyenangkan	draf ini sudah bagus	33
3	mencegah	ucapan syukur	syukur Alhamdulillah	38
4	menyindir	ucapan yang menyenangkan	oke-oke deh masalah ke miskinan sudah cukup banyak	39
5	Teguran	ungkapan yang menyenangkan	Banyak rekan-rekan LSM yang telah memberikan masukan	42

Sumber: Diolah dari data primer.

Dari data-data di atas menunjukkan bahwa penggunaan prinsip Pollyanna yang berkaitan dengan proses penyusunan RPJPD cukup banyak dan bervariasi seperti ungkapan yang menyakitkan, ungkapan yang menyenangkan, dan ucapan syukur. Kemudian mengenai tingkatan adverbialnya ternyata bentuk tuturannya juga bervariasi ada yang terkait bahasa Jawa seperti *apa ora* karena pinternya, bahasa Indonesia draf ini sudah bagus, ada yang berkaitan keagamaan “*syukur Alhamdulillah*”.

f) Realisasi Bentuk TTD dalam Kaitannya dengan PS (prinsip seloroh)

Prinsip seloroh ada yang menamakannya sebagai prinsip kelakar tentu seolah-olah berlawanan dengan PI. Menurut Asim Gunarwan (2005:13), penerapan prinsip ini penutur bertutur tidak santun tetapi ilokusinya santun. Dengan demikian, jika dilihat dari bentuk tuturannya tidak santun, tetapi implikasinya santun.

TABEL 5.19

Realisasi TTD dalam proses perencanaan Perda RPJPD berdasarkan struktur luar, implikasi, daya pragmatik kaitannya dengan kesantunan PS

No	Realisasi TTD	struktur luar TTD	Jenis tindak tutur		Implikatur	daya pragmatik	No TT
			langsung	Tidak langsung			
1	mengkritik	Intonasi keras	langsung	-	alur pikirnya melompat	Proses penyusunan visi kurang pas	32
2	kritik	Intonasinya Tanya	-	Tidak langsung	Perlunya indikator Pembangunan	Perlunya ukuran kinerja pembangunan	33
3	menghimbau	Intonasinya tanya	langsung	-	mulai tahun RPJPD	masa berlakunya agar sama dengan pemerintahan atasnya	36
4	mencegah	rasa syukur	langsung	-	Pentingnya tanaman obat	RPJPD harus mencantumkan arah kebijakan ttg tanaman obat	38
5	menyindir	intonasi tanya	langsung	-	pentingnya MDG	RPJPD agar memuat MDG	39

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2008

Data di atas menunjukkan bahwa wujud tuturan yang santun menurut PI dalam proses penyusunan RPJPD di tingkat kabupaten di kalangan eksekutif bersama organisasi non-pemerintah terdapat lima tuturan yaitu : mengkritik, menghimbau, mencegah, dan menyindir, sedangkan struktur luar TTD-nya tampak pada intonasinya yang keras, tanya, dan syukur.

g) Realisasi Bentuk TTD dalam Kaitannya dengan Prinsip Kerukunan (PK)

Prinsip kerukunan (PK) diperkenalkan oleh Asim Gunarwan dalam pertemuan Linguistik ASEAN tanggal 9-12 Mei 2006. Pada prinsipnya PK ini sebagai prinsip mandiri yang sangat penting dalam masyarakat Jawa didasarkan pada prinsip yang dikemukakan oleh Geertz, yaitu ada dua prinsip yang menentukan pada pergaulan sosial masyarakat Jawa. Kedua prinsip itu adalah

commit to user

prinsip kerukunan dan prinsip hormat (kurmat). Yang pertama dari kata rukun, mengacu pada kewajiban setiap anggota untuk menjaga keseimbangan sosial. Yang kedua bermakna hormat, merujuk ke kewajiban setiap anggota masyarakat untuk menunjukkan hormat kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, tampak pada tuturan sebagai berikut:

Tuturan ke-36 : “Setelah *tak rasa-rasa nang ati kok ora sreke- sreke*, mengapa saya demikian, kita ini kan sudah masuk tahun 2008 saat ini sedang menyusun perencanaan, tetapi kan aneh kenapa kok tahunnya maju.”

Tuturan ke-38 : “*Syukur Alhamdulillah* hari ini saya diundang untuk dapat mencegah dalam pengertian lain belum terlanjur.”

Tuturan ke-41 : “*wonten ing kesempatan punika kula bade* memohon lagi dengan hormat.”

Untuk lebih jelasnya dapat diikuti tabel berikut.

Tabel 5.20

Pemenuhan bidal kurmat dalam prinsip kerukunan bertindak TTD dalam proses pembahasan RPJPD tingkat kabupaten di kalangan eksekutif bersama organisasi non pemerintah

No.	Realisasi TTD	Bidal	Implikatur percakapan	Data
1	menghimbau	perasaan	(02) merasa ora sreke ke hati sebab sekarang ini sudah tahun 2008, kok mulainya tahun 2005	36
2	mencegah	syukur	(02) merasa diundang untuk ikut membahas Draf RPJPD, sehingga dapat mencegah atau mengingatkan tanaman obat harus masuk draf RPJPD.	38
3	memohon	saat puniko	(02) nyuwun bilih oraganisasi wanita kedah masuk di draf RPJPD.	41

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2008

Data di atas menggambarkan bahwa dalam proses pembahasan RPJPD di tingkat kabupaten di kalangan eksekutif bersama organisasi non pemerintah ternyata juga masih yang menggunakan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Jawa dimaksudkan antara lain untuk menjaga hormat dan rasa rukun diantara para mitra tutur yang terlibat dalam pembahasan *draf* RPJPD itu.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara penutur, jenis tuturan dan prinsip kerja sama di tingkat kabupaten di kalangan organisasi non pemerintah, seperti tabel berikut.

Tabel 5.21

Kaitan antara penutur, jenis tuturan, sub-TTD dan prinsip kerja sama dalam proses pembahasan RPJPD tingkat kabupaten di kalangan Organisasi non-Pemerintah.

No. TT	Penutur	Tipe dasar TTD	Sub-TTD	Prinsip kerja sama
32	LSM	mengkritik	mengkritik	PI,PR,PP,PS
33	LSM	mengkritik	mengkritik	PI, PP, PS
34	Bappeda	mengajak	mengajak	PKS, PSS,
35	LSM	mengkritik	menegur	PR,
36	KADIN	nasehat	menghimbau	PKS,PR,PS,PK
37	Anggota tim RPJPD	meminta	meminta	PKS,PSS,
38	LSM	melarang	mencegah	PI,PP,PS,PK
39	pn-pm	mengkritik	menyindir	PI, PP,PS
40	APK	meminta	menawar	PK
41	PKK	meminta	memohon	PKS,PSS,PR,PK
42	ang 45	meminta	menegur	PR,PP
43	Tim RKPD	menasehati	mengingatkan	PKS,PSS,
44	PEPABRI	mengkritik	mengancam	PI

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2008

Data di atas menggambarkan bahwa proses penyusunan RPJPD sebagian besar menggunakan tipe dasar mengkritik, kemudian disusul dengan meminta, menasehati serta melarang. Di dalam tuturan para pembahas ternyata masih banyak yang memikirkan prinsip-prinsip bertutur, agar dalam bertutur nantinya rasa kemitraan, kesatuan dan keselamatan, sehingga rasa persatuan dan kesatuan tetap terjaga.

5.1.2.4 Hasil Proses Pembahasan RPJPD di Tingkat Kabupaten di Kalangan Organisasi non Pemerintah Terhadap pembahasan RPJPD.

Berikut ini akan dibahas bagaimana hasil proses pembahasan terhadap draf Perda RPJPD di tingkat kabupaten di kalangan Organisasi non Pemerintah.

Tabel 5.22

Hasil Evaluasi proses pembahasan RPJPD di kalangan LSM

No.	Nama	Thema	Keterangan					
			Rekomendasi		Tidak direkomendasi		Lain-lain	
			F	%	F	%	F	%
32	LSM	Mengkritik penyusunan visi					1(non substantansi)	25
33	LSM	Mengkritik tentang mengukur visi					1(non Subtansi)	25
34	Bapeda	Mengajak arah kebijakan sesuai potensi	1	16,7				
35	LSM	Menegur perlu dibentuk komisi					1(non substantansi)	25
36	kadin	Menghimbau waktu RPJPD kok mulainya tahun 2005			1	25		
37	Guru	Meminta RPJPD harus sinkron RPJP Nasional	1	16,7			Saran (bukan Substansi)	25
38	LSM)	Mencegah RPJPD jangan sampai lupa memuat	1	16,7				

		tanaman tradisional						
39	pn-pm	<i>Menyindir</i> RPJPD belum memuat ikon wanita	1	16,7				
40	Dosen APK	<i>Tawaran</i> berbudaya diganti berkarakter			1	25		
41	PKK	<i>Memohon</i> organisasi kewanitaan masuk dalam RPJPD	1	16,7				
42	ank 45	<i>Teguran</i> RPJPD kok tidak memuat kepribadian bangsa.			1	25		
43	Guru	<i>Mengingatkan</i> RPJPD belum sampai pada Program.			1	25		
44	Pensiunan ABRI	<i>Mengancam</i> agar RPJPD memuat nilai 45	1	16,7				
		Jumlah per sektoral	6	100	4	100	4	100
		Jumlah seluruhnya	6	42,8	4	28,5	4	28,5

Sumber : Diolah dari data Primer 2008

Dari data di atas menunjukkan bahwa dalam proses pembahasan RPJPD di tingkat organisasi non pemerintah tuturan TTD yang dapat diakomodasi dalam draf RPJPD ada 42,8 % dan yang berwujud saran atau kritikan terhadap RPJPD

tetapi tidak menyangkut substansi RPJPD sebesar 28,5 %, sedangkan hasil tuturan yang tidak diakomodasi dalam draf RPJP daerah sebesar 28,5 %, yang meliputi : berkaitan dengan program dan kegiatan bidang atau SKPD. Sebab di dalam RPJPD itu belum sampai pada program dan kegiatan, Sebab SKPD Daerah itu hanya berisi sampai pada arah kebijakan sektor atau bidang tertentu. meminta, menasehati serta melarang. Di dalam tuturan para pembahas ternyata masih banyak yang memikirkan prinsip-prinsip bertutur, agar dalam bertutur nantinya rasa kemitraan, kesatuan dan keselamatan, sehingga rasa persatuan dan kesatuan tetap terjaga.





BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Hasil analisa dan pembahasan penelitian dapat diturunkan menjadi butir-butir simpulan penting, yaitu sebagai berikut.

1. Hasil penelitian dan perwujudan TTD dalam proses pembahasan Perda RPJPD di Kabupaten Karanganyar sejak dari tingkat desa sampai tingkat Propinsi Jawa Tengah

Wujud TTD yang digunakan oleh (01) dan (02) dalam proses pembahasan RPJPD di **tingkat desa**, dapat disimpulkan menjadi 5 tipe dasar: pertama, tipe dasar *memerintah*, (25%) meliputi sub-TTD : *mengharuskan*, dan *menyilahkan*. Kedua, Tipe dasar *meminta* (40,3%), meliputi sub-TTD: *meminta*, *mengharapkan*, dan *memohon*. Ketiga, tipe dasar *mengajak* (8,3%), meliputi sub-TTD : *mendukung*.. Keempat, Tipe dasar *menasehati* (16,6%) meliputi: *menghimbau*.. Kelima, Tipe dasar *mengkritik* (8,3) meliputi sub-TTD : *mengecam*. Sedangkan untuk **tingkat kecamatan** tindak tutur yang terjadi ada 4 tipe dasar yaitu: pertama, tipe dasar *meminta* (45,5%) terdiri dari sub TTD : *memohon* , *meminta*, *mengharapkan*. Kedua: tipe dasar: *menasehati* (20%) terdiri dari *menghimbau* dan *mengingatikan*. Ketiga tipe dasar *mengajak* (18,2%) terdiri dari sub TTD , *mengajak*. Keempat tipe dasar *melarang* (9,1%) terdiri dari sub TTD *melarang*.

Selanjutnya untuk **tingkat kabupaten di kalangan SKPD** TTD yang muncul ada 3 tipe dasar terdiri dari pertama ,tipe dasar *meminta* (55,6%) terdiri dari sub-TTD *memohon* dan *mengharapkan*. Kedua tipe dasar *menasehati* (33,3%) terdiri dari sub-TTD : *menghimbau* dan *mengingatikan*. Ketiga tipe dasar *mengkritik* (11,1%) terdiri dari sub-TTD *mengecam*.

commit to user

Sementara itu, di tingkat Kabupaten ini di kalangan LSM TTD yang terjadi dalam proses pembahasan RPJPD ada 5 tipe dasar yang terdiri dari pertama tipe dasar *mengkritik* sebesar (46%) terdiri dari sub-TTD *mengkritik, menegur, menyindir dan mengancam*. Kedua TTD *mengajak* (7,7%) terdiri dari *mengajak*. Ketiga tipe dasar *menasehati* (15,4%) terdiri dari sub-TTD *menghimbau dan mengingatkan*. Keempat tipe dasar *meminta* (23,1%) terdiri dari sub-TTD *meminta, tawaran dan memohon*. Kelima tipe dasar *melarang* (7,7%)

terdiri dari *mencegah*, sedangkan di kalangan DPRD TTD yang muncul ada 4 tipe dasar yaitu pertama ;tipe dasar *meminta* (35,7%) terdiri dari sub-TTD: *mengharapkan dan memohon*. Kedua tipe dasar *menasehati* (21,3%) terdiri dari *menyarankan dan mengingatkan*. Ketiga tipe dasar *melarang* (14,2%) terdiri dari sub-TTD *melarang*. Keempat tipe dasar *mengkritik* (28,5%) terdiri dari sub-TTD *mengkritik dan menyindir*.

Kemudian jenis tuturan yang muncul pada proses pembahasan RPJPD di tingkat Propinsi Jawa Tengah ada 3 tipe dasar yaitu pertama tipe dasar *meminta* sebesar (50%) terdiri dari sub-TTD *mengharapkan, memohon dan meminta*. Kedua tipe dasar; *memerintah* (25%) terdiri dari sub-TTD *mengharuskan*. Ketiga tipe dasar *menasehati* (25%) terdiri dari sub-TTD *menyarankan dan menyerukan*.

Temuan-temuan penelitian tersebut searah dengan pendapat para pakar linguistik seperti Austin (1962; 5 tipe), Searle (1969;5 tipe), Coulthard (1985; 5 tipe) Kreidler (1998;3 tipe) , dan Ibrahim (1993; 6 tipe dasar). Dengan demikian dengan memperhatikan jenis TTD yang muncul di tingkat desa sampai di tingkat Propinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa wujud TTD dalam proses pembahasan RPJPD terdapat **6 tipe dasar** yaitu: pertama, tipe dasar *meminta* terdiri dari sub-TTD *mengharapkan, memohon dan meminta dan menawarkan*. . Kedua tipe dasar *menasehati* terdiri dari sub-TTD

commit to user

menasehati,menyarankan, mengingat dan menghimbau dan menyerukan Ketiga tipe dasar *mengajak* terdiri dari sub-TTD *mengajak, mendorong, mendukung,mendesak dan menargetkan*.Keempat tipe dasar *memerintah* terdiri dari sub-TTD *memerintah menyilahkan dan mengharuskan*. Kelima *melarang* terdiri dari sub TTD *melarang dan mencega, mengancam dan menolak*. Keenam tipe dasar *mengkritik* terdiri dari sub TTD *mengkritik dan menyindir , menegur dan mengancam dan mengumpat*.

Realisasi perwujudan TTD di dalam proses pembahasan RPJPD pada dasarnya tidak pernah tunggal. terdapat semacam gradasi, sejak dari TTD yang paling direktif sampai dengan TTD yang kurang direktif, sejak dari TTD yang paling keras sampai dengan TTD yang paling lemah, bahkan sejak dari TTD yang paling santun sampai TTD yang kurang santun.

Bila dilihat dari urutan yang paling banyak digunakan untuk tingkat desa sebagian besar pada tipe dasar ***meminta*** (40,3%), hal ini wajar sebab masyarakat desa biasanya mengharapkan dengan sangat supaya (01) atau nara sumber memenuhi permintaanya dalam bentuk arah kebijakan atau program. Para penutur (01 maupun 02) banyak yang menggunakan jenis tuturan langsung dan langsung literal, di mana hal ini menunjukkan adanya perubahan pola bertutur **secara modern**, dimana cara bertuturnya secara langsung dan langsung literal tidak lagi berputar-putar seperti pada masyarakat yang belum maju pada zaman dahulu.

Bila di lihat dari status desa, tampak antara desa yang kurang maju, sedang dan desa maju **tidak terdapat adanya perbedaan jumlah penutur TTD dan status penutur**. Untuk desa yang kurang maju lebih banyak yang menggunakan jenis sub-TTD *meminta, menyilahkan dan mengancam*, sedangkan desa yang berstatus maju justru lebih banyak yang menggunakan sub-TTD,*mengharapkan,menghimbau dan mengharuskan*. Karakteristik tuturan direktif yang dikemukakan tidak merefleksikan **ciri-ciri desa**, tetapi isi yang dituturkan **condong merefleksikan untuk kepentingan desanya atau kelompoknya**. Hal ini terjadi karena penutur di tingkat desa lebih banyak dimatangkan dari

commit to user

profesi atau kerja di luar desanya misalnya menjadi kepala sekolah pegawai kantor aktifis LSM dan sejenisnya.

Bila dilihat dari urutan penggunaan TTD paling tinggi **ditingkat kecamatan** meminta (40,3%) hal ini tampaknya menunjukkan bahwa dalam proses pembahasan RPJPD penutur (02) walaupun status sosialnya lebih tinggi umumnya, tetapi tuturannya menggunakan sub-TTD *meminta* sesuatu program pembangunan (**merendahkan diri**) kepada nara sumber untuk menjaga keseimbangan atau keharmonisan dalam proses MUSRENBANGDA tersebut.

Status kecamatan berpengaruh terhadap jumlah penutur, untuk kecamatan yang maju dan kurang maju jumlah penutur yang menggunakan direktif sama. Untuk kecamatan yang kurang maju (Kecamatan Gondangrejo) justru jumlah penuturnya yang menggunakan direktif didominasi dari unsur masyarakat (kepala desa, anggota BPD dan tokoh-tokoh agama), sedangkan di kecamatan yang maju (Kecamatan Jaten) penuturnya sebagian besar dilakukan oleh pejabat lokal (nara sumber dari SKPD).

Secara umum bentuk tuturan sangat kental dipengaruhi oleh budaya Jawa untuk menjaga keharmonisan "hurmat" *andhap ashor*, rendah hati, *ampan papan dan tepo sliro*, sehingga pelaksanaan MUSRENBANG walaupun berbeda pendapat tetap berjalan lancar.

Temuan lain yang menarik, apa yang dituturkan sering dipengaruhi posisi penutur, dimana pada tingkat desa penutur ada yang berperan sebagai nara sumber (Kepala desa dan anggota BPD) seolah-olah selalu sebagai penyaring atau pengarah usulan dari masyarakat. Namun demikian penutur tersebut setelah sebagai peserta MUSRENBANG di tingkat kecamatan atau / dan kabupaten seolah-olah bertindak sebagai **pengawal program** yang diusulkan dari tingkat desa, sehingga tidak jarang nada suaranya menjadi **vokal dan keras** untuk mempertahankan usulannya.

Para penutur maupun mitra tutur yang menggunakan tuturan direktif sebagian besar menggunakan jenis tuturan langsung literal bahwa di masyarakat dalam MUSRENBANG terjadi perubahan pola bertutur dari yang biasanya berputar-putar secara tidak langsung berubah menuju kearah **yang lebih spesifik dan modern**.

Tuturan direktif yang terjadi dalam proses membahas RPJPD di tingkat kecamatan sebagian besar 60 % tidak diakomodasi dalam penyusunan RPJPD.

Bila di lihat dari urutan yang paling banyak digunakan untuk tingkat kabupaten di kalangan SKPD seperti dinas, badan atau kantor sebagian besar pada tipe dasar *meminta* (55,6%). Sebab para penutur yang berasal dari SKPD yang dituturkan sebagian besar hanya yang terkait dengan tupoksi SKPD-nya masing-masing dan nuansa pembicaraannya semua hanya meminta kepada para nara sumber tentang program pembangunan.

Pembahasan RPJPD di kalangan SKPD banyak dihadiri pejabat formal baik tingkat kabupaten maupun propinsi. Hasil MUSRENBANG tersebut sebagian besar (56 persen) berisi motivasi, dorongan dan harapan kepada para peserta MUSRENBANG untuk mengkritisi terhadap draf RPJPD.. Dalam tuturannya pejabat yang hadir lebih banyak yang menggunakan sub-TTD, *memohon*, *meminta* dan *mengharapkan* untuk menghormati dan agar mendapat simpatik dari mitra tuturnya walaupun (01) penutur statusnya lebih tinggi dari pada mitra tuturnya.

Dalam proses pembahasan RPJPD di kalangan SKPD sebesar 44 % isi pembahasan materi RPJPD dapat diakomodasi oleh tim penyusun RPJPD untuk penyempurnaan draf RPJPD sebelum diajukan ke tingkat DPRD.

Bila dilihat dari urutan yang paling banyak digunakan untuk di kalangan **organisasi non pemerintah** (LSM) sebagian besar pada **tipe dasar mengkritik** (46%). Hal ini wajar dan sering dilakukan oleh penutur dari LSM yaitu memberikan teguran atau kritikan untuk mendapatkan

pemikiran alternatif lain, selama tidak keluar dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Para penutur (01) maupun mitra tutur (02) banyak yang menggunakan jenis tuturan **langsung literal** dimana para penutur di kalangan LSM yang dituturkan maksudnya sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Isi materi yang dituturkan di kalangan anggota organisasi non-pemerintah sebagian besar terkait dengan potensi dan kondisi yang ada di daerah serta isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat.

Dalam proses pembahasan RPJPD di kalangan organisasi non-pemerintah, isi bahasan sebesar 42,8% diakomodasi oleh tim penyusunan RPJP Daerah.

Bila dilihat dari tuturan yang paling banyak muncul dalam proses pembahasan RPJPD di kalangan anggota DPRD dari segi **tipe dasar meminta** sebesar 35,7%. Tujuan penggunaan tipe dasar meminta untuk mendapatkan sesuatu dari nara sumber (01) sebagaimana dikehendaki oleh mitra tutur (02). Dengan demikian anggota DPRD sebenarnya kedudukannya lebih tinggi dari pada para tim penyusun RPJPD, namun anggota DPRD menggunakan kata *meminta* untuk menjaga agar mendapat simpatik dari pihak eksekutif, sehingga proses pembahasan RPJPD dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya mengenai sub-TTD mengkritik keseringan perwujudan menunjukan frekuensi yang paling tinggi yaitu 21,4%. Hal ini wajar sebab pada tahap-tahap awal pembahasan draf RPJPD terus mendapatkan *kritikan* bahkan sampai timbul sub-TTD *menolak* dan *melarang* untuk dibahas lebih lanjut. Namun setelah ditengah-tengah pembahasan draf Perda RPJPD diselenggarakan **studi banding** ke kabupaten lain yang telah memiliki perda RPJPD suasana pembahasan draf RPJPD akan cepat-cepat segera diperdakan.

Jenis-jenis tindak tutur dalam proses pembahasan RPJPD di kalangan DPRD sebagian besar menggunakan **kalimat langsung** dan **langsung literal** dengan Implikatur yang terkait dengan visi dan misi

commit to user

pembangunan daerah. Dengan demikian penjelasan apapun atau dengan data selengkapapapun kalau belum diselenggarakan **studi banding pokoknya tidak akan membahas draf RPJPD** tersebut.

Hasil bahasan draf RPJPD yang menggunakan TTD di forum Pansus DPRD sebagian besar 50% diakomodasi dalam perbaikan Perda RPJPD. Dili-

hat dari frekuensi kemunculannya yang paling tinggi ditingkat Propinsi dalam proses pembahasan RPJPD tipe dasar *meminta* (50 %). Hal ini disebabkan para penutur yang terdiri dari tim review RPJPD tingkat Propinsi Jawa Tengah selalu membahas draf RPJPD dari segi normatif, dasar hukum dan sistematik, sehingga tipe dasar direktifnya banyak menggunakan tuturan *meminta*, seolah-olah harus dilaksanakan, sehingga agar dimata mitra tutur lebih terhormat dan sopan, sehingga komunikasi dapat berjalan lancar.

Penggunaan wujud tuturan sub-TTD frekuensinya paling tinggi yang digunakan yaitu sub-TTD *mengharapkan* sebesar 33,3%.. Pada umumnya para penutur dalam mengomtari draf RPJPD menggunakan sub-TTD *mengharapkan* dengan alasan berpegang pada normatif, ketentuan yang terkait dengan perundang-undangan seperti pasal-pasal dalam perda. Para pejabat di lingkungan pemda Propinsi Jawa Tengah yang berbudaya Jawa senantiasa berpegang pada falsafah “*ing ngarso sung tulodo,ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani*”. Pada prinsipnya bagi tim review RPJPD Propinsi Jawa Tengah sebenarnya selalu mempunyai dorongan atau saran-saran kepada tim penyusun RPJPD agar selalu memperbaiki draf perda RPJPD, sehingga perda RPJPD betul-betul baik dan tidak cacat hukum.

7.1.2 Hasil Penelitian dan Realisasi TTD Dalam Proses Pembahasan RPJPD kaitannya dengan PKS , PSS, PR,PI ,PP, PS dan PK

Secara umum bahwa realisasi TTD bagi para penutur dan petutur

commit to user

petutur dalam proses pembahasan RPJPD berpijak pada prinsip-prinsip dasar berkomunikasi ,yaitu PKS dan PSS. Prinsip dasar PKS memerlukan dua unsur, yaitu PKS dan PR.Prinsip dasar PSS memerlukan lima unsure, yaitu PSS, PI, PP, PS, dan PK. Realisasi TTD yang mendasari PKS adalah maksim kuantitas, maksim kualitas dan maksim cara. Realisasi TTD yang memenuhi maksim kuantitas didasarkan pada submaksim kejelasan direktif (*memohon, mengharapkan , meminta, memerintah dan melarang*).

Realisasi TTD yang memenuhi maksim kualitas didasarkan pada maksim : (a) kebenaran direktif (*mengharapkan dan mendukung*) ; dan (b) kecukupan bukti (*menasihati, memerintah dan mengingatkan*). Realisasi TTD yang memenuhi maksim cara didasarkan pada submaksim: (a) ketepatan (*meminta, menasihati, mengimbau, memerintah dan mengingatkan*) ;(b) ketidaktaksaaan (*mengharapkan dan mengancam*); (c) keringkasan (*menyilahkan, memohon, mengharapkan, meminta vvvmemerintah*); (d) keruntutan (*memohon , mengharapkan, menasihati, memerintah*).

Realisasi TTD yang digunakan oleh para penutur (01)dan (02) sejak dari tingkat desa sampai propinsi dalam proses pembahasan RPJPD yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar PSS teori Brown-Levinson, Blum-Kulka, dan Leech. Strategi kesantunan bertutur direktif yang dikembangkan oleh para penutur dalam proses pembahasan RPJPD berdasarkan teori Brown-Levinson dikemukakan dengan cara: (a) tak langsung (b) berpagar, (c) pesimisme, (d) penghormatan. Strategi kesantunan direktif yang dikembangkan oleh penutur (01 dan 02) dalam proses pembahasan RPJPD berdasarkan teori Blum-Kulka yang dikemukakan dengan cara-cara: (a) bermodus imperative, (b) performatif eksplisit , (c) performatif berpagar (d) performatif, (e) rumusan saran.

Realisasi TTD yang dikemukakan oleh penutur (01 dan 02) dalam proses pembahasan RPJPD dengan cara-cara ironi bertujuan untuk *menyarankan* jika berVP *implicit mengajak* jika berintonasi tanya, *mengimbau* jika berintonasi tanya. *menyerukan* jika berupa pengulangan.

Kepatuhan realisasi TTD yang dikemukakan oleh para penutur maupun mitra tutur baik di tingkat desa sampai propinsi dalam proses pembahasan

commit to user

RPJPD berupa ungkapan yang menyenangkan untuk tujuan *memerintah, menyarankan, menyilakan* dan ungkapan yang tidak menyakitkan hati untuk tujuan *mengharapkan*.

Prinsip kerukunan bertindak tutur direktif bagi penutur dan mitra tutur yang berlatar belakang budaya Jawa sejak dari desa sampai tingkat Propinsi dalam proses pembahasan RPJPD direalisasikan dengan bidal kurmat “hormat “ untuk tujuan *memohonkan menasehati serta meminta*, melalui bidal andhap asor” rendah hati” untuk tujuan *mengarahkan dan mengharapkan*; melalui bidal *empan papan* “sadar akan tempat” untuk tujuan *menasehati dan mendorong*; melalui bidal *tepo sliro*” tenggang rasa“ untuk tujuan *menyarankan dan mengingatkan*.

7.1.3 Faktor-Faktor yang Mmelatarbelakangi Munculnya Tuturan Direktif

Setiap unit terkecil dari komunikasi bukanlah kata atau kalimat, sedang para penganut linguistik formal memandang bahwa kalimat selalu mengandung suatu proposisi yang bernilai benar atau salah. Sebaliknya dalam pragmatik pernyataan-pernyataan tidak hanya bersifat “*constative tetapi juga performative*” bahwa penutur tidak sekedar mengatakan sesuatu tetapi juga **melakukan sesuatu** (Austin, 1962:123). Untuk itu perlu dipahami hubungan antara kata, makna kata dan dunia kenyataan (referensial).

Oleh karena itu setiap kata terdapat hubungan (1) kata sebagai satuan fonologis yang membawa makna.(2) makna atau konsep yang dibentuk oleh kata (3) dunia kenyataan yang ditunjuk (diacu) kata merupakan hubungan referensial. Dengandemikian hubungan referensial yaitu hubungan yang terdapat antara sebuah kata dan dunia luar bahasa yang diacu oleh pembicara. Hubungan antara kata (lambang), makna (konsep) dan sesuatu yang diacu (referent) adalah hubungan yang tidak langsung. Dari kerangka pikir tersebut dapat disimpulkan dalam penelitian tersebut ,bahwa penutur yang menggunakan sub-TTD tertentu tentu terkait dengan obyek-obyek yang diacu (dunia kenyataan yang diacu / referent). Berikut ini akan diidentifikasi faktor-faktor

yang melatarbelakangi munculnya tuturan direktif dalam proses pemahasan RPJPD sejak dari tingkat desa sampai tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi sub-TTD *meminta* antara lain suatu tuturan, dimana penutur berharap untuk mendapatkan sesuatu dari mitra tuturnya. Dimana penutur walaupun status sosialnya lebih tinggi banyak yang menggunakan sub-TTD *meminta*, demi menghormati dan agar mendapatkan simpatik dari mitra tuturnya. Selanjutnya faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan sub-TTD *menyilahkan* antara lain yaitu tidak melakukan sesuatu tetapi sudah merupakan seruan yang tidak dipaksakan, sedangkan untuk sub-TTD *memohon* dan *mengharapkan* polanya hampir sama yaitu sub-TTD *memohon* memintakan sesuatu dari (01) supaya melakukan sesuatu atas permintaan mitra tuturnya. Selanjutnya untuk sub-TTD *mengharapkan* si penutur sedang dalam posisi tidak berdaya. Kedua-duanya dalam penelitian ini sebenarnya dituturkan oleh orang yang memiliki status sosial yang cenderung lebih tinggi dari mitra tuturnya, namun demikian guna menjaga aspek kehormatan dan menjaga keharmonisan agar dalam MUSRENBANG itu akan dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu, untuk sub-TTD *menghimbau* digunakan dengan latar belakang permintaan seruan atau ajakan yang dikehendaki oleh mitra tuturnya. Penggunaan sub-TTD *menghimbau* dilihat dari aspek prinsip kerja sama jenis tuturan ini termasuk katagori **santun**, sedangkan penggunaan sub-TTD *permohonan* menunjukkan **sangat santun**. Bila dibandingkan dengan sub-TTD *mengancam dan mengkritik* menunjukkan tuturan yang kesantunannya rendah (**kasar**).

Untuk faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan sub-TTD *mengajak* antara lain semata-mata untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh (02), sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar, sedangkan latar belakang penggunaan sub-TTD *mengingatkan* karena sesuatu tidak dilaksanakan atau mestinya di-

commit to user

laksanakan malah tidak dilaksanakan perlu diingatkannya , sehingga arah kebijaksanaan
annya dapat berjalan lancar.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan sub-TTD *mengkritik* antara lain memberikan teguran kepada mitra tuturnya (tim penyusun RPJP Daerah) di dalam proses penyusunan RPJP Daerah. Dimana cara mengkritiknya dilakukan secara lang- sung literal, sedangkan latar belakang penggunaan sub-TTD *menyindir* menegur sese orang secara tidak terus terang. Sementara itu latar belakang penggunaan sub-TTD *menyarankan* antara lain mengandung pendapat (02) supaya dipertimbangkan oleh (01) dalam bertindak kaitannya dalam memasukkan arah kebijakan pembangunan daerah.

Sub-TTD *menegur* dilatarbelakangi suatu tuturan yang mengingatkan secara keras kepada seseorang supaya bersedia melakukan sesuatu atau memasukan suatu program di dalam draf RPJP Daerah.

7.1.4 Jargon pembangunan dan bahasa steoritif lainnya yang muncul dalam proses Pembahasan RPJP Daerah

Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi antar manusia dan bahasa juga berfungsi sebagai alat penyampai ide / gagasan manusia dengan tujuan–tujuan praktisnya. Dalam konteks relasi sosial ini, bahasa memiliki sifat language arbitrary yaitu tidak hanya persamaan antara aturan gramatikal dengan maknanya, namun yang lebih penting adalah tujuan dari makna tersebut. Dengan demikian, makna simbolik merupakan instrument dominasi di dalam setiap proses komunikasi selalu terdapat maksud-maksud yang tersembunyi di balik simbol-simbol yang digunakan. Sistem simbolik ini diciptakan dan dipergunakan, baik oleh keseluruhan suatu kelompok atau sekumpulan para ahli yang memiliki otonom di bidang produksi dan kekuasaan simbolik, sehingga menunjukkan adanya bahasa khusus atau bahasa tipikal yang mirip kosa kata yang spesifik seperti **jargon pembangunan**.

Dalam penelitian ini para peserta Musrenbangda dalam proses pembahasan RPJP Daerah semua berlatarbelakang budaya Jawa, maka bahasa kosa kata yang spesifik seperti jargon-jargon pembangunan yang muncul juga bernuansa budaya Jawa. Beberapa jargon pembangunan yang muncul juga bernuansa budaya Jawa. Beberapa jargon pembangunan yang muncul dalam proses pembahasan RPJP Daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. **Berkategori Coode mixin (campur kode)** yang meliputi:

a. peserta Musrenbangda yang berlatar belakang budaya Jawa pada waktu berbahasa Indonesia kadang-kadang dicampur bahasa Jawa, seperti berikut ini.

- 1) *Nuwun sewu*
- 2) *Kita rembukan*
- 3) *Tidak mubadir*
- 4) *Too yo sedulur*
- 5) *Mbok mengalah sedikit to*
- 6) *Yak iyo to*
- 7) *Glontoran dana*
- 8) *Kudu sabar lan narimo to*
- 9) *Kucuran*
- 10) *Mbok ojo gonta –ganti to*
- 11) *Dimentahkan kembali*
- 12) *Enak to deh*
- 13) *Begitu trontong-trontong*
- 14) *Mbok aja galak-galak to*
- 15) *Wong sabar kuwi dowo umure*
- 16) *Usus dawa kuwi kekasih Alloh*
- 17) *Mbok aja dumeh*
- 18) *Nggege mongso*
- 19) *Hantam kromo (membabi buta)*
- 20) *Ambeg para Marto (Menjaga orang lain)*
- 21) *Loro-loroning atunggal (dua-duanya menyatu)*
- 22) *Kok lucu*

23) *Kok bias*

24) *Wonten ing kesempatan punika kula badhe*

a. Kategori dari kata atau istilah yang digunakan peminjaman dari bahasa Inggris

antara lain sebagai berikut.

- 1) Bottleneck (kemacetan)
- 2) Grace periode (masa gemilang)
- 3) Resedu ling (Penjadwalan kembali)
- 4) Current budget (Anggaran berimbang)
- 5) Joint venture (usaha bersama)
- 6) Tor of Refrence (Bahan acuan)
- 7) Steakholder (Pemangku kepentingan)

2. Berkategori Akronim antara lain berujud:

- 1) Propoda (Promosi Potensi Daerah)
- 2) Propeda (Program pembangunan Daerah)
- 3) Pripemda (Prioritas Pembangunan Daerah)
- 4) AKU (Arah kebijakan umum)
- 5) KUA (Kebijakan umum Anggran)
- 6) Pedamas (Peningkatan pendapatan masyarakat)
- 7) Pertekom (Peralatan Teknologi Komunikasi)
- 8) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
- 9) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- 10) RPJP D (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
- 11) PPAS (Prioritas Program Anggaran Sementara)
- 12) INTAN PARI (Industri pertanian dan Pariwisata).
- 13) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah -5 tahun).

3.a Katagori istilah-istilah kearah ketertiban, kesatuan dan kemajuan daerah

- 1) Azas tunggal
- 2) Wawasan nusantara

- 3) Sumber Daya Manusia (SDM)
- 4) Tinggal landas
- 5) Disiplin nasional
- 6) Mawas diri
- 7) Keterbukaan

b. Katagori kata yang menjurus kearah pertentangan, permusuhan dan kekacauan

- 1) Anti pembangunan
- 2) Ekstrim kanan atau kiri
- 3) Sara
- 4) Terlibat
- 5) Bersih diri
- 6) Kiri baru
- 7) Reformis
- 8) Teroris
- 9) Apatis
- 10) Morfinis
- 11) Ateis
- 12) Pri-non pri
- 13) Mempermalukan bangsa
- 14) Gangguan keamanan
- 15) Subversi
- 16) Mbalelo
- 17) Berada di luar system kamu itu.
- 18) Mendalangi
- 19) Adu domba
- 20) Kecemburuan sosial.

4.a Kategori istilah-istilah konvergensi yang menuju integrasi nasional

- 1) Azas tunggal
- 2) Musyawarah-mufakat
- 3) Kebulatan tekad
- 4) Doa politik
- 5) Kerukunan agama
- 6) Sambung rasa
- 7) Kemitraan
- 8) Kesetiakawanan social
- 9) ABRI masuk Desa
- 10) Hakim masuk desa

b. Kategori istilah yang memacu ke arah disintegrasi bangsa / perpecahan atau justru memacu timbulnya konflik sosial.

- 1) Konflik
- 2) Sara
- 3) Radikalisme
- 4) Sikap intoleransi
- 5) Brutalisme
- 6) Babat aja itu
- 7) Libas saja
- 8) Kriminalitas
- 9) Melunturnya kesetiakawan social
- 10) Penindasan
- 11) Dehumanisasi

5 Kategori dari istilah atau kata yang muncerminkan bahasa Politik yang muncul yang bersifat “OPOSAN” atau penyeimbang/ pengontrol terhadap kebijakan pemerintah yaitu.

- 1) Lembaga bantuan Hukum (LBH)

UIN Ar-Raniry

- 2) Forum Demokrasi
- 3) Serikat Buruh oposan dari serikat kerja bentukan pemerintah
- 4) Advokasi
- 5) Perlawanan terhadap tirani kemapanan

6. Kategori dari kata atau istilah muncul yang khas antara lain sebagai berikut.

- 1) Cergas (Daerah ada perubahan tetapi rutin)
- 2) Asupan (masukan untuk program atau kegiatan)
- 3) Sralir (Kita pasrah ikuti aja aliran air atau keputusan pemerintah)
- 4) Intan Pari (Industri pertanian dan pariwisata)

7.1.5 Pendapat pemuka pendapat terhadap bahasa perda RPJP Daerah

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional atau Daerah. Dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga mem beri keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah (5 tahun) dan tahunan.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa se karang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

commit to user

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang , sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Dengan adanya perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan yaitu dengan dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Pada hal Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanatkan dalam pembukaan Undang-undang 1945. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang–RPJP Daerah. Disamping itu, berdasarkan Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pada Bab VII pasal 150 dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Dengan berlakunya undang-undang nomor: 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah termasuk menyusun dokumentasi penyusunan RPJP Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, daerah maupun pembangunan antar daerah. Dengan demikian diharapkan dalam melaksanakan pembangunan daerah harus ada acuan atau arahnya yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah, dimana dokumentasi pembangunan tersebut harus sinkron dan koordinatif antara perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahannya.

Secara umum para stakeholder dan tokoh-tokoh masyarakat menyambut baik dan antusias dengan terbitnya perda RPJP Daerah. Sebab sesuai dengan Undang-undang nomor: 25 tahun 2004 pemerintah daerah kabupaten dan propinsi wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, namun tampaknya para stakeholder dan tokoh-tokoh masyarakat belum paham betul tentang isi RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Sebab para stakeholder tersebut tampak belum paham betul tentang isi RPJP Daerah. Hal ini dapat dilihat para nara sumber sebagian besar masih menanyakan atau mempersoalkan program-program pembangunan dan indikator kuantitatif program tersebut. Padahal menurut Juklak penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah nomor: 050/1123/II/Bangda, Depdagri tanggal 30 Agustus 2005 telah dijelaskan bahwa RPJP Daerah itu hanya berisi visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan, artinya belum sampai pada program kerja.

Dengan terbitnya Perda RPJP Daerah sebenarnya telah dijadikan acuan para SKPD dan organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi belum maksimal. Hal ini disebabkan PERDA RPJP Daerah itu belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga visi dan arah kebijaksanaan pembangunannya belum banyak dipahami oleh seluruh organisasi masyarakatnya. Untuk menjabarkan arah kebijaksanaan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Namun dalam kenyataannya aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar belum siap. masih ada beberapa kendala antara lain: (1) Sumber daya manusia yang militan, (2) kualitas aparatur yang ada saat ini, (3) cuaca yang berubah-ubah bahkan sering ada bencana alam / bencana tanah longsor, (4) masih terbatasnya sarana dan prasarana kantor yang ada.

Dilihat dari segi keahsaannya tentang Perda RPJP Daerah secara umum mudah dipahami baik itu oleh kelompok birokrasi, cendekiawan maupun masyarakat umum, hanya ada catatan yaitu untuk istilah-istilah asing perlu penjelasan di belakang kata asing tersebut. Dengan kata lain dari segi bahasa sebenarnya sudah cukup “komunikatif” artinya tulisan dan simbol-simbol yang tertuang dalam naskah RPJP Daerah maknanya mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat umum hanya masih ditemukan istilah-istilah Jawa seperti; kesrakat,

commit to user

maturnuwun dan sebagainya. Dengan demikian RPJP Daerah diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah serta acuan bagi lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar untuk masa 20 tahun sampai tahun 2025 mendatang.

7.2 Saran-saran

Berdasarkan pengalaman empiris selama teknik penyediaan data, deskripsi data, tabulasi data, analisa data sampai dengan tahap penyusunan laporan pemkian TTD dan sub TTD dalam proses pembahasan RPJP Daerah disarankan agar :

1. Para penutur yang terlibat dalam proses pembahasan RPJP Daerah isi tuturannya condong merefleksikan kepentingan kelompok, daerah atau pribadinya, sehingga untuk masa –masa mendatang dalam membahas dokumentasi perencanaan pembangunan daerah perlu dibentuk komisi-komisi yang anggotanya terdiri dari para orang-orang yang pakar dan profesional betul, sehingga dalam pembahasan rencana kerja betul-betul dapat obyektif dan tajam sesuai porsinya dan obyektif.
2. Jangkauan bentuk-bentuk penelitian perwujudan TTD dalam proses pembahasan RPJP Daerah pada BAB IV dan V ini baru diidentifikasi sampai tahap tipe dasar dan tipe utama (kategori) serta sub-sub TTD-nya, sehingga perlu sangat diperlukan lagi penelitian lanjutan tentang setiap tipe dasar, tipe utama, dan sub-TTD-nya tersebut menurut perilaku sosiopragmatiknya.
3. Hasil penelitian atas penggunaan tuturan direktif dalam proses pembahasan RPJP Daerah ini dapat digunakan bahan acuan para perencana pembangunan daerah baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Di dalam proses pembahasan RPJP Daerah baik dari desa sampai tingkat propinsi yang dilakukan secara formal masih sering kita temui perpaduan dua bahasa yaitu bahasa indonesia dan bahasa Jawa (coode mixin) memiliki kesan yang unik dan spesifik. Akan tetapi, untuk mewujudkan pemakaian bahasa indonesia standar, pemakaian bentuk-bentuk baur demikian mencemari kebakuan bahasa indonesia. Oleh karena itu ,pemakaiannya seyogyanya dihindari. Hal ini dimaksudkan agar di

commit to user

dalam suasana resmi nasional pemakaian bahasa indonesia tidak dicemari oleh bahasa Jawa. Apa lagi dengan maksud untuk menghormati orang kedua, orang memaksakan dirinya untuk menggunakan kata bahasa Jawa ragam halus dan halus sekali pada waktu berbahasa indonesia. Di samping menyalahi kaidah, hal demikian mengingkari kedemokratisan bahasa Indonesia.

5. Kepada tim penyusun RPJP Daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang apa itu RPJP Daerah kepada para peserta Musrenbangda atau (yang hadir membahas draf RPJP Daerah) dari tingkat desa sampai propinsi, sehingga para penanggap tidak lagi lebih banyak yang membahas RPJP Daerah dari segi program dan kegiatan pembangunan.
6. Penelitian tentang proses pembahasan RPJP Daerah yang melibatkan jenis tuturan yang langsung, langsung literal dan tidak langsung serta tidak langsung literal di dalam teori Brown dan Gilman (1968) dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut atau pelengkap penelitian ini.
7. Untuk menghilangkan sikap-sikap yang tidak demokratis dalam berbahasa Indonesia "*penyuluh bahasa*" hendaknya menunjukkan perbedaan yang jelas antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa agar tidak terjadi penerapan budaya Jawa dalam pemakaian bahasa Indonesia, demikian juga sebaliknya.
8. Ditemukan sejumlah kosakata khususnya bahasa tipikal yang maknanya dikonvensikan sebagai penanda jargon pembangunan. Untuk itu sebagai tindak lanjut hasil penelitian ini dari bahasa tipikal dan jargon-jargon pembangunan dikembangkan lebih lanjut dan dihimpun menjadi satu untuk perintisan adanya kamus jargon pembangunan.
9. Hasil penelitian atas dalam proses pembahasan RPJP Daerah dapat digunakan oleh para peneliti komunikasi dan perencanaan pembangunan daerah sebagai panduan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas kombinasi antara peranan komunikasi terhadap perubahan sosial ditengah-tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi.
10. Hasil penelitian dalam proses pembahasan RPJP Daerah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bagian dari koleksi perpustakaan di kantor-kantor Bappeda

dan di lingkungan perguruan tinggi yang mendalami di bidang bahasa dan perencanaan pembangunan daerah serta komunikasi sosial.

